

**REPRESENTASI POPULIS DAN IMPLIKASINYA BAGI DEMOKRASI:
TELAAH KRITIS ATAS PEMIKIRAN POLITIK NADIA URBINATI
TENTANG POPULISME DAN DEMOKRASI**

DISERTASI

Karya tulis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Doktor dari
STF Driyarkara

Oleh

Pius Pandor

NIM: 0870108519

Program Doktor



SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA

2023

**REPRESENTASI POPULIS DAN IMPLIKASINYA BAGI DEMOKRASI:
TELAAH KRITIS ATAS PEMIKIRAN POLITIK NADIA URBINATI
TENTANG POPULISME DAN DEMOKRASI**

DISERTASI

**Karya tulis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Doktor dari
STF Driyarkara**



Oleh

Pius Pandor

NIM: 0870108519

Program Doktor

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT DRIYARKARA

2023

**REPRESENTASI POPULIS DAN IMPLIKASINYA BAGI DEMOKRASI:
TELAAH KRITIS ATAS PEMIKIRAN POLITIK NADIA URBINATI
TENTANG DEMOKRASI DAN POPULISME**

yang disusun oleh Pius Pandor
NIM : 0870108519
telah diuji pada tanggal 25.11. 2023

Pembimbing

Pembimbing Utama



Dr. Karlina Supelli

Pembimbing Pendamping I



Prof. Dr. A. Sudiarja

Pembimbing Pendamping II



Dr. Robertus Robet

Penguji I



Prof. Dr. F.X. Armada Riyanto

Penguji II



Yanuar Nugroho, Ph.D.

Penguji III



Dr. Lili Tjahjadi

Disertasi ini disahkan pada tanggal 30 Januari 2024

Direktur
Program Pascasarjana



Dr. Karlina Supelli



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Disertasi ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di lembaga pendidikan tinggi lain,
2. Di dalam disertasi ini tidak terdapat teks yang pernah diajukan sebagai karya tertulis, atau sebagai bagian karya tulis di salah satu Perguruan Tinggi untuk memperoleh gelar kesarjanaan,
3. Di dalam disertasi ini tidak terdapat teks yang pernah dipublikasikan, atau
4. Yang terdapat dalam tulisan orang lain, kecuali hal itu sudah diberitahukan dalam catatan tertulis yang merujuk ke teks tersebut, dan apabila sudah dipublikasikan, disebutkan di dalam daftar pustaka.



Jakarta, 25 November 2023

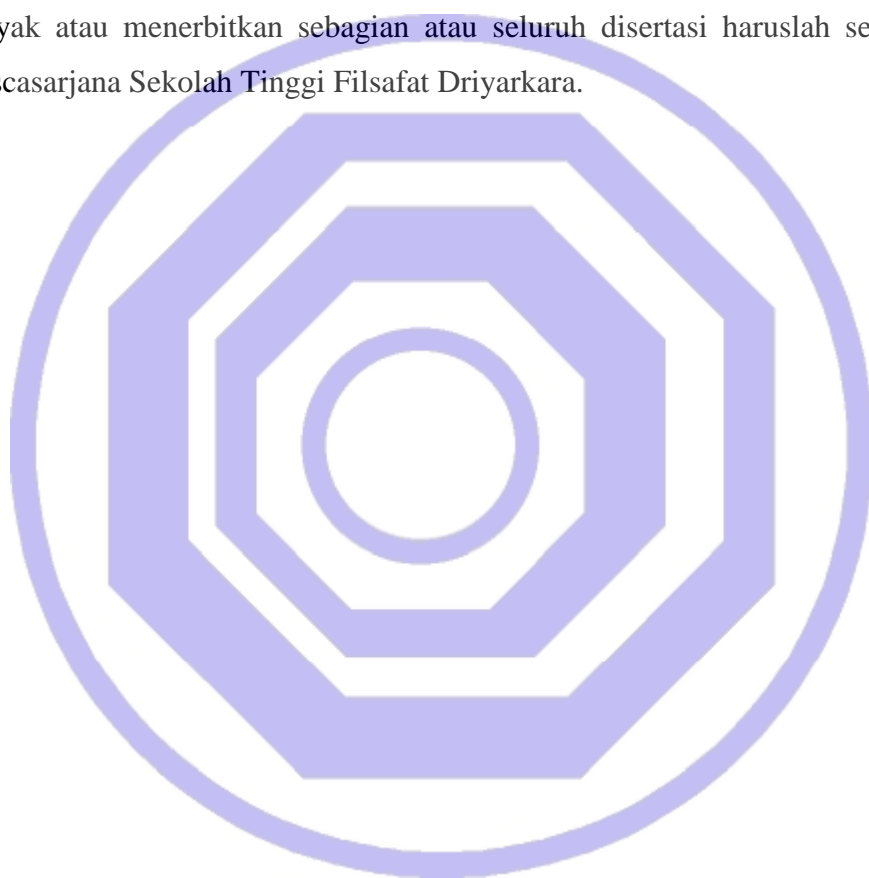

Pius Pandor

NIM: 0870108519

PEDOMAN PENGGUNAAN DISERTASI

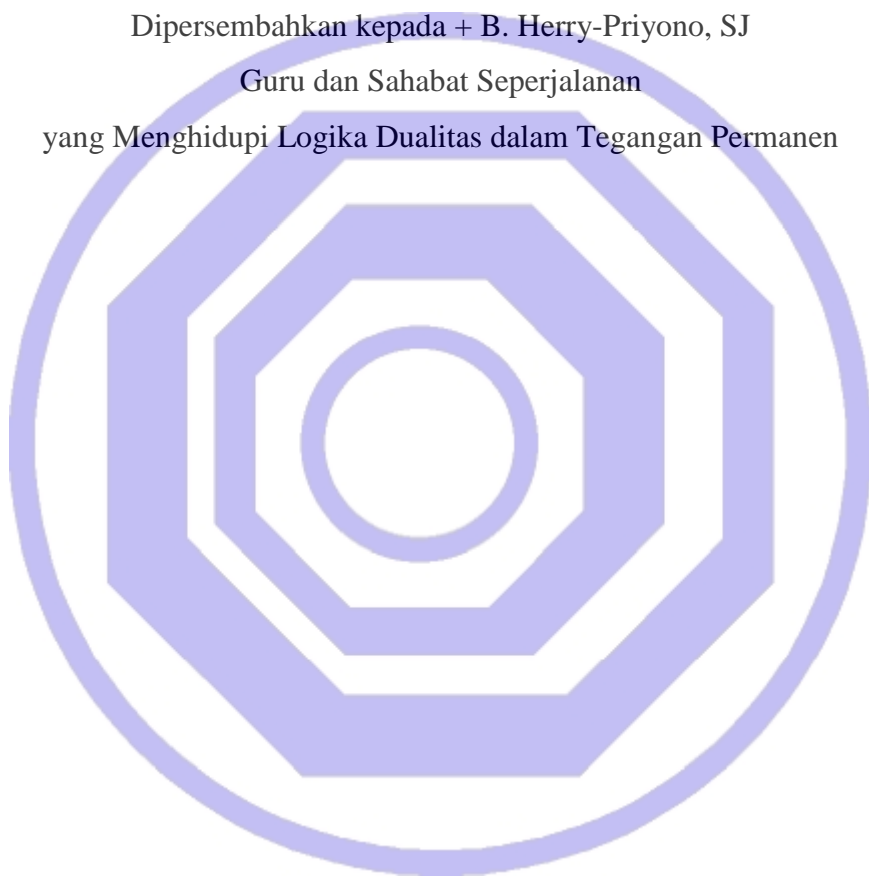
Disertasi Doktor yang tidak dipublikasikan terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, dan terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada pengarang dengan mengikuti aturan HaKI yang berlaku di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Referensi kepustakaan dicatat, tetapi pengutipan atau peringkasan disertasi hanya dapat dilakukan dengan seizin pengarang dan harus disertai dengan kebiasaan ilmiah untuk menyebutkan sumbernya.

Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh disertasi haruslah seizin Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.



PERUNTUKAN

Dipersembahkan kepada + B. Herry-Priyono, SJ
Guru dan Sahabat Seperjalanan
yang Menghidupi Logika Dualitas dalam Tegangan Permanen



UCAPAN TERIMA KASIH

TERIMA KASIH kepada Tuhan atas rahmat yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian disertasi ini. Proses penyelesaian penelitian disertasi ini merupakan hasil kolaborasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan TERIMA KASIH kepada:

Dr. Karlina Supelli yang dengan sabar telah memberikan yang terbaik lewat bimbingan, peneguhan, dan dukungan untuk menyelesaikan penelitian disertasi ini. Dari beliau penulis belajar untuk memperhatikan keketatan berpikir, melihat implikasi sebuah pemikiran, dan berani mengakui keterbatasan pemahaman untuk terus belajar.

Prof. Dr. A. Sudiarja sebagai Ko-Promotor I yang telah membantu penulis memahami pemikiran Nadia Urbinati dengan lebih baik lewat diskusi dan bimbingan secara berkala. Dari beliau penulis belajar pentingnya ketelitian, ketekunan dan komitmen.

Dr. Robertus Robet, selaku Ko-Promotor II, yang telah bersedia menjadi teman diskusi yang baik. Beliau banyak membantu penulis lewat catatan kritis dan masukan dalam proses penulisan disertasi ini, terutama agar penulis berani mengambil ‘jarak’ dan ‘jalan’ berbeda dengan Urbinati.

Prof. Dr. F.X. Armada Riyanto, yang telah memperkenankan penulis untuk melanjutkan studi di STF Driyarkara dan bersedia menjadi penguji disertasi ini. Terima kasih atas catatan-catatan kritis yang diberikan sehingga penulis mampu menempatkan *state of the art* penelitian ini dalam diskursus representasi politik.

Yanuar Nugroho, Ph. D atas kemurahan hatinya untuk menjadi penguji disertasi ini. Terima kasih atas catatan kritis yang diberikan dalam menyempurnakan penelitian disertasi ini. Channel Youtube *Narasi* dan Kuliah *Membaca Tanda-tanda Zaman* yang diberikan dalam Semester Gasal T.A 2021/2022 pada Program Pascasarjana STF Driyarkara, menjadi pelita yang menjaga asa penulis di saat energi meredup dalam proses penelitian disertasi ini.

+ Dr. B. Herry Priyono, SJ, guru dan sahabat seperjalanan yang telah membantu penulis memilih tokoh Nadia Urbinati. Romo Herry juga telah membuka cakrawala penulis agar berani masuk dalam ‘ketenangan’ berjarak sehingga mampu melihat dinamika persoalan *real* politik dengan cermat. Terutama atas waktu istimewa yang diberikan sehingga penulis boleh berdiskusi dalam proses persiapan penulisan disertasi ini lewat bacaan terbimbing.

Dr. David Ragazzoni dari Columbia University of America yang telah membantu penulis dalam memetakan pemikiran Urbinati dalam keseluruhan diskursus filsafat politik. *Thank you very much.*

Profesor Carolyn Evans dari Griffith University Australia, sebagai koordinator seri seminar *Constitutional Populism: Friend or Foe of Constitutional Democracy?* mulai tahun 2021-2023, yang memudahkan proses registrasi seminar *online* secara gratis dengan menghadirkan pembicara seperti Nadia Urbinati, Pierre Rosanvallon, Andrew Arato, Jean L Cohen, Jan Werner-Muller, Adam Przeworski, dan Bojan Bugari .

Prof. Nadia Urbinati, yang bersedia memberikan catatan kritis dan tanggapan atas penelitian disertasi ini lewat wawancara. Sumbangan pemikiran *Professoressa* sangat berguna untuk merawat kegelisahan dalam menghidupi demokrasi di tengah merebaknya gelombang populisme. *Grazie Immensa, Professoressa Urbinati.*

Kepada Saudari Christina Udiani, dari Kompas Gramedia yang telah menjadi pembaca kritis atas naskah penelitian ini.

Kepada seluruh pengajar, teman-teman, terutama Angkatan 2019, dan staf sekretariat Program Pascasarjana STF Driyarkara, khususnya Mbak Therisia Asih, Mbak Retno Harjanti, dan Mas Agus Setyono, penulis mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam karena telah membantu banyak hal terkait syarat dan prosedur akademik.

Pater Provinsial Kongregasi Pasionis Indonesia, P. Sabinus Lohin, CP, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan selama proses penyelesaian disertasi ini.

P. Nikodemus Jimbun, CP, mantan Provinsial Kongregasi Pasionis Indonesia, atas kepercayaan yang diberikan sehingga penulis boleh melanjutkan pendidikan di STF Driyarkara. P. Damianus Banjarnahor, CP, atas kebaikannya menyediakan logistik yang penulis perlukan demi kelancaran pengerjaan penelitian disertasi ini.

P. Dr. Yosep Pedhu, CP, atas dukungan dan motivasi yang berharga, terutama dalam proses pengerjaan disertasi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan penulis, angkatan 2019 STF Driyarkara. Terima kasih juga untuk STFT Widya Sasana Malang tempat penulis mengajar, atas kesempatan yang diberikan sehingga penulis menyelesaikan kuliah doctoral dengan baik.

P. Heribertus Monatolas, CP, Superior Komunitas Provinsialat Pasionis dan anggota komunitas, terima kasih atas kebersamaan yang boleh penulis alami selama proses penelitian disertasi ini.

Akhirnya kepada siapa saja yang menjadi teman seperjalanan penulis dalam proses penulisan disertasi ini, keluarga dan sahabat kenalan, penulis mengucapkan TERIMA KASIH.

ABSTRAK

[A] PIUS PANDOR (0870108519)

[B] **REPRESENTASI POPULIS DAN IMPLIKASINYA BAGI DEMOKRASI: TELAAH KRITIS ATAS PEMIKIRAN POLITIK NADIA URBINATI TENTANG DEMOKRASI DAN POPULISME**

[C] xiii + 258; 2023; Daftar Pustaka.

[D] Kata Kunci: Representasi Populis; Rakyat; Mayoritas; Pemilihan Perwakilan, Lensa Diarki; Legitimasi Kekuasaan; Lensa Realisme Politik; Pendidikan Politik.

[E] Penelitian ini membahas representasi populis dan implikasinya bagi demokrasi. Tesis utama penelitian ini adalah representasi populis tanpa pendidikan politik kritis, plural dan inklusif, rakyat menjadi penanda kosong. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif yang diteropong dari lensa diarki dan realisme politik tentang kehidupan politik yang berciri realis, kontingen dan situasional. Pokok-pokok argumen yang ditampilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : [1] memperlihatkan bahwa duduk persoalan representasi populis berkaitan erat dengan metafisika politik tentang siapa yang memiliki legitimasi untuk mengisi ruang kosong kekuasaan dengan menonjolkan paham representasi sebagai perwujudan kehendak rakyat dalam diri seorang pemimpin [representasi populis], [2] menunjukkan bahwa kaum populis memiliki strategi politik mentransformasi makna unsur-unsur utama demokrasi perwakilan seperti rakyat, mayoritas dan pemilihan perwakilan, [3] memperlihatkan bahwa dari lensa diarki [kehendak dan opini], representasi populis melanggar batas luar nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, pluralisme dan kesamaan, [4] menunjukkan bahwa representasi populis jika diteropong melalui lensa realisme politik, berada dalam tegangan permanen antara legitimasi dan kepercayaan, keputusan dan penilaian, rakyat dan elite, yang mewakili dan yang diwakili, dalam institusi dan di luar institusi, yang sosial dan yang politik sehingga menimbulkan implikasi bagi demokrasi. Sumbangan keilmuan yang diajukan oleh penelitian ini adalah pentingnya pendidikan politik kritis, inklusif dan plural di tengah ambivalensi populisme yang berada dalam tegangan permanen.

[F] Pustaka 261 (1935-2023).

[G] Dr. Karlina Supelli; Prof. Dr. Antonius Sudiarja; Dr. Robertus Robet.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	ii
PERYATAAN	iii
PEDOMAN PENGGUNAAN DISERTASI	iv
PERUNTUKAN	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.1.1. Gelombang Populisme dan Gerakan Politik Langsung	2
1.1.2. Palingan Representasi dan Konstruktivis dalam Teori Demokrasi.....	6
1.1.3. Letak Pemikiran Politik Urbinati dalam Teori Demokrasi dan Populisme.....	15
1.2. Masalah dan Rumusan Masalah.....	27
1.3. Tesis Penelitian	30
1.4. Argumentasi Kebaruan	32
1.5. Tujuan Penelitian	34
1.6. Metode Penelitian	34
1.7. Kerangka Disertasi.....	37
1.8. Biografi intelektual dan Pokok Pemikiran Urbinati tentang Populisme	40
BAB II. PERMASALAHAN REPRESENTASI POPULIS	48
2.1. Pengantar.....	48
2.2. Arti dan Tipe Ideal Representasi.....	49
2.3. Palingan Konstruktivis dalam Representasi Politik	52
2.4. Kritik Terhadap Prosedur Demokrasi Perwakilan	59
2.5. Teori-teori Representasi.....	67
2.5.1. Representasi Yuridis.....	70
2.5.2. Representasi Institusional.....	72

2.5.3. Representasi Politik.....	72
2.6. Representasi Populis	75
2.6.1. Representasi sebagai Perwujudan Kehendak Rakyat dan sebagai Mandat Politik	78
2.6.2. Proses Representasi Populis.....	82
2.6.3. Transformasi Representasi Populis	84
2.7. Rangkuman	92
BAB III. REPRESENTASI POPULIS SEBAGAI STRATEGI POLITIK	96
3.1. Pengantar.....	96
3.2. Gerakan Anti-Kemapanan dan Anti-Politik.....	97
3.3. Strategi Politik Kaum Populis Mentransformasi Makna Rakyat.....	104
3.4. Strategi Politik Mentransformasi Makna Mayoritas	115
3.5. Mentransformasi Makna Pemilihan Perwakilan	124
3.6. Rangkuman	126
BAB IV. REPRESENTASI POPULIS DARI LENZA DIARKI.....	129
4.1. Pengantar.....	129
4.2. Tempat Representasi Populis dalam Konteslasi Prinsip Diarki.....	130
4.3. Pelanggaran Prosedural oleh kekuatan non politis, populis dan plebisit	139
4.4. Sentralisasi Kekuasaan dengan Memobilisasi Mayoritas	143
4.5. Anti-Pluralistik: Mengabaikan hak-hak Minoritas dan Oposisi Politik.....	146
4.6. Merusak Legitimasi Demokrasi: Tidak Toleran dengan Kebebasan Sipil.....	150
4.7. Pemikiran Urbinati dalam Perbandingan dengan Andrew Arato dan Jean L. Cohen	154
4.8. Rangkuman	161
BAB V. REPRESENTASI POPULIS DARI LENZA REALISME POLITIK.....	164
5.1. Pendahuluan.....	164
5.2. Representasi Populis dari Lensa Realisme Politik	166
5.3. Formalisme dan Informalisme Politik dalam Representasi Populis	169
5.4. Implikasi Representasi Populis bagi Demokrasi.....	179

5.4.1. Antropologis: Mengawal Proses Demokratisasi dan De-demokratisasi di bawah Mata dan Suara Rakyat.....	180
5.4.2. Praktis: Merancang Kebijakan Publik Yang Bertanggung Jawab dan Akuntabel	184
5.4.3. Epistemologis: Berdemokrasi Dalam Semangat Republikanisme	188
5.4.4. Pedagogis: Pentingnya Pendidikan Politik yang berciri kritis, plural dan inklusif.....	192
5.5. Tanggapan dan Catatan Kritis.....	195
5.5.1. Mempersoalkan landasan berpikir genealogis Nadia Urbinati	195
5.5.2. Mempersoalkan Tirani-tirani Dalam Demokrasi Formal.....	200
5.5.3. Pilar Penjaga Demokrasi Prosedural.....	206
5.6. Pemikiran Politik Nadia Urbinati dalam Konteks Indonesia	209
5.6.1. Sentralitas Pemimpin Politik Dalam Demokrasi.....	210
5.6.2. Dominasi Elite dalam Demokrasi Indonesia.....	213
5.6.3. Merebaknya Polarisasi dalam Masyarakat.....	217
5.7. Rangkuman	219
BAB VI. KESIMPULAN.....	222
6.1. Kaum Populis Menafsir Demokrasi.....	223
6.2. Batas-batas Populisme dan Demokrasi	226
6.3. Pentingnya pendidikan politik di tengah ambivalensi populisme.....	232
6.4. Keterbatasan Penelitian.....	234
6.5. Agenda Penelitian Mendatang	235
DAFTAR PUSTAKA.....	239
SENARAI ISTILAH.....	254



DAFTAR GAMBAR

3.1. Rakyat sebagian dan keseluruhan.....	101
4.1. Demokrasi Diarki.....	136
4.2. Demokrasi Diarki Dalam Representasi Populis.....	138
4.3. Pambusukan Non Politik.....	141
4.4. Pambusukan Populis.....	142
4.5. Pambusukan Plebisit.....	142
4.6. Konstruksi Tipe Ideal Ernest Laclau.....	156
5.1. Segitiga Elitisme, Pluralisme, dan Populisme.....	178
5.2. Ruang Kosong Kekuasaan.....	179
5.3. Proses Demokratisasi.....	181
5.4. Proses De-demokratisasi.....	182
5.5. Momen Konstitutif Demokrasi.....	187



DAFTAR TABEL

2.1. Arti Representasi	51
2.2. Jenis-jenis Representasi	74
2.3. Prinsip-prinsip Representasi	76
2.4. Perbedaan Representasi Mandat dan Representasi Perwujudan.....	82
2.5. Transformasi Representasi Populis.....	92
4.1. Pluralisme Politik dan Pemisahan Kekuasaan	153
5.1. Lensa Realisme Politik	168
5.2. Bentuk-bentuk Klientisme	175
5.3. Fitur Utama Teori Elite, Pluralisme, dan Populisme	177
5.4. Perbedaan mendasar antara republikanisme, populisme, liberalisme.....	190
5.5. Prinsip-prinsip yang bertentangan terkait unsur demokratis dalam pemilihan umum.....	201
5.6. Tirani-tirani Demokrasi	205
5.7. Perbandingan demokrasi assemblea, demokrasi elektoral dan demokrasi terbuka	209
5.8. Jenis-jenis Elite.....	215
6.1. Kaum Populis Menafsir Demokrasi.....	224
6.2. Taksonomi Perbedaan Populisme dan Demokrasi.....	227
6.3. Batas-batas Populisme Inklusif dan Eksklusif.....	230
6.4. Pendidikan Politik Kritis, Inklusif dan Plural	233

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sejarah menunjukkan bahwa demokrasi bisa diselaraskan dengan keragaman. Itu tantangan yang kita hadapi. Generasi-generasi terdahulu di Eropa dan Amerika membuat pengorbanan-pengorbanan besar untuk membela lembaga-lembaga demokrasi dari ancaman kuat dari luar. Generasi kita, yang sudah tumbuh dalam demokrasi, menghadapi tugas yang berbeda: Kita mesti mencegahnya mati dari dalam.¹

[Steven Levitsky]

Populisme muncul dari dalam demokrasi perwakilan dan ingin mengonstruksi rakyat dan pemerintahan perwakilannya sendiri.²

[Nadia Urbinati]

Banyak negara di belahan dunia menganut pemerintahan demokratis dengan menekankan partisipasi aktif warga dalam proses politik. Untuk mengukur sejauh mana negara menjalankan pemerintahan secara demokratis, setiap tahun disajikan indeks demokrasi atau peringkat demokrasi global. Terlepas dari kenyataan bagaimana indeks demokrasi tersebut membaca praksis demokrasi menjadi seperangkat parameter yang dapat diukur, indeks-indeks tersebut sering kali mengabaikan sisi lain dari ‘mata uang’ demokrasi, yaitu representasi. Hubungan antara perwakilan dengan yang diwakili kurang mendapat tempat. Fungsi-fungsi lembaga-lembaga formal maupun informal perwakilan seperti parlemen, partai politik, media, dan lembaga masyarakat sipil seharusnya juga mendapat prioritas dalam menentukan indeks demokrasi atau peringkat demokrasi global.

Penelitian ini hendak meneropong relasi representasional antara pemerintah dan rakyat atau antara yang mewakili dan yang diwakili dalam pemerintahan demokratis dengan menonjolkan tema “Representasi Populis dan Implikasinya Bagi Demokrasi: Telaah Kritis Atas Pemikiran Politik Nadia Urbinati tentang Populisme dan Demokrasi”. Oleh karena itu, dalam bagian latar belakang ini, pertama-tama [dalam bagian 1.1.1.] penulis menguraikan gelombang populisme dan gerakan politik langsung dalam demokrasi. Selanjutnya dalam [1.1.2.] membahas palingan representasi dan konstruktivis dalam teori demokrasi. Setelah itu, dalam [1.1.3] penulis menguraikan letak pemikiran politik Urbinati tentang demokrasi dan populisme.

¹ Daniel Levitsky, Steven; Ziblatt, *How Democracies Die* (New York: Crown Publishing, 2018), 134.

² Nadia Urbinati, *Me the People: How Populism Transforms Democracy* (Massachusetts: Harvard University Press, 2019).

1.1.1. Gelombang Populisme dan Gerakan Politik Langsung

Populisme ‘memiliki kapasitas merusak demokrasi karena mengubah baik gaya, bentuk, maupun isi wacana publik.’³

[Nadia Urbinati]

Saat ini gelombang populisme sedang menerjang ‘rumah demokrasi’ di berbagai negara, mulai dari Amerika Latin, Eropa, Amerika Serikat, Afrika, Timur Tengah, Oseania, hingga Asia. Di Amerika Latin populisme menghasilkan pemimpin populis seperti Alberto Fujimori (Peru), Hugo Chávez, Nicolás Maduro (Venezuela), Gonzalo Sánchez de Lozada (Bolivia), Lucio Gutiérrez (Ekuador), Juan Peron (Argentina).⁴ Felipe Burbano de Lara mengkaji perdebatan intelektual terkait perkembangan populisme di Amerika Latin yang diklasifikasi dalam tiga gelombang: populisme klasik, populisme neoliberal, dan populisme radikal.⁵ Selain itu, ia merangkum diskursus tentang populisme di kawasan itu dengan menganalisis penyebab munculnya gerakan populisme, ciri karismatik pemimpin populis, dan hubungan populisme dengan demokrasi. Di Eropa, kekuatan figur dan partai populis telah masuk dalam pemerintahan demokratis di Yunani, Hongaria, Polandia, Slovenia, dan Italia. Selain itu, partai atau pemimpin populis mendapatkan kekuasaan elektoral di Belanda, Prancis, Spanyol, Austria, dan Italia.⁶

Populisme juga masuk dalam proses demokratisasi di Asia Tenggara. Marcus Mietzner menyimpulkan bahwa populisme elektoral di Asia Tenggara dapat diklasifikasi ke dalam beberapa tipe.⁷ Subtipe pertama adalah gerakan populis Narendra Modi yang menampilkan nasionalisme Hindu dan integrasi India dalam sistem ekonomi dunia. Subtipe kedua adalah populisme oligarki Thaksin Shinawatra dari Thailand yang mengandalkan dukungan rakyat dengan memprakarsai mega proyek infrastruktur dan perawatan kesehatan. Subtipe ketiga adalah Joko Widodo yang digambarkan Mietzner sebagai populis teknokratis, sedangkan subtipe keempat adalah Rodrigo Duterte dari Filipina yang digambarkan sebagai populis otokratis terbuka. Dari keragaman subtipe populis yang muncul, Mietzner menyimpulkan

³ Urbinati, *Me the People*, 18.

⁴ Enrique Peruzzotti, “Populism as Democratization’s Nemesis: The Politics of Regime Hybridization,” *Chinese Political Science Review* 2, no. 3 (2017): 314–327.

⁵ Felipe Burbano de Lara, “Populist Waves in Latin America: Continuities, Twists, and Ruptures,” in *Routledge Handbook of Global Populism*, ed. Carlos de la Torre (London and Chicago: Taylor & Francis Group, 2019), 435–450.

⁶ Betz Hans-Georg, “Daenerys Targaryen at IKEA: Left Populism in Spain,” in *Comparative Political Studies* (Newsletter 26, 2017).

⁷ Mietzner Marcus, “Movement Leaders, Oligarchs, Technocrats and Autocratic Mavericks: Populist in Contemporary Asia,” in *Routledge Handbook of Global Populism*, ed. Carlos de la Torre (New York, 2019), 370–384.

bahwa munculnya politisi populis di Asia Tenggara tidak meningkatkan kebebasan masyarakat sipil dan kualitas partisipasi demokrasi. Di Afrika, populisme berkembang dengan menggunakan persoalan etnis dalam menghadapi elite dominan seperti Julius Malema di Afrika Selatan, Michael Sata di Zambia, dan Raila Odinga di Kenya.⁸ Di Timur Tengah, secara khusus di Iran, Turki, Mesir dan Israel diskursus tentang populisme berfokus pada persoalan populisme agama.⁹ Di Amerika Serikat, gelombang populisme yang diawali dengan pendirian Partai Rakyat tahun 1890-an hingga Donald Trump ditandai dengan munculnya fenomena demonisasi musuh lewat wacana menjelekkan musuh, dan menganggap lawan politik sebagai aktor politik yang tidak sah.¹⁰ Di Amerika Tengah, populisme berhadapan dengan tindakan kekerasan dan represi yang dilakukan rezim penguasa. Karena itu, di beberapa negara seperti El Salvador, Guatemala, dan Honduras populisme tidak muncul. Di Kosta Rika di bawah José Figueres gerakan populisme dimasukkan dalam logika sistem partai, sedangkan di Panama dan Nikaragua, pemimpin populis mengikuti strategi kaum populis dalam mendukung kekuasaan.¹¹

Di tengah terjangan gelombang populisme tersebut, ‘banyak warga negara yang ini selamat dengan kembali ke demokrasi langsung karena menurut mereka lebih sesuai dengan cita-cita kedaulatan rakyat, pemerintahan sendiri, dan kesetaraan politik secara substansial’.¹² Penulis membaca gerakan politik langsung tersebut dalam beberapa kelompok.

Kelompok pertama, gerakan sosial dan eksperimen politik yang beragam seperti *Occupy Wall Street* di Amerika Serikat (2011), *Zapatista* di Meksiko, *Indignados* di Spanyol (2011),¹³ eksperimen konfederasi demokrasi Kurdi di Suriah Utara, *The Arab Spring* (2011), protes sosial terhadap Erdoğan di Turki, *Yellow Vests* di Prancis dan gerakan anti monarki di Thailand (2020).¹⁴ Kelompok-kelompok ini menolak pendelegasian kekuasaan atau hierarki kekuasaan. Mereka mengidealkan demokrasi langsung yaitu demokrasi majelis tanpa pemimpin, terorganisir sendiri, tatap muka, dan biasanya diterapkan dalam pengaturan

⁸ Cheeseman Nic, “Populism in Africa and the Potential for Etnically Blind Politics,” in *Routledge Handbook of Global Populism*, ed. Carlos De La Torre (Routledge Taylor & Francis Group., 2019), 357–369.

⁹ Flic Dani, “Populism in the Middle East,” in *Routledge Handbook of Global Populism*, ed. Carlos De La Torre (New York: Routledge Taylor & Francis Group., 2019), 385–401.

¹⁰ Ritchie Savage, “Populism in the U.S.,” in *Routledge Handbook of Global Populism* (New York, 2019), 402–415.

¹¹ Roniger Luis, “The Missing Piece in Global Populism: The Role Populism Played in Central America,” in *Routledge Handbook of Global Populism* (New York, 2019), 451–464.

¹² Landemore Helena, *Open Democracy: Reinventing Popular Rule for The Twenty-First Century* (Princeton & Oxford: Princeton University Press, 2020), 53.

¹³ Nadia Urbinati, *Pochi Contro Molti: Il Conflitto Politico Nel XXI Secolo* (Bari-Roma: Laterza, 2020).

¹⁴ Diunduh dari <https://www.theguardian.com/world/2020/dec/05/thousands-show-support-for-thai-king-amid-anti-monarchy-protests> pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 8.30 PM Jakarta.

masyarakat mulai dari masyarakat yang agak kecil hingga masyarakat yang lebih besar tanpa mengaburkan aspek transparansi, dan tanggung jawab.

Kelompok kedua, pendukung teknologi komunikasi baru. Menurut mereka, pesatnya perkembangan media komunikasi, membuat demokrasi langsung [*e-demokrasi*] menjadi rasional untuk dipraktikkan di negara-negara demokratis. Tujuannya adalah untuk mengatasi representasi dalam skala besar dengan mengembangkan model musyawarah dan pemungutan suara inklusif yang diaktifkan melalui dunia digital di antara semua warga negara.¹⁵ Menurut mereka, e-demokrasi tidak hanya untuk melindungi demokrasi, tetapi juga untuk menata kembali demokrasi sebagai roda penggerak proses kolaboratif literatif dari keterlibatan warga aktif. *E-demokrasi* mengasumsikan bahwa semua keuntungan dari demokrasi langsung skala kecil yang seharusnya ditemukan di masa lalu dapat dipraktikkan lagi karena teknologi baru yang telah mengubah dunia menjadi sebuah desa kecil dan akan memungkinkan jutaan dari kita untuk melakukan secara elektronik apa yang hanya bisa dilakukan tatap muka di antara sejumlah kecil masyarakat.

Kelompok ketiga, gerakan partai seperti *Syriza* di Yunani, *Podemos* di Spanyol atau Partai Bajak Laut Eropa Utara, *M5* di Italia. Meskipun gerakan-gerakan ini merupakan produk pemilu yang secara terstruktur sebagai partai politik, mereka mengklaim selaras dengan prinsip anti-perwakilan yang mempertahankan hubungan langsung dengan pemilih.¹⁶ Praktik demokrasi mengacu pada teori demokrasi “cair” atau “delegatif” di mana anggota partai memiliki pengaruh langsung pada platform dan keputusan politik baik secara internal maupun saat berkuasa. Dalam model demokrasi cair, anggota dapat memilih untuk memberikan suara secara langsung pada suatu isu tertentu yang berkembang dalam masyarakat atau mendelegasikan suara kepada siapa pun yang mereka pilih. Begitu berkuasa, tujuan dari partai-partai tersebut adalah untuk menghidupkan kembali lembaga-lembaga publik dengan memperkenalkan mekanisme partisipasi langsung secara *online*.

Keempat, beberapa kelompok menggunakan kosakata demokrasi “langsung” dan “anti-perwakilan” untuk membela apa yang sebenarnya lebih baik dicirikan sebagai institusi dan tindakan populis, di mana kelas sosial yang lebih rendah diberikan lembaga dan mekanisme

¹⁵ Roslyn Fuller, *Principles of Digital Democracy: Theory and Case Studies* (Dublin: De Gruyter Publication, 2023).

¹⁶ Enrico Padoan Jacopo Custodi, “The Nation of the People: An Analysis of Podemos and Five Star Movement’s Discourse on the Nation,” *Nations and Nationalism* 29, no. 2 (2022).

perwakilan khusus yang memungkinkan mereka berani melawan tirani minoritas yaitu sekelompok elite yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan demokratis.¹⁷

Gerakan politik langsung yang telah diuraikan di muka, mengalir dari pokok perdebatan antara Jean-Jacques Rousseau dan Thomas Hobbes tentang presentasi dan representasi dalam teori demokrasi. Dalam pandangan Rousseau, rakyat dan kedaulatan rakyat tidak dapat diwakilkan. Kritik Rousseau terhadap representasi ditemukan dalam bab 15 buku 3 dari *The Social Contract*, di mana ia dengan tegas menyatakan bahwa

Kedaulatan tidak dapat direpresentasikan, karena alasan yang sama bahwa kedaulatan tidak dapat diasingkan; kedaulatan pada dasarnya adalah kehendak umum, dan kehendak tidak dapat diwakili; sesuatu yang mengaku berbicara atas kehendak x adalah kehendak x atau sesuatu yang lain; tidak ada kemungkinan perantara yaitu sesuatu yang tidak persis seperti kehendak x tetapi juga bukan kehendak x (Rousseau 1762, 49)

Dari sini Rousseau kemudian menyimpulkan bahwa wakil rakyat untuk membuat undang-undang atas nama mereka sendiri tidak dapat menjadi perwakilan, karena undang-undang apa pun yang tidak diratifikasi oleh rakyat sama sekali bukanlah undang-undang. Karena alasan inilah Rousseau menganggap orang Inggris keliru ketika menganggap diri mereka bebas, yang sebenarnya hanya selama pemilihan anggota parlemen. “Begitu perwakilan terpilih, rakyat menjadi budak, dan bukan apa-apa. Penggunaan momen kebebasannya yang singkat menunjukkan bahwa ia pantas kehilangan kebebasannya!” (Rousseau 1762, 49)

Kutipan di atas merupakan pokok argumentasi yang diungkapkan Rousseau untuk menolak representasi. Ia menulis hal ini dalam *The Social Contract* dengan menegaskan bahwa kebutuhan untuk partisipasi langsung dan universal dari seluruh warga dalam proses legislasi hukum. Hal ini juga tertulis dalam rumusannya bahwa ‘kehendak sama sekali tidak mengakui adanya perwakilan. Dampaknya secara teoritis, partisipasi langsung merupakan prasyarat dari kepatuhan terhadap hukum.

Rousseau mengambil pendekatan kedaulatan dan kekuatan politik yang berbeda dari Hobbes. Dalam *Leviathan* Hobbes mengatakan bahwa rakyat secara kontraktual mengalihkan hak mereka kepada otoritas bersama penguasa. Penguasa atau *Leviathan* adalah otoritas tertinggi, dan mewakili abstrak pengertian negara. Kehendak *Leviathan* berkuasa dan mewakili keinginan semua orang yang telah mengasingkan hak mereka untuk itu. Hukum adalah perintah penguasa yang berdaulat yang berasal dari kehendaknya dan kewajiban untuk

¹⁷ Camila Vergara Gonzalez, “Assembling the Plebeian Republic” (2019).

mematuhinya secara mutlak (Hobbes 1651). Dalam penggunaan modern, istilah tersebut memiliki konotasi otoriter.

Dalam *The Social Contract*, Rousseau mengambil pendekatan yang berbeda. Seperti Hobbes, dia berpendapat bahwa kekuatan politik yang sah mengalir dari kontrak yang dibentuk oleh individu-individu dalam masyarakat di mana individu tersebut melepaskan kebebasan tertentu untuk mendapatkan jenis kebebasan baru. Tidak seperti Hobbes, kekuatan politik ini tidak diproyeksikan ke entitas yang mewujudkan hak dan kebebasan yang menjadi sasaran individu. Sebaliknya, karena kekuatan politik ini berasal dari individu itu sendiri, mereka mempertahankan kekuasaan berdaulat setelah menyusun kontrak sosial. Kedaulatan, kehendak rakyat, dan hukum yang mengalir darinya memiliki konotasi yang berbeda dengan Rousseau.

Menurut Rousseau, dasar kekuasaan politik adalah kedaulatan yang terletak di antara rakyat. Sistem perwakilan mengasingkan kekuasaan politik rakyat, dan menempatkannya pada tangan perwakilan sebagai gantinya. Dalam pengertian ini, sistem perwakilan pada dasarnya tidak demokratis, dan demokrasi dan perwakilan akan menjadi konsep yang saling bertentangan. Jika dasar untuk kritik konseptual ini dapat ditemukan, kita harus memikirkan kembali dan merestrukturisasi sistem politik kita dengan menggunakan istilah 'demokratis'.

1.1.2. Palingan Representasi dan Konstruktivis dalam Teori Demokrasi

Palingan perwakilan dan konstruktivis yang menjadi fokus dalam pemikiran Urbinati bertitik tolak dari pengamatannya atas kinerja pemerintahan perwakilan yang mengalami krisis representasi sehingga menjadi 'tempat yang subur' bertumbuhnya 'benih-benih' populisme. Dalam membahas representasi politik, Urbinati banyak merujuk pada karya Hannah Pitkin terutama terkait analisis semantik atas konsep representasi.¹⁸

Sebelum melakukan analisis semantik atas konsep representasi, Pitkin menegaskan bahwa 'berbicara dan bertindak untuk orang lain' merupakan dasar untuk memahami dinamika politik. Berkaitan dengan ini, ia berkata: "Di zaman modern hampir semua orang ingin diatur oleh perwakilan ... setiap kelompok politik menginginkan perwakilan; dan setiap pemerintah mengklaim mewakili".¹⁹ Dalam situasi politik saat ini pernyataan Pitkin ini banyak

¹⁸ Nadia Urbinati, *Representative Democracy: Principles & Genealogy* (London and Chicago: The University of Chicago Press, 2006), 10.

¹⁹ Hanna Fenichel Pitkin, *The Concept of Representation* (Berkeley: University of California Press, 1967), 2.

dipertanyakan. Terhadap proposisi ‘semua orang ingin diatur oleh lembaga perwakilan’, ditemukan bahwa dalam proses demokratisasi banyak yang kecewa dengan kinerja politisi dan lembaga perwakilan seperti partai politik.²⁰ Bentuk kekecewaan mereka terhadap politik perwakilan, dapat dibaca dalam karya Colin Hay berjudul *Why We Hate Politics* (2007), Pippa Norris berjudul *Democratic Deficit* (2013), Dalton J. Russel berjudul *Democratic Challenges, Democratic Choices: The Erosion of Political Support in Advanced Industrial Democracies* (2004) dan banyak karya serupa. Proposisi kedua dan ketiga, ‘setiap kelompok politik menginginkan perwakilan dan setiap pemerintahan mengklaim mewakili’ juga dipertanyakan. Banyak kelompok maupun gerakan politik yang muncul baik secara eksplisit maupun implisit menyangkal bahkan menjauhkan diri dari warisan politik perwakilan.²¹

Sebagai bentuk disensus terhadap politik perwakilan, kaum populis mempertanyakan kembali representasi politik yang telah diperkenalkan Pitkin yaitu representasi formalistik, simbolis, deskriptif, dan substantif.²² Dari representasi formalistik misalnya, kaum populis mempersoalkan makna konsep ‘otorisasi dan akuntabilitas’. Terkait otorisasi mereka berkata, “Jika demokrasi dipahami sebagai pemerintahan ‘dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat’, maka perwakilan yang ‘benar’ adalah dari rakyat yang diwakili oleh partai populis.” Penolakan akuntabilitas, didasarkan pada prasangka bahwa perwakilan partai tidak responsif terhadap preferensi konstituennya karena lebih mengikuti instruksi partai daripada mendengarkan suara rakyat. Dari representasi simbolis, kaum populis berargumen bahwa anggota parlemen terpilih hanyalah pejabat partai dan profesional politik tanpa melayani rakyat. Berkaitan dengan perwakilan deskriptif, kaum populis mengatakan bahwa anggota parlemen terpilih merupakan bagian dari elite yang tidak lagi sama dengan rakyat pada umumnya. Setelah terpilih, mereka merupakan bagian dari kelas elite atau kelompok politisi yang tidak lagi menyerupai atau menggambarkan pemilihnya. Akhirnya, berkaitan dengan representasi substantif, kaum populis melihat bahwa perwakilan terpilih tidak hadir secara faktual untuk berpihak dan bertindak atas nama yang diwakilinya.²³

²⁰ Simon Tormey, “The Contemporary Crisis of Representative Democracy,” *Democratic Theory* 1, no. 2 (2014): 104–112.

²¹ Hanna Fenichel Pitkin, “Representation and Democracy: Uneasy Alliance,” *Scandinavian Political Studies* 27, no. 3 (2004): 335–342.

²² Davide Vittori, “Is Populism Changing the Political Representation of Western Democracies?,” *Journal of Political Sciences & Public Affairs* 03, no. 01 (2015): 1–8.

²³ Annika Werner and Heiko Giebler, “Do Populists Represent? Theoretical Considerations on How Populist Parties (Might) Enact Their Representative Function,” *Representation* 55, no. 4 (2019): 379–392.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa saat ini demokrasi perwakilan sedang diserang dua sisi, kurang responsif” dan ‘terlalu responsif” kepada pemilih.²⁴ Kurang responsif mengacu pada kurangnya keterwakilan kepentingan terhadap mereka yang lemah secara politik dan favoritisme terhadap elite sehingga mendorong munculnya beragam gerakan politik langsung tanpa melalui perwakilan. Terlalu responsif mengacu pada reaksi berlebihan terhadap gerakan politik langsung warga yang mempertanyakan lembaga inti demokrasi perwakilan, termasuk media independen, dan supremasi hukum. Kritik atas representasi politik dan gerakan politik langsung yang diuraikan di atas, dibaca oleh Urbinati sebagai konsekuensi logis munculnya polarisasi warga negara dalam dua kelas organik yaitu ‘banyak dan sedikit, dan vertikalisasi sistem politik’.²⁵ Dalam polarisasi warga tersebut, ada upaya penyatuan massa melalui seorang pemimpin populis untuk bersatu melawan elite. Dalam pembacaan Urbinati polarisasi didorong oleh beberapa faktor seperti:

(1) lanskap politik di mana perwakilan elektoral sekarang bersaing dengan jenis representasi baru, dan informal; (2) persoalan yang terkait kesetaraan dan keadilan perwakilan pemilu khususnya terhadap kaum minoritas dan perempuan; (3) fokus baru pada penilaian politik dalam teori demokrasi; dan (4) apresiasi baru bahwa partisipasi dan representasi merupakan bentuk keterlibatan warga yang saling melengkapi.²⁶

Sebagian besar literatur teori politik selama 30 tahun terakhir berfokus pada kelemahan sistem pemerintahan perwakilan yang dipraktikkan di banyak negara yang menganut sistem demokrasi. Benjamin Barber misalnya mengkritik representasi karena tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan sosial,²⁷ atau ketika Joseph Schumpeter menganggap kehendak umum sebagai produk kekuatan elite daripada kekuatan pendorong politik.²⁸ Kedua pemikir politik ini menerima aksioma yang mengatakan bahwa demokrasi berarti pemerintahan langsung. Dengan pemahaman seperti ini, Barber menolak representasi sebagai bentuk pemerintahan yang tidak tepat, dan Schumpeter menolak demokrasi perwakilan karena digunakan sebagai instrumen untuk melanggengkan dominasi elite. Bagi Barber, dua kelemahan dominan dari pemerintahan perwakilan adalah; *Pertama*, bahwa “representasi tidak sesuai dengan kebebasan karena mendelegasikan kedaulatan kepada perwakilan sehingga mengasingkan kemauan politik dengan mengorbankan

²⁴ John; Wolfgang Merkel (Eds) Sonia, Alonso, Keane, *The Future of Representative Democracy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 27.

²⁵ Urbinati, *Me the People*, 74.

²⁶ Nadia Urbinati and Mark E. Warren, “The Concept of Representation in Contemporary Democratic Theory,” *Annual Review of Political Science* (2008), 387.

²⁷ Benjamin Barber, *Strong Democracy Participatory Politics for a New Age* (Berkeley: University of California Press, 1984), 145-146.

²⁸ J. Schumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy* (New York: Harper Torchbook, 1962), 263.

pemerintahan sendiri dan otonomi yang sejati” dan; *Kedua*, mempertahankan ruang publik sebagai landasan politik yang netral di mana politik dilakukan secara independen dan abstrak oleh yang memerintah²⁹ Dalam situasi ini, perwakilan mereduksi warga sebagai ‘massa’ yang bisa dipolitisasi demi kepentingan elite.

Namun baru-baru ini, bandul politik berubah arah. Alih-alih membuat aturan langsung menjadi batu ujian demokrasi untuk menilai apakah pemerintah memenuhi tugas demokrasi, banyak ahli teori politik menganggap representasi sebagai model demokrasi dalam dirinya sendiri. Menurut Manin, ‘demokrasi perwakilan bukanlah sistem di mana masyarakat mengatur dirinya sendiri, tetapi sistem di mana kebijakan dan keputusan publik dibuat berdasarkan keputusan rakyat’.³⁰

Untungnya, perhatian ilmiah sejak 1990-an juga beralih ke aspek perwakilan dari demokrasi perwakilan. Gerakan ini dinamai ‘palingan perwakilan’ [*Representation Turn*]. Klaim utama palingan perwakilan adalah bahwa representasi bukanlah distorsi demokrasi, melainkan mekanisme yang memungkinkan demokrasi. Dalam konteks ini, representasi merupakan syarat yang diperlukan untuk demokrasi. Hanya melalui hubungan representasi, rakyat dapat ‘dihadirkan’, jika tidak, rakyat tidak ada.

Oleh karena itu, menurut Urbinati, kesenjangan dalam hubungan representasi perlu dipertahankan agar yang diwakili dapat menjalankan fungsi kritisnya dalam mengawasi perwakilan. Berkaitan dengan hal ini, ia berkata:

Mendekati representasi dan partisipasi dari sudut pandang penilaian daripada kehendak membuat kita sepenuhnya menghargai nilai ketidaklangsungan dalam politik demokrasi. (...) Representasi dapat mendorong partisipasi politik sejauh karakter deliberatif dan menghakiminya memperluas politik melampaui batas sempit keputusan dan pemungutan suara.”³¹

Pendekatan palingan perwakilan lebih memperhatikan waktu antara pemilihan dibandingkan dengan konsep perwakilan yang didasarkan pada kehendak. Nadia Urbinati membandingkan demokrasi perwakilan dengan demokrasi langsung sebagai sistem pengambilan keputusan yang mengajukan pertanyaan ya/tidak kepada warga negara dan karena itu tidak dapat mengakomodasi pluralisme pendapat. Kehadiran langsung warga negara jauh lebih tidak mewakili gagasan mereka daripada kehadiran mereka secara tidak langsung dalam demokrasi

²⁹ Benjamin Barber, *Strong Democracy*, 146.

³⁰ Manin, *The Principles of Representative Government*, 192.

³¹ Urbinati, *Representative Democracy: Principles and Genealogy*, 16.

perwakilan.³² Konsekuensinya, perwakilan tidak dilihat sebagai bentuk pemerintahan terbaik kedua setelah demokrasi langsung.

Setelah menampilkan gagasan tentang palingan representasi, berikut penulis membahas palingan konstruktivis dalam representasi politik. Politisasi makna representasi bekerja secara berbeda dalam konstruktivisme. Lisa Disch menyebut konstruktivisme sebagai pendekatan terhadap representasi yang menyangkal asumsi bahwa representasi adalah 'proses deskriptif dan mimetis, proses yang sekadar mentransmisikan sesuatu yang sudah ada sebelumnya.'³³ Pada tataran umum, representasi konstruktivis ingin memperkaya dan memperluas kosa kata demokrasi representasi politik. Representasi konstruktivis sebagai cara untuk menunjukkan betapa beraneka ragam dan kompleksnya gagasan kedaulatan yang dikaitkan dengan representasi demokratis. Representasi konstruktivis memperkaya vektor-vektor aktivitas politik yang menjadikan representasi sah secara demokratis dengan memasukkan berbagai makna representasi dalam representasi demokratis.

Dalam analisis atas karya Rosanvallon tentang representasi, Disch menjelaskan wawasan teoretis yang berasal dari gagasan konstruktivis representasi demokratis. Dia menjelaskan bahwa baik Rosanvallon maupun Urbinati mengusulkan konsepsi anti-fundasionalis tentang kedaulatan rakyat yang mempertanyakan pemahaman umum kita tentang legitimasi demokrasi yang mengatakan bahwa 'perwakilan itu demokratis hanya ketika legislator dan juru bicara publik lainnya menepati janji yang mereka buat kepada konstituen mereka, dan merespons preferensi mereka yang sudah terbentuk'³⁴ Disch berargumen bahwa kaum konstruktivis biasanya berpegang pada gagasan tentang rakyat sebagai efek representasi demokratis, bukan sebagai landasan legitimasi demokrasi'. Salah satu implikasi dari pandangan tersebut adalah adanya kekosongan sebelum hubungan perwakilan itu dilembagakan. Hal ini dapat membuat kita berpikir bahwa rakyat hanyalah sebuah konstruksi tak tentu yang muncul sepenuhnya selama proses perwakilan. Namun, apakah ini benar-benar terjadi? Menariknya, Disch menjawab masalah ini dengan membedakan antara dua model representasi konstruktivis yang berbeda, versi radikal dan versi moderat. Versi radikal ditemukan dalam karya Sieyès yang mengatakan, 'rakyat dibentuk sebagai subjek politik

³² Urbinati, *Representative Democracy: Principles and Genealogy*, 113.

³³ Lisa Disch, "Toward a Mobilization Conception of Democratic Representation," *The American Political Science Review* 105, no. 1 (2011), 104.

³⁴ Lisa Disch, "The People as 'Presupposition' of Representative Democracy - An Essay on the Political Theory of Pierre Rosanvallon," *Redescriptions: Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory* 12, no. 1 (2008), 48.

hanya melalui representasi.’³⁵ Pendekatan ini mensyaratkan pandangan representasi yang lebih berorientasi pada proses daripada substansi. Dengan kata lain, rakyat ada sejauh ia terwakili.

Berbeda dengan konstruktivis radikal, Disch berpendapat bahwa pemikir politik seperti Rosanvallon dan Iris Marion Young mempertahankan versi konstruktivisme moderat. Mereka berargumen bahwa kontestasi atau perjuangan politik menentukan identitas kelompok, dan mereka menyangkal bahwa ‘konstituensi politik diberikan sebelum politik.’³⁶ Misalnya berkaitan dengan Disch, Iris Young mengusulkan pergeseran dari pemahaman representasi yang berorientasi pada identitas ke pemahaman yang berorientasi pada proses di mana ‘preferensi konstituen muncul hanya dari waktu ke waktu melalui mediasi lembaga politik deliberatif.’³⁷ Jadi, baik Rosanvallon maupun Iris Marion Young, proses pembentukan kelompok anti-esensialis ini mengandaikan adanya rakyat yang masuk ke dalam proses perwakilan. Dengan demikian, perbedaan antara interpretasi moderat dan radikal atas representasi konstruktivis adalah bahwa moderat memperlakukan gagasan rakyat sebagai hasil dari proses sementara, meskipun masih ada sesuatu yang harus diandaikan sebelum proses tersebut, sedangkan radikal menghilangkan gagasan realitas politik sebelum proses perwakilan.

Perbedaan antara kedua posisi ini menghasilkan dua konsepsi perwakilan demokrasi yang berbeda. Versi konstruktivisme moderat berkontribusi pada politik demokrasi dengan mengidentifikasi seperangkat aturan atau institusi yang dapat digunakan untuk meringkai proses perwakilan demokrasi. Menurut aturan dan institusi formal ini, pandangan moderat berpendapat bahwa pergulatan sudut pandang dan konsepsi terjadi di antara rakyat. Dengan kata lain, aturan diberlakukan, menurut interpretasi moderat, karena rakyat atau subjek politik telah menyepakati aturan atau institusi bersama sebelum hubungan perwakilan. Sebaliknya bagi konstruktivisme radikal semuanya direduksi menjadi peran konstitutif representasi. Artinya kebutuhan untuk menyoroti beberapa aturan atau prosedur dasar yang menyusun hubungan perwakilan jauh kurang penting bagi dunia politik. Memang, menurut perspektif ini tidak ada realitas politik sebelum adanya proses representasi.

Pertama, Urbinati berpendapat bahwa pandangan voluntaristik membenarkan konsep kedaulatan dan rakyat. Dengan mengatribusikan kehendak berdaulat kepada rakyat,

³⁵ Lisa Disch, “The People as ‘Presupposition, 51.

³⁶ Lisa Disch, “The People as ‘Presupposition, 59.

³⁷ Lisa Disch, “The People as ‘Presupposition, 59.

pandangan voluntaristik mengklaim bahwa politik demokrasi selalu merupakan pertanyaan tentang keputusan di *hit et nunc*, di sini dan sekarang. Mengidealkan gagasan demokrasi langsung yang didasarkan pada berkumpulnya rakyat di ekklesia demokrasi kuno tidak dapat mengimbangi dunia modern atau dengan kesenjangan waktu yang diperlukan antara kehendak dan penilaian dalam politik demokrasi perwakilan. Kritik terhadap pandangan voluntaristik ini merupakan kritik implisit terhadap politisasi representasi mimetik.

Kedua, Urbinati mengkritik pandangan voluntaristik karena memiliki konsep representasi yang terbatas yang hanya mendasarkan gagasan pada pemilihan.³⁸ Dia berpendapat bahwa gagasan ini menghilangkan setiap dinamika perwakilan yang terjadi antara suara elektoral dan ruang publik deliberatif pemerintahan demokratis. Urbinati berpendapat bahwa pandangan ini mengabaikan dimensi politik representasional dan non-elektoral. Kritik kedua terhadap pandangan voluntaristik ini menunjukkan adanya politisasi representasi simbolik. Pada periode antara pemilu, bentuk representasi formalistik dan legal yang dihasilkan dari politisasi mandat sulit diterapkan. Artinya representasi politik harus dipahami sebagian besar melalui jalur estetika dan simbolik. Tujuan Urbinati adalah untuk mengedepankan pembelaan normatif terhadap representasi yang mengikuti penemuan kembali aspek representasi yang ‘demokratis’ secara inheren. Untuk mencapai tujuan ini, dia perlu memulai dari beberapa asumsi tentang definisi dan deskripsi demokrasi sebagai rezim politik dan jenis representasi yang harus diperhatikan oleh teorinya. Wacana publik merupakan faktor pertama yang harus dipertimbangkan. Selain itu, peran suara dan ucapan sebagai sarana interaksi publik merupakan bagian penting dari demokrasi. Urbinati berargumen bahwa representasi demokratis mengandung unsur ‘pembelaan’ dan keterwakilan. Dalam demokrasi perwakilan, perwakilan adalah pembela sejauh ia memiliki hubungan ganda dengan para pemilihnya. Di satu sisi, perwakilan berinteraksi dengan pemilih untuk memperhatikan kebutuhan dan kepentingan pemilih, terutama hak-hak politik yang hendak diperjuangkannya. Di sisi lain, perwakilan memiliki otonomi untuk ‘mengarahkan keyakinan partisan lewat jalan musyawarah dan keberanian untuk memutuskan.’³⁹

Urbinati kemudian menegaskan bahwa palingan representasi yang ‘demokratis’ tidak harus melupakan pentingnya pemilihan, prosedur, dan aturan dalam demokrasi perwakilan. Hal ini ditegaskan dalam bukunya berjudul *Democracy Disfigured* (2014), melalui konsep kehendak yang merupakan kerangka hukum dan kelembagaan demokrasi perwakilan.

³⁸ Alessandro Mulieri, “Exploring the Semantics of Constructivist Representation,” in *The Constructivist Turn in Political Representation*, ed. Lisa Disch (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2019), 214.

³⁹ Urbinati, *Representative Democracy: Principles and Genealogy*, 47.

Dalam demokrasi perwakilan, logika representasi selalu mengandung dua makna representasi yang berbeda. *Pertama*, ia selalu harus memolitisasi representasi simbolik, gagasan-gagasan berbeda dari rakyat yang muncul dari politik elektif tetapi juga dari bentuk-bentuk politik ekstra-parlementer dan ekstra-institusional. Ketika Urbinati berbicara tentang representasi politik, dia menyarankan bahwa tidak ada politik perwakilan dalam demokrasi jika kita tidak memolitisasi representasi simbolik. *Kedua*, Urbinati secara gamblang menekankan perlunya politisasi makna representasi sebagai mandat.⁴⁰ Namun jenis politisasi representasi sebagai mandat yang tampaknya dia anjurkan sama sekali berbeda dengan yang kita temukan dalam pandangan voluntaristik.

Ketika melihat ciri krusial konstruktivisme moderat melalui lensa hubungan antara makna representasi dan politisasinya, penulis melihat bahwa dalam konstruktivisme moderat versi Urbinati, dua makna representasi sebagai mandat dan representasi simbolik perlu hidup bersama secara normatif sambil tetap dibedakan secara analitis. Satu-satunya makna representasi yang tertinggal dari gambaran representasi politik adalah representasi mimetis. Ini tentu saja memberi tahu kita sesuatu tentang gagasan legitimasi demokrasi yang terkait dengan bentuk konstruktivisme Urbinati yang moderat. Jika kita bertanya apa yang membuat model representasi konstruktivis moderat Urbinati sah secara demokratis, kita harus mempertimbangkan dua faktor yang tersirat dalam dua makna utama yang membuat representasi politis dalam model seperti itu: mandat dan representasi simbolik. Dalam teori Urbinati, ketika seseorang mengaku mewakili rakyat, itu karena (1) mereka didelegasikan wewenang dalam kerangka hukum dan kelembagaan tertentu dan (2) mereka ‘membela’ orang lain bukan karena kemiripan dengan yang diwakili tetapi karena mereka mampu menanggung hubungan simbolik dengan yang diwakili (keterwakilan).

Apa yang dipahami Urbinati terkait representasi moderat berbeda dengan pemahaman Ankersmit. Mengikuti intuisi Pitkin terkait arti representasi sebagai cara untuk menghadirkan kembali, Ankersmit menggunakan contoh hubungan antara objek dan representasi artistik untuk menjelaskan sifat representasi politik. Ketika seorang seniman merepresentasikan objek, bentuk representasi tidak semuanya identik dengan realitas yang direpresentasikan. Dengan kata lain, representasi artistik, ketika digunakan untuk merepresentasikan sesuatu secara akurat, tidak pernah bisa menjadi bentuk representasi mimetis yang utuh. Jika ya, itu tidak akan menjadi representasi tetapi identifikasi. Bagi Ankersmit, logika yang sama berlaku

⁴⁰ Mulieri, “Exploring the Semantics of Constructivist Representation.”, 215

untuk konsep representasi. Dia menjelaskan bahwa ‘representasi menemukan tujuan dan maknanya dalam karakter “realitas” yang tidak dapat ditentukan dan ditafsirkan.’⁴¹

Argumen serupa berlaku terhadap konsep representasi politik. Tidak ada realitas politik tanpa perwakilan politik. Seperti yang dikatakan Ankersmit, ‘realitas politik tidak pertama kali diberikan kepada kita dan kemudian direpresentasikan; realitas politik hanya muncul setelah dan karena representasi’. Terkait hal ini ia berkata:

Tidak ada identitas perwakilan dan yang diwakili dalam representasi politik. Oleh karena itu, tidak ada identitas baik dari kemauan politik perwakilan maupun dari yang diwakili; namun yang pertama mengikat terhadap yang terakhir. Oleh karena itu, realitas politik yang diciptakan oleh representasi estetis pada dasarnya merupakan kekuatan politik. Perbedaan atau kesenjangan estetis antara yang terwakili dan perwakilannya adalah asal dari kekuatan politik dan oleh karena itu kita dibenarkan untuk menetapkan kekuatan politik yang bersifat estetis daripada etis.⁴²

Dalam pandangan Ankersmit, kesenjangan antara kehendak perwakilan dan yang diwakili pada akhirnya menciptakan ruang normatif kekuasaan politik. Dalam *Political Representation* (2002), ia berpendapat bahwa perwakilan politik adalah kategori estetis, yang memungkinkan kita memahami realitas politik karena dalam demokrasi perwakilan ‘semua kekuatan yang sah pada dasarnya adalah estetis.’⁴³ Karakter estetis kekuasaan dalam demokrasi berasal dari kesenjangan permanen yang tercipta antara preferensi pemilih yang selalu berubah dan pendapat perwakilan.⁴⁴ Kesenjangan permanen menghasilkan upaya produktif dan konstitutif dalam struktur perwakilan untuk mengisi kesenjangan yang tidak pernah berakhir. Konsekuensinya, tidak ada ‘rakyat’ dan tidak ada ‘perwakilan’ sebelum tindakan perwakilan. Yang pertama dibentuk melalui yang kedua sebagai tindakan konstitutif, dan isinya selalu bersifat sementara. Ankersmit mengklaim bahwa representasi adalah proses estetis tanpa akhir yang penting bagi demokrasi.

Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa politik demokrasi tidak mungkin tanpa perwakilan. Pengertian representasi juga mengubah pemahaman kita tentang pengertian wakil dan yang diwakili. Jika berasumsi bahwa yang terwakili adalah realitas politik yang seharusnya dihasilkan oleh representasi, maka kita membutuhkan representasi politik untuk memahami yang terwakili seperti itu. Dalam kata-kata Ankersmit, ‘tanpa yang diwakili tidak ada perwakilan dan tanpa perwakilan politik tidak ada bangsa sebagai entitas politik yang

⁴¹ Frank R Ankersmit, *Aesthetic Politics: Political Philosophy Beyond Fact and Value* (Stanford, California: Stanford University Press, 1997), 47.

⁴² Frank R Ankersmit, *Aesthetic Politics: Political Philosophy*, 47.

⁴³ Frank R Ankersmit, *Political Representation* (Stanford, California: Stanford University Press, 2002), 215.

⁴⁴ Frank R Ankersmit, *Political Representation*, 207.

sesungguhnya'. Untuk menyatakan hal ini, ia berargumen bahwa representasi politik bertepatan dengan representasi simbolik. Sofia Näsström secara efektif mencirikan posisi pemikiran Ankersmit dengan berkata, 'demokrasi perwakilan adalah 'tautologi' di mana representasi membentuk esensi demokrasi'.⁴⁵

1.1.3. Letak Pemikiran Politik Urbinati dalam Teori Demokrasi dan Populisme

Sebelum menempatkan letak pemikiran politik Urbinati dalam teori demokrasi dan populisme, penulis menguraikan refleksi para pemikir politik setelah mengamati gelombang populisme dan krisis representasi yang menerjang rumah demokrasi di negara-negara demokrasi di seluruh dunia. Refleksi para pemikir politik tentang populisme sangat beragam. Sebagian peneliti melihat populisme sebagai ancaman terbesar bagi demokrasi yang dibangun di atas fondasi pluralisme dan rasionalitas. Sedangkan peneliti lainnya melihat populisme sebagai tanggapan terhadap kaum elite yang mengabaikan kehendak mayoritas dalam proses demokratisasi.⁴⁶ Beragam reaksi terhadap munculnya fenomena populisme ini justru menjadi magnet tersendiri bagi para ilmuwan untuk melakukan penelitian. Ketika berusaha mengadakan penelitian terhadap fenomena munculnya gelombang populisme yang memporandakan rumah demokrasi dalam pemerintahan demokratis tersebut, para peneliti seolah diantar masuk ke lautan lepas. Setiap peneliti berusaha membahas populisme dari sudut pandang atau titik tertentu. Secara umum penelitian tentang populisme terfokus pada beberapa titik persoalan seperti pengertian populisme, sebab-sebab munculnya gerakan populisme, peran pemimpin karismatik dalam gerakan populisme, representasi politik, hubungan populisme dengan demokrasi, dan sebagainya.

Salah satu persoalan yang terus membara ketika mengadakan diskursus tentang populisme adalah keterhubungannya dengan demokrasi. Pertanyaan yang sering diajukan adalah apakah populisme itu kawan demokrasi, musuh demokrasi atau patologi demokrasi? Meskipun secara semantik idiom populis banyak menggunakan jargon demokrasi seperti rakyat, kedaulatan rakyat, kehendak rakyat, demokrasi langsung, partisipasi politik dan sebagainya, kebanyakan pemikir melihat populisme bukan sebagai kawan demokrasi tetapi dilihat sebagai ancaman yang mengganggu proses demokratisasi dalam pemerintahan demokratis. Karena itu populisme disebut sebagai patologi demokrasi bahkan dianggap sebagai musuh demokrasi.

⁴⁵ Sofia Näsström, "Representative Democracy as Tautology: Ankersmit and Lefort on Representation," *European Journal of Political Theory* 5, no. 3 (2006): 321–342.

⁴⁶ Carlos de la Torre, "Global Populism: Histories, Trajectories, Problems, and Challenges," in *Routledge Handbook of Global Populism*, ed. Carlos De La Torre (New York: Routledge, 2019), 1–27.

Namun ada juga pemikir yang melihatnya sebagai kawan demokrasi karena ikut meremajakan atau merevitalisasi demokrasi. Kaltwasser melihat hal ini karena adanya perbedaan pendekatan dalam memahami hubungan populisme dengan demokrasi. Ia memperkenalkan tiga pendekatan dalam melihat hubungan populisme dengan demokrasi: pendekatan liberal, pendekatan radikal, dan pendekatan minimalis.⁴⁷

Pendekatan liberal melihat populisme sebagai patologi demokrasi, bahkan disebut sebagai racun demokrasi karena berjuang membangun model politik tanpa lembaga perwakilan.⁴⁸ Pada tahun 2010 misalnya, Presiden Uni Eropa Herman Van Rompuy mendeklarasikan populisme sebagai bahaya terbesar bagi Eropa karena dianggap sebagai ‘virus’ yang menginfeksi dan menyebarkan efek epidemi bagi sistem partai di seluruh Eropa.⁴⁹ Pendekatan radikal sebaliknya, melihat populisme sebagai bagian esensial dari demokrasi sehingga dianggap sebagai bentuk demokrasi yang paling murni.⁵⁰ Dari perspektif ini, pertanyaannya bukan apa ancaman populisme terhadap demokrasi, melainkan sejauh mana demokrasi itu populis. Dalam konteks ini, populisme merupakan bagian intrinsik dari demokrasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanpa populisme tidak ada politik.⁵¹

Akhirnya pendekatan minimalis melihat gerakan populisme bersifat ambivalen terhadap demokrasi. Untuk menunjukkan ambivalensi hubungan populisme dengan demokrasi, Kaltwasser mengacu pada teori poliarki Dahl yang mengeksplorasi hubungan populisme dengan demokrasi terkait definisi rakyat dan batas-batas pemerintahan sendiri.⁵² Kaltwasser berargumen bahwa kaum populis mempersoalkan makna dua konsep utama demokrasi tersebut berdasarkan konteks politik yang berciri kontingen. Berdasarkan ciri kontigensi politik, ia melihat bahwa populisme “dapat menjadi koreksi sekaligus ancaman bagi demokrasi” bergantung pada dua faktor kontekstual utama yaitu tingkat konsolidasi demokrasi dan apakah aktor populis berada sebagai oposisi atau sebagai bagian dari pemerintahan.⁵³

Tiga pendekatan dalam melihat hubungan antara populisme dan demokrasi yang diuraikan di atas, menurut penulis saling berbagi terkait sumber legitimasi kekuasaan politik, yaitu rakyat

⁴⁷ Cristóbal Rovira Kaltwasser, “The Ambivalence of Populism: Threat and Corrective for Democracy,” *Democratization* 19, no. 2 (2012): 184–208.

⁴⁸ Pierre Rosanvallon, *Counter-Democracy: Politics in a Age of Distrust* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 266.

⁴⁹ Stefano Bartolini, “Political Parties, Ideology and Populism, in the Post-Crisis Europe,” no. July (2011): 1–15.

⁵⁰ Tansjo Torbjorn, *Populist Democracy: A Defence* (London, England: Routledge, 1992), 24.

⁵¹ Ernesto Laclau, *On Populist Reason* (London, England: Verso, 2005), 154.

⁵² Robert Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition* (New Haven, CT: Yale University Press, 1971).

⁵³ Kaltwasser, “The Ambivalence of Populism: Threat and Corrective for Democracy.”, 190

(*the people, demos, populus*). Populisme dan demokrasi sama-sama berpusat pada terminologi rakyat. Populisme memakai kata Latin yaitu *populus*, sedangkan demokrasi memakai bahasa Yunani, *demos*. Begitu pula populisme saling berbagi dengan demokrasi tentang *locus* kekuasaan memerintah yaitu kedaulatan rakyat. Namun keduanya memiliki perbedaan dalam memahami apa itu rakyat, dan kedaulatan rakyat. Perbedaan ini membawa konsekuensi dalam mendefinisikan apa itu populisme. Dalam literatur kontemporer, Benjamin Moffitt menampilkan lima pendekatan utama dalam mendefinisikan apa itu populisme: populisme sebagai ideologi, strategi politik, diskursus, logika politik, dan gaya politik.⁵⁴

Pendekatan pertama, populisme sebagai ideologi. Bagi peneliti yang mengikuti pendekatan ini, populisme dipahami sebagai ideologi “tipis atau cair” (*thin-centered ideology*) yang mempertimbangkan masyarakat terpolarisasi dalam dua kelompok yang homogen dan antagonistik, yakni “orang-orang yang bersih/baik” (*the pure people*) dipertentangkan dengan “elite yang korup” (*the corrupt elite*) dan yang percaya bahwa politik seharusnya merupakan ungkapan kehendak umum (*volonté générale*) rakyat.⁵⁵ Dalam pandangan Mudde, kekuatan definisi populisme sebagai ideologi tipis terletak pada kontribusinya dalam penelitian empiris komparatif sehingga mengatasi bias regional dan beban normatif yang terkandung dalam konsep populisme. Dengan mengonsepsikan populisme sebagai ideologi tipis atau cair, populisme selalu hadir dan menempel dengan ideologi-ideologi lainnya seperti liberalisme, kapitalisme, sosialisme, nasionalisme, komunitarianisme, dan sebagainya. Selain Mudde, beberapa peneliti yang mengikuti pendekatan populisme sebagai ideologi adalah Abts dan Rummens (2007), Fieschi (2004b), Stanley (2008), Rovira Kaltwasser (2012, 2013), Akkerman (2012), Maret (2007), Rooduijn dan Pauwels (2010), U e (2010), dan Margareth Canovan (2002).⁵⁶ Terlepas dari kontribusinya dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, pendekatan populisme sebagai ideologi tipis dalam pembacaan Moffitt memiliki beberapa kelemahan. *Pertama*, dalam literatur populisme istilah ideologi relatif tidak bermasalah sehingga sering kali disamakan dengan pendekatan diskursif. Konsekuensinya pemahaman terhadap konsep populisme menjadi ambigu dan kabur. *Kedua*, pemahaman populisme sebagai ‘ideologi tipis’ dapat menjadi sangat tipis sehingga kehilangan validitasnya terutama berkaitan dengan kegunaan konseptual. Untuk mengukuhkan argumennya, Moffitt merujuk pada gagasan

⁵⁴ Benjamin Moffitt, *The Global Rise of Populism: Performance, Political Style, and Representation* (Stanford, California: Stanford University Press, 2016), 24-31.

⁵⁵ Cas Mudde, *Populist Radical Right Parties in Europe* (New York: Cambridge University Press, 2007), 23.

⁵⁶ Moffitt, *The Global Rise of Populism: Performance, Political Style, and Representation*, 25.

Freeden yang menegaskan bahwa ideologi tipis seperti ekologi atau feminisme, meskipun dimulai dari konsep inti yang terbatas, namun berusaha mengumpulkan berbagai unsur yang membentuk konsep inti sehingga memperluas daya tarik dan kelangsungan hidupnya.⁵⁷

Pendekatan kedua, populisme sebagai strategi politik. Pengikut pendekatan ini mendefinisikan populisme sebagai strategi politik melalui mana seorang pemimpin personalistik mengejar atau menjalankan kekuasaan berdasarkan dukungan langsung rakyat, tanpa perantara, tanpa terlembagakan dari sejumlah besar pengikut yang kebanyakan tidak terorganisir.⁵⁸ Populisme sebagai strategi politik banyak dijadikan model dalam penelitian empiris, terutama dalam literatur populisme Amerika Latin (Ellner 2003; Roberts 2003, 2006). Selain itu, ada pemikir lain dari pendekatan strategi politik yang berfokus pada aspek organisasi dengan meneliti hubungan plebisiter (massa) dalam gerakan populis⁵⁹ atau model kampanye dalam pemilihan umum.⁶⁰

Dalam pendekatan strategi politik, populisme tidak ditentukan oleh aktor politik atau oleh cara mereka berkomunikasi tetapi berdasarkan hubungan langsung pemimpin populis dengan pengikut mereka. Dalam konteks ini, peneliti yang mengikuti pendekatan strategi menyoroti peran penting pemimpin dalam gerakan populisme. Namun ada beberapa kritik terhadap pendekatan strategi politik. *Pertama*, bagaimana mengidentifikasi strategi atau model organisasi ‘langsung’ yang muncul dalam seluruh spektrum politik. Kritik ini berkaitan dengan beragamnya manifestasi gerakan yang mengatasnamakan populis tetapi bukan gerakan populis seperti gerakan keagamaan atau milenarian atau bentuk-bentuk gerakan politik komunitas lainnya.⁶¹ *Kedua*, berkaitan dengan pengandaian bahwa populisme tumbuh subur hanya dalam institusi atau organisasi yang mengalami krisis ternyata tidak valid. Moffitt mencatat, *Front National Le Pen* di Prancis atau *Partij voor de Vrijheid Wilders* di Belanda misalnya membuktikan bahwa populisme juga muncul dalam situasi di mana institusi dan organisasi partai terorganisir dengan baik dan ketat. Hal yang sama terjadi dalam konteks Amerika Latin, di mana ada sejumlah jenis hubungan organisasi yang digunakan oleh kaum populis sehingga memunculkan empat subtype populisme: organik, buruh,

⁵⁷ Michael Freedon, *Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach* (Oxford: Oxford University Press, 1996), 486.

⁵⁸ Kurt Weyland, “Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics,” *Comparative Politics* 34, no. 1 (2001): 1–22.

⁵⁹ Robert R Baar, “Populists, Outsiders and Anti-Establishment Politics,” *Party Politics* 15, no. 1 (2009): 29–48.

⁶⁰ Michael L. Conniff, “Introduction,” in *Populism in Latin America*, ed. Michael Conniff (Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1999), 1–21.

⁶¹ Kirk Hawkins A, *Venezuela’s Chavismo and Populism in Comparative Perspective* (New York: Cambridge University Press, 2010), 39.

partisan, dan elektoral.⁶² Selain itu, literatur klasik tentang populisme Amerika Latin yang menganalisis aliansi gerakan perkotaan multikelas di bawah para pemimpin karismatik tidak cocok untuk diterapkan dalam konteks regional lainnya, seperti yang dilakukan Phongpaichit dan Baker dalam menganalisis gerakan populisme di Asia Tenggara.⁶³ *Ketiga*, populisme sebagai strategi lebih menekankan aspek material politik, yaitu koalisi, prakondisi historis, dan kebijakan populis sehingga mengabaikan aspek formal politik seperti ide atau gaya yang terkandung dalam gerakan politik populis.⁶⁴ *Keempat*, pendekatan strategi politik mengabaikan akar populisme yang berasal dari bahasa Latin, *populus*. Padahal rakyat harus menjadi rujukan utama dalam populisme sebagaimana ditegaskan Knight “etimologinya jelas, aktual, dan menarik bagi kita untuk menanggapi dengan serius”.⁶⁵

Pendekatan ketiga, populisme sebagai diskursus. Dalam literatur populisme di Eropa dan Amerika Latin pendekatan ketiga ini banyak digunakan dalam memahami populisme sebagai diskursus yang mengadu domba ‘rakyat’ dengan ‘elite’ atau dengan ‘oligarki’.⁶⁶ Berdasarkan pendekatan ini, populisme dipandang sebagai cara mengekspresikan politik dalam bentuk diskursus atau teks. Berbeda dengan pendekatan ideologi dan strategi yang memahami populisme sebagai kategori ‘salah satu atau’, pendekatan diskursus memahami populisme sebagai contoh spesifik ekspresi politik.⁶⁷ Dalam pendekatan diskursif, seorang aktor politik dapat ‘kurang lebih’ populis pada waktu yang berbeda tergantung pada bagaimana dan kapan menggunakan wacana populis, sedangkan dalam pendekatan ideologis atau strategis, seseorang itu populis atau tidak populis. Dalam karyanya tentang populisme sebagai diskursus, Hawkins lebih jauh menjelaskan perbedaan pendekatan ini dengan pendekatan lainnya lewat pernyataan bahwa sebuah diskursus “tidak memiliki teks dan kosa kata resmi yang menyertai sebuah ideologi, dan harus dilihat melalui pendekatan diskursus yang lebih menekankan unsur-unsur linguistik seperti nada, metafora, dan sebagainya. Jadi, sementara pendekatan ideologi memiliki program normatif dalam mewujudkan tindakan politik, pendekatan diskursif sebaliknya tidak memiliki aspek normatif. Untuk menguatkan argumennya, Hawkins menampilkan figur populis Hugo Chávez yang menggunakan

⁶² Moffitt, *The Global Rise of Populism: Performance, Political Style, and Representation*, 27.

⁶³ Chris Baker Phongpaichit, Pasuk, “Thaksin’s Populism,” in *Populism in Asia*, ed. Kosuke Mizuno and Pasuk Phongpaichit (Singapore: NUS Press, 2009), 66–93.

⁶⁴ Kirk Hawkins A, *Venezuela’s Chavismo and Populism in Comparative Perspective* (New York: Cambridge University Press, 2010), 39.

⁶⁵ Alan Knight, “Populism and Neo-Populism in Latin America, Especially Mexico,” *Journal of Latin American Studies* 30, no. 2 (1998): 223–248.

⁶⁶ Carlos de la Torre, *Populist Seduction in Latin America*, 2nd ed. (Athens: Ohio University Press., 2010).

⁶⁷ Noam Gidron and Bart Bonikowski, “Varieties of Populism: Literature Review and Research Agenda,” *SSRN Electronic Journal*, no. 13 (2014): 01–38.

diskursus populis, namun ideologinya bukan populisme, tetapi sosialisme.⁶⁸ Untuk membedakan di mana dan kapan diskursus populis digunakan, penulis seperti Koopmans dan Muis telah menggunakan analisis konten klasik dengan mengembangkan skema pengodean kualitatif yang berusaha mengukur ‘tingkat’ populisme dalam serangkaian teks diskursif tertentu.⁶⁹ Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa aktor yang umumnya diterima sebagai populis mungkin sama sekali tidak menggunakan diskursus populis, sementara aktor yang biasanya tidak termasuk sebagai aktor populis telah terbukti cukup sering memanfaatkan diskursus populis. Namun seperti yang diakui Pauwels, validitas analisis konten klasik seperti ini dipertanyakan misalnya berkaitan dengan pengambilan sampel yang tidak teratur, atau kemungkinan bias dalam pengodean. Selain itu, berkaitan dengan kesepakatan tentang sumber apa yang harus diukur: apakah dari pidato, manifesto partai atau konferensi pers partai.⁷⁰

Selain itu, Armony dan Armony telah menggunakan analisis konten kuantitatif berbasis komputer untuk mengukur diskursus populis,⁷¹ tetapi metode ini dalam pandangan Moffitt memiliki masalah dalam memetakan persentase seberapa sering kata kunci tertentu muncul dalam sebuah diskursus. Seperti yang dikatakan Hawkins: “[Kami] tidak dapat mengukur seperangkat makna laten yang luas dalam sebuah teks atau sebuah diskursus hanya dengan menghitung kata. Ide-ide yang membentuk pandangan dunia yang mendasari dipegang secara tidak sadar dan disampaikan sebanyak nada dan gaya bahasa seperti kata-kata yang sebenarnya”.⁷² Jadi, meskipun pendekatan diskursus merupakan metode yang menjanjikan untuk mengukur populisme, pendekatan ini tidak menampilkan aspek konseptual yang menyeluruh dalam memahami gerakan populisme.

Pendekatan keempat, populisme sebagai logika politik. Pelopor pendekatan ini adalah Ernest Laclau. Bagi Laclau populisme merupakan logika politik.⁷³ Rakyat dalam rumusan Laclau menjadi kemungkinan dari setiap proyek politik dan merupakan subjek politik itu sendiri. Jika ‘rakyat’ adalah subjek politik, maka populisme adalah logika politik. Sebagai logika politik, ‘rakyat’ tidak punya keberadaan apa pun sebelum munculnya gerakan populis. Yang

⁶⁸ Hawkins A, *Venezuela's Chavismo and Populism in Comparative Perspective*, 30-31.

⁶⁹ Jasper Muis. Koopmans, Ruud, “The Rise of Right-Wing Populist Pim Fortuyn in the Netherlands: A Discursive Opportunity Approach,” *European Journal of Political Research* 48, no. 5 (2009): 642–664.

⁷⁰ Teun. Pauwels, “Measuring Populism: A Quantitative Text Analysis of Party Literature in Belgium,” *Journal of Elections, Public Opinion and Parties* 21, no. 1 (2011): 97–119.

⁷¹ Ariel C. Armony ;Victor Armony, “Indictments, Myths, and Citizen Mobilization in Argentina: A Discourse Analysis,” *Latin American Politics and Society* 47, no. 4 (2005): 27–54.

⁷² Hawkins A, *Venezuela's Chavismo and Populism in Comparative Perspective*, 71.

⁷³ Ernesto Laclau, *On Populist Reason* (London, England: Verso, 2005), 117.

ada hanya simpang-siur aneka kepentingan, terserak, dan tak bernama. Dalam konteks ini, wacana dan retorika populis merupakan konstruksi apa yang disebut ‘rakyat’ dan gerakan populis. Maka, wacana populis bekerja sebagai “penanda kosong” (*empty signifier*), seperti bejana konseptual yang bisa diisi apa saja.⁷⁴ Sebagai bejana kosong, ‘rakyat’ dalam wacana populis memperoleh arti lewat proses negasi dan afirmasi. Melalui negasi, populisme muncul melalui oposisi dengan kaum elite. Simpang-siur kepentingan sebelumnya yang tak bernama itu membentuk realitas “rakyat” melalui logika antagonisme. Namun, dengan itu juga berlangsung proses afirmasi di mana keragaman yang terserak dan simpang-siur membentuk identitas ekuivalensi dan kesamaan. Dalam konteks ini, Laclau melakukan pembentukan subyek politik.

Terlepas dari kekuatan argumentasi yang diungkapkan Laclau, Moffitt melihat bahwa ada tiga masalah yang muncul dalam pendekatan populisme sebagai logika politik.⁷⁵ *Pertama*, selip konsep. Sementara Laclau pernah berpendapat bahwa nama permainan yang terjadi dalam bidang politik adalah hegemoni, ia kemudian berpendapat bahwa “populisme adalah jalan untuk memahami unsur konstitutif ontologi politik”.⁷⁶ Gagasan ini menghasilkan penggabungan konsep kunci Laclau. Karena itu, ketika para kritikus Laclau seperti Žižek, Howarth, dan Stavrakakis mengajukan kritik serupa, ada alasan untuk khawatir terkait selip konsep yang dimainkan dalam klaim seseorang. *Kedua*, berkaitan dengan tesis Laclau tentang universalitas logika populis. Sejumlah gerakan politik dalam lanskap politik kontemporer, seperti *Zapatista*, gerakan *Occupy* dan *Indignados* secara sadar berusaha menjauhkan diri dari mode wacana populis, organisasi, dan representasi dengan menolak mengartikulasikan tuntutan mereka melalui pemimpin, atau tidak mengartikulasikan tuntutan konkret sama sekali. Oleh karena itu, mereka berusaha mengingkari ‘logika populis’ yang dilihat Laclau sebagai universal. Jelas ada cara-cara berpolitik yang berada di luar model populis, sehingga menantang tesis Laclau bahwa semua politik adalah populisme. *Ketiga*, dari sudut pandang metodologis, konsep Laclau tentang populisme terlalu luas untuk diterapkan sebagai sebuah teori politik. Masalahnya adalah bahwa contoh empiris yang dipilih semuanya sesuai dengan konten ‘ontik’ diduga bermasalah yang sebenarnya coba dibuang Laclau dalam teorinya. Jika kita ingin menganggap serius teori populisme Laclau, teori itu harus dapat diterapkan secara universal pada semua studi kasus politik. Akan tetapi, orang dapat melihat bagaimana tingkat keuniversalan ini mulai mengarah pada ketidakjelasan dalam pemilihan kasus-kasus konkret

⁷⁴ Ernesto Laclau, *On Populist Reason*, 71.

⁷⁵ Moffitt, *The Global Rise of Populism: Performance, Political Style, and Representation*, 30-31.

⁷⁶ Laclau, *On Populist Reason*, 67.

untuk analisis empiris jika diikuti dengan kesimpulan logis. Karena itu, menurut Moffitt populisme sebaiknya perlu dipahami sebagai gaya politik.

Pendekatan kelima, populisme sebagai gaya politik. Bagi pengikut pendekatan ini, populisme didefinisikan sebagai gaya longgar ‘yang secara khas melibatkan hubungan yang diproklamasikan “rakyat” dengan memakai gaya berpikir “mereka dan kita” yang muncul pada saat krisis lewat mobilisasi massa’.⁷⁷ Pierre-André Taguieff (1995), Michael Kazin (1998), Margaret Canovan (1999), Carlos de la Torre (2010), dan Dani Filc (2011) juga memahami populisme sebagai sebuah gaya politik dengan berfokus pada gaya retorik kaum populis yang tidak hanya berkomunikasi secara sederhana dan langsung, tetapi juga untuk menawarkan solusi yang langsung dan sederhana. Jagers dan Walgrave melangkah lebih jauh dengan memahami populisme sebagai ‘gaya komunikasi politik para aktor politik yang mengacu pada rakyat’.⁷⁸ Namun, tak satu pun dari para peneliti ini yang berusaha menyempurnakan pendekatan ‘gaya politik’ sehingga dapat digunakan untuk menganalisis politik komparatif. Dalam memahami populisme sebagai gaya politik, Moffitt menekankan elemen performatif dan relasional dari gaya politik. Elemen performatif dan relasional dari populisme sebagai gaya politik dibedakan atas dasar induktif dengan melakukan tinjauan literatur populisme kontemporer dan dengan mengidentifikasi kasus-kasus pemimpin populis yang tidak kontroversial. Hal ini termasuk politisi dari seluruh dunia, mulai dari Amerika Latin (Alberto Fujimori, Hugo Chávez, Evo Morales, dan Rafael Correa), Eropa (Jean-Marie Le Pen, Jörg Haider, Umberto Bossi, Viktor Orbán, dan Pim Fortuyn), Utara Amerika (Sarah Palin, Ross Perot, dan Preston Manning), dan kawasan Asia-Pasifik (Thaksin Shinawatra, Pauline Hanson, dan Winston Peters). Moffitt kemudian menganalisis rangkaian kasus dari pemimpin populis untuk menentukan gaya politik apa yang menghubungkan mereka dalam membangun gaya politik performatif. ‘Bagaimana’ para pemimpin ini disebut ‘populis’? Bagaimana mereka menjadi ‘populis’? Moffitt berfokus pada gaya politik karena menemukan bahwa ada perbedaan antara pendekatan ideologis, diskursus, logika politik, dan strategi dari para pemimpin populis.

Moffitt lebih lanjut menampilkan beberapa unsur yang terkandung dalam pendekatan populisme sebagai gaya politik.⁷⁹ Unsur pertama, seruan kepada rakyat. Kebangkitan ‘rakyat’ merupakan elemen sentral yang membedakan populisme dari gaya politik lainnya. ‘Rakyat’

⁷⁷ Alan. Knight, “Populism and Neo-Populism in Latin America, Especially Mexico,” *Journal of Latin American Studies* 30, no. 2 (1998): 223–248.

⁷⁸ Jan and Walgrave Stefaan Jager, “Populism as Political Communication Style: An Empirical Study of Political Parties’ Discourse in Belgium,” *European Journal of Political Research* 46, no. 3 (2007): 319–345.

⁷⁹ Moffitt, *The Global Rise of Populism: Performance, Political Style, and Representation*, 33-53.

merupakan audiens sentral kaum populis, sekaligus subjek yang dikonstruksi oleh kaum populis melalui kinerja mereka.⁸⁰ Selanjutnya, ‘rakyat’ merupakan pemegang kedaulatan yang sebenarnya. Terkait dengan seruan kepada ‘rakyat’ ada pembagian dikotomis masyarakat antara ‘rakyat’ dan yang lain. Berbeda dengan gagasan Mudde yang memisahkan antara ‘rakyat murni’ dan ‘elite korup’,⁸¹ Moffitt tidak percaya bahwa kaum populis harus berpikir bahwa elite itu korup atau rakyat selalu menentang elite. Yang diperhatikan Moffitt adalah rakyat memang berbeda dengan elite. ‘Elite’, ‘kemapanan’, ‘negara’ atau ‘sistem’ menurut Moffitt biasanya digunakan dalam wacana populis sebagai sumber krisis, kehancuran, atau korupsi sebagai lawan dari ‘rakyat’ yang ‘dikecewakan’, ‘ditipu’, tidak berdaya atau tidak diperhatikan dengan baik. Gaya politik seperti ini sengaja digunakan oleh kaum populis untuk mencari dukungan termasuk klaim bahwa mereka benar-benar tahu apa yang dipikirkan rakyat. Lebih jauh kaum populis menolak pengetahuan ahli (teknokrasi) dengan memperjuangkan ‘politik akal sehat’ melawan birokrat, teknokrat, dan perwakilan. Gaya ini menurut Moffitt terlihat dalam bahasa Partai Reformasi Preston Manning yang piagamnya tertulis ‘kami percaya pada akal sehat rakyat jelata’ (Partai Reformasi Kanada, 1993). Akal sehat rakyat merupakan fenomena yang disebut Paul Saurette dan Shane Gunster sebagai ‘populisme epistemologis’.⁸² Unsur kedua, kelakuan buruk. Fungsi seruan kepada ‘rakyat’ sebagai penengah akal sehat yang dihadirkan aktor populis adalah retorika politik yang kasar. Canovan mengidentifikasi fenomena ini sebagai ‘gaya tabloid’ populisme,⁸³ sementara Ostiguy mengidentifikasinya sebagai ‘rendah’ dari sumbu tinggi-rendah yang berjalan ortogonal pada sumbu kiri-kanan tradisional.⁸⁴ Unsur-unsur ‘rendah’ ini terwujud dalam penggunaan bahasa gaul, sumpah serapah, ketidaktepatan politik, dan terlalu demonstratif. Unsur-unsur ini dalam pandangan Moffitt bertentangan dengan ‘tindakan politik beradab’ yang mengandalkan rasionalitas, ketenangan, dan penggunaan bahasa teknokratis. Unsur ketiga, krisis, kerusakan dan ancaman. Populisme mendapat dorongan dari persepsi krisis, kehancuran atau ancaman melalui dramatisasi kinerja perwakilan.⁸⁵ Situasi ini pada gilirannya menyebabkan tuntutan untuk bertindak tegas dan segera. Krisis sering

⁸⁰ Benjamín Arditi, *Politics on the Edges of Liberalism: Difference, Populism, Revolution, Agitation* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007).

⁸¹ Mudde, *Populist Radical Right Parties in Europe*, 23.

⁸² Gunster Saurette, Paul, and Shane, “Ears Wide Shut: Epistemological Populism, Argutainment and Canadian Conservative Talk Radio,” *Canadian Journal of Political Science* 44, no. 1 (2011): 195–218.

⁸³ Margaret Canovan, “Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy,” *Political Studies* 47 (1999): 2–16.

⁸⁴ Pierre Ostiguy, “The High-Low Political Divide: Rethinking Populism and Anti-Populism,” in *Political Concepts: Committee on Concepts and Methods Working Paper Series 35*, 2009.

⁸⁵ Paul Taggart, *Populism. Concepts in the Social Science.*, 2000.

dikaitkan dengan konflik antara warga negara dan perwakilan mereka, tetapi juga dapat dikaitkan dengan persoalan migrasi, kesulitan ekonomi, diperlakukan tidak adil, ancaman militer, perubahan sosial, atau masalah lainnya. Dalam konteks ini, munculnya status darurat berpengaruh secara signifikan pada upaya menyederhanakan istilah dan medan perdebatan politik. Sebagai contoh, Hugo Chávez meningkatkan gaya populisnya akibat krisis yang dirasakan terkait konspirasi imperialis yang dilakukan Amerika Serikat, sementara Geert Wilders membaca fenomena berkembangnya Islamisasi Belanda sebagai ancaman terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi warga setempat. Kinerja, krisis, kehancuran, atau ancaman ini berkaitan dengan ketidakpercayaan terhadap roda pemerintahan modern yang kompleks dan rumit dalam merumuskan kebijakan yang sering kali memerlukan konsultasi, tinjauan, laporan, desain, dan implementasi yang berbelit-belit. Sebaliknya, kaum populis lebih menyukai tindakan jangka pendek dan cepat daripada ‘politik lambat’ seperti negosiasi, dan musyawarah.⁸⁶ Politik dengan demikian menjadi sangat instrumental, dan utilitarian. Berdasarkan unsur-unsur yang diuraikan di atas, populisme dapat didefinisikan sebagai gaya politik yang menonjolkan daya tarik ‘rakyat’ melawan ‘elite’, ‘perilaku buruk’ dan krisis kinerja, kehancuran, atau ancaman.

Dari lima pendekatan utama yang diuraikan di atas, Nadia Urbinati melihat bahwa pendekatan yang mendefinisikan populisme sebagai ideologi dan sebagai gaya politik memiliki kelemahan karena tidak memerhatikan aspek kelembagaan dan prosedural yang memenuhi syarat demokrasi di mana populisme muncul dan beroperasi. Dua pendekatan ini memang mendiagnosis munculnya polarisasi antara banyak dan sedikit dalam masyarakat tetapi tidak menjelaskan apa yang menyebabkan populisme melakukan gerakan anti kemapanan sehingga berbeda dengan gerakan politik lainnya.⁸⁷ Oleh karena itu, Urbinati lebih memahami populisme sebagai strategi politik yang dilakukan oleh pemimpin populis dalam meraih kekuasaan sehingga bisa mengubah sistem lembaga dan prosedur demokrasi di tangan pemenang atau mayoritas. Untuk itu, kaum populis memecah sistem kelembagaan demokrasi dengan memolarisasi masyarakat menjadi dua kubu antagonistik.

Model pembacaan strategis yang dilakukan Urbinati di atas, diinspirasi oleh kritik Norberto Bobbio terhadap populisme, interpretasi Margaret Canovan tentang populisme sebagai

⁸⁶ Michael Saward, “Slow Theory: Taking Time over Transnational Democratic Representation,” *Ethics and Global Politics* 4, no. 1 (2011): 1–18.

⁸⁷ Nadia Urbinati, *Me the People: How Populism Transforms Democracy* (Massachusetts: Harvard University Press, 2019), 32-33.

ideologi, dan analisis Benjamin Arditi tentang perwujudan populisme dalam ruang politik.⁸⁸ Seperti Bobbio yang membaca munculnya fenomena populisme tidak melanggar demokrasi tetapi justru menjadi pintu keluar dari demokrasi,⁸⁹ Urbinati menempatkan populisme dalam demokrasi perwakilan dan berargumen bahwa prosedur, konstitusi, dan lembaga demokrasi perwakilan ternyata hampir tidak memperkaya demokrasi.⁹⁰ Seperti Canovan yang memahami populisme sebagai bayangan demokrasi,⁹¹ Urbinati melihat populisme sebagai ideologi rakyat dengan menggunakan bahasa demokrasi, tetapi sangat kontras dengan ‘praktik demokrasi’ yang melibatkan deliberasi publik dan prosedur demokrasi.⁹² Artinya ada jarak antara apa yang ideal dengan apa yang real. Akhirnya seperti Arditi yang melihat kemunculan populisme sebagai mode representasi politik dalam demokrasi,⁹³ Urbinati membaca populisme sebagai kemungkinan permanen dalam demokrasi perwakilan.⁹⁴

Dalam pandangan Urbinati,⁹⁵ peneliti yang melihat populisme sebagai strategi politik akan berusaha menjawab pertanyaan, apa yang dilakukan populisme untuk meraih kekuasaan? Dan apa yang dilakukan populisme terhadap institusi demokrasi? Jika ditinjau dari pembacaan strategis, populisme memiliki kapasitas mengubah makna unsur-unsur dasar demokrasi konstitusional seperti rakyat, mayoritas, dan pemilihan perwakilan lewat proses representasi politik. Oleh karena itu, pendekatan ini dalam pandangan Urbinati perlu dilengkapi dengan pendekatan maksimalis yang memahami populisme sebagai logika politik karena berkaitan dengan strategi mengonstruksi subjek kolektif.⁹⁶

Berdasarkan pendekatan strategi politik, Nadia Urbinati berargumen bahwa populisme perlu didefinisikan sebagai bentuk baru dari pemerintahan perwakilan yang didasarkan pada hubungan langsung antara pemimpin dan mereka yang didefinisikan oleh pemimpin sebagai orang yang “baik” atau “benar” yang memiliki otoritas lebih atas rakyat kebanyakan. Para pemimpin populis mengklaim berbicara kepada dan untuk rakyat secara langsung tanpa perantara seperti partai politik dan media independen yang sering kali mengkhianati kepentingan rakyat. Urbinati membaca bahwa pemerintahan populis berbeda dari rezim

⁸⁸ Urbinati, *Democracy Disfigured*, 134.

⁸⁹ Norberto Bobbio, *Democracy and Dictatorship: The Nature and Limits of State Power* (Cambridge: Polity Press, 1989).

⁹⁰ Urbinati, *Democracy Disfigured*, 134.

⁹¹ Margaret Canovan, “Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy.”

⁹² Urbinati, *Democracy Disfigured*, 134.

⁹³ Benjamin Arditi, *Politics on the Edges of Liberalism: Difference, Populism, Revolution, Agitation* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007).

⁹⁴ Urbinati, *Democracy Disfigured*, 134.

⁹⁵ Urbinati, *Me the People*, 113.

⁹⁶ Urbinati, *Me the People*, 32.

diktator atau fasis, namun ketergantungan rakyat pada kehendak pemimpin dan kesediaan pemimpin populis mengeksklusi kepentingan mereka yang dianggap berada di luar batas-batas orang “baik” atau “benar”, merentangkan demokrasi konstitusional hingga batasnya sehingga membuka jalan menuju otoritarianisme.

Mengikuti gagasan Weyland yang mendefinisikan populisme “sebagai strategi politik melalui mana seorang pemimpin personalistik mengejar atau menjalankan kekuasaan berdasarkan dukungan langsung rakyat, tanpa perantara, dan tanpa terlembagakan dari sejumlah besar pengikut yang kebanyakan tidak terorganisir,⁹⁷ Urbinati menekankan peran strategis pemimpin personalistik dalam meraih dukungan rakyat sehingga memperoleh kekuasaan. Berkaitan dengan hal ini, Urbinati banyak mendapat inspirasi dari pemikir politik seperti Gaetano Mosca, Robert Michels, Vilfredo Pareto, dan C. Wright Mills yang secara khusus membahas strategi politik pemimpin populis dalam demokrasi.⁹⁸ Dengan menekankan peran strategis pemimpin populis, penulis melihat bahwa pembacaan Urbinati terhadap populisme sejatinya hendak menjawab kritik terhadap pendekatan strategi politik terutama berkaitan dengan kesulitan dalam membedakan antara gerakan populis dan non populis yang sama-sama menggunakan logika banyak dan sedikit untuk melawan kemapanan, dan kritik yang melihat bahwa pendekatan strategis mengabaikan rakyat sebagai salah satu unsur kunci dalam populisme. Terhadap kritik pertama, penulis mengikuti argumentasi Urbinati yang melihat bahwa logika sedikit dan banyak sering digunakan oleh berbagai gerakan politik sebagai bentuk ketidakpercayaan rakyat terhadap elite. Walaupun menggunakan logika gerakan yang sama tetapi sejatinya memiliki dasar ideologi yang berbeda. Karena itu, pembacaan terhadap populisme tidak hanya dilihat dari pendekatan ideologi, diskursus, atau gaya politik tetapi juga perlu dipahami sebagai strategi politik. Terhadap kritik kedua yang melihat bahwa pendekatan strategis mengabaikan rakyat sebagai salah satu unsur utama dalam populisme, menurut penulis justru hal itu menjadi pintu masuk untuk memahami praktik manipulasi massa (rakyat) yang dilakukan elite politik dengan menekankan pentingnya pendidikan politik yang berciri kritis, plural, dan inklusif.

Bentuk polarisasi warga masyarakat dalam pandangan Urbinati berpuncak pada ‘proses perwakilan untuk mengonstruksi subyek kolektif sehingga dapat meraih kekuasaan’.⁹⁹ Dari proses perwakilan ini, Urbinati membaca fenomena populisme sebagai ‘bentuk baru

⁹⁷ Kurt Weyland, “Populism: A Political Strategic-Approach,” in *Routledge Handbook of Global Populism*, ed. Carlos de la Torre (New York: Routledge Taylor & Francis Group., 2019), 73–103.

⁹⁸ Urbinati, *Me the People: How Populism Transforms Democracy*, 31.

⁹⁹ Urbinati, *Me the People*, 32.

pemerintahan perwakilan yang didasarkan pada dua fenomena yaitu relasi langsung antara pemimpin dengan rakyat dalam masyarakat yang didefinisikan oleh pemimpinnya sebagai orang yang benar, dan baik serta memiliki otoritas lebih atas massa'.¹⁰⁰

Hubungan langsung dilakukan lewat proses perwakilan di mana pemimpin populis yang merupakan perwujudan dari suara rakyat menyatukan klaim perwakilan untuk memperbaiki kelemahan yang diwariskan demokrasi konstitusional. Menurut kaum populis, 'karena rakyat dan pemimpin telah secara efektif bergabung, dan tidak ada elite perantara yang membedakan mereka maka peran musyawarah sebagai prosedur perwakilan dan mediasi dapat dikurangi secara drastis sehingga keinginan rakyat dapat diwujudkan dengan lebih mudah.'¹⁰¹ Dalam pembacaan Urbinati, representasi populis berbeda dengan demagog politik. Demagog politik dalam demokrasi langsung memiliki pengaruh langsung dalam pembuatan undang-undang karena majelis berdaulat tanpa perantara, sedangkan populisme yang muncul dalam tatanan negara berdaulat, rakyat didefinisikan sebagai prinsip abstrak. Prinsip inilah yang membuat kaum populis bebas beretorika mendapatkan klaim pengakuan dari rakyat. Untuk itu kaum populis gencar melakukan proses penyatuan klaim. Proses penyatuan klaim ini mendapatkan momentumnya ketika legitimasi lembaga perantara dalam demokrasi perwakilan mengalami degradasi. Karena itu menurut Urbinati hubungan populisme dengan demokrasi konstitusional berciri konfliktual. Konflik dengan demokrasi konstitusional merupakan strategi populisme mengooptasi prinsip mayoritas yang memusatkan kekuatannya sendiri dengan meresmikan pemerintahan mayoritas. Dengan demikian, menurut Urbinati kehadiran populisme dalam demokrasi perwakilan menimbulkan beberapa permasalahan seperti munculnya 'faksionalisme, mayoritarianisme, holisme populis yang berpusat pada figur pemimpin, dan antipartisme'.¹⁰²

1.2. Masalah dan Rumusan Masalah

Pendekatan strategi politik Urbinati dalam membaca fenomena populisme sebagai bentuk baru pemerintahan perwakilan yang didasarkan pada hubungan langsung antara pemimpin dan mereka yang didefinisikan oleh pemimpin sebagai orang yang "baik" atau "benar" serta memiliki keunggulan atas rakyat kebanyakan,¹⁰³ menurut penulis berkaitan erat dengan persoalan metafisika kekuasaan. Pada zaman pramodern, legitimasi itu berisi rujukan ke

¹⁰⁰ Urbinati, *Me the People*, 4.

¹⁰¹ Urbinati, *Me the People*, 8.

¹⁰² Urbinati, *Me the People*, 190.

¹⁰³ Urbinati, *Me the People*, 4.

Tuhan, tradisi atau sumber transenden lain, misalnya dalam paham hak ilahi raja.¹⁰⁴ Pudarnya sumber lama legitimasi tidak meniadakan kebutuhan akan legitimasi. Kebutuhan ini membuat “teologisasi” kekuasaan politik menjadi sindrom permanen dalam politik modern. Kini ‘rakyat’ dan ‘kedaulatan rakyat’ menjadi poros legitimasi, inilah posisi yang dulu ditempati Tuhan. Itulah mengapa bagi Laclau menurut pembacaan Arato, “rakyat sebagai keseluruhan merupakan sosok Tuhan transenden, tak pernah hadir atau nyata dalam universalitas dan kepenuhan sempurna. Rakyat adalah Tuhan yang tidak hadir atau tersembunyi, ‘kepenuhan yang absen’”.¹⁰⁵ Bagi Laclau, ‘rakyat’ merupakan penanda kosong, bejana konseptual yang terisi hanya dengan wacana yang menciptakan realitas. Persis di sinilah tersembunyi sumber persoalan populisme bagi demokrasi. Bagi Laclau “bejana kosong” itu mesti diisi, juga jika terisi secara parsial, sebab tanpa itu tak ada legitimasi: “Itulah mengapa kaum biasa (*the plebs*) memandang diri sebagai rakyat (*populus*), bagian dari keseluruhan. Di lain pihak, kaum biasa yang parsial ini dapat membentuk populus yang sungguh universal.¹⁰⁶ Namun, karena apa yang kosong kemudian terisi itu harus bertindak, maka kepemimpinan menjadi sentral. Dengan itu, demikian afirmasi Arato, apa yang terjadi “keseluruhan [*populus*] dijelmakan oleh kelompok parsial [*the plebs*], kelompok parsial dijelmakan oleh sang pemimpin (*the leader*) hingga membentuk konsepsi tiga instansi”.¹⁰⁷ Namun karena kekaburan identitas keseluruhan dan kelompok parsial, celah ini diisi oleh relasi afektif yang penuh sentimental dengan sang pemimpin.

Ketika menjelma pada tindakan politik, populisme melibatkan sosok pemimpin yang bisa saja terkesan karismatis, namun lebih niscaya berecici “diktatorial, karena kelompok telah memberi lisensi pemimpin untuk bertindak dan melaksanakan kediktatoran atas kelompok dan keseluruhan”.¹⁰⁸ Singkatnya, pada mulanya adalah kebutuhan akan legitimasi yang dikejar dengan memanggil masuk sosok transenden. Ciri transenden itu terbentuk melalui wacana ‘rakyat’ dan ‘kedaulatan rakyat’ dengan arti serba labil menurut arus wacana kaum populis yang menciptakan realitas melalui oposisi dengan elite dan afirmasi identitas rakyat. Kelompok yang disebut ‘rakyat’ inilah kaum parsial yang mengemban ciri universal komunitas politik. Namun, karena keniscayaan bertindak di arena politik, kekosongan itu

¹⁰⁴ Simon Thomson, *The King's Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology*, *The King's Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology* (Princeton New York: Princeton University Press, 2017).

¹⁰⁵ Andrew Arato, “Political Theology and Populism,” *Social Research: An International Quarterly* 81, no. 1 (2013): 143–172.

¹⁰⁶ Laclau, *On Populist Reason*, 86,94.

¹⁰⁷ Arato, “Political Theology and Populism.”, 159.

¹⁰⁸ Andrew Arato, “How We Got Here? Transition Failures, Their Causes and the Populist Interest in the Constitution,” *Philosophy and Social Criticism* 45, no. 9–10 (2019): 1106–1115.

tidak bisa tidak diisi oleh sosok pemimpin yang bertindak langsung tanpa perantara. Urbinati melihat bahwa populisme berbahaya bagi demokrasi karena berusaha memusatkan kekuasaan pada pemimpin yang bertindak sebagai perwujudan kehendak rakyat (*me the people*) dengan menerjang demokrasi prosedural yang ditata dalam prinsip diarki. Populisme menentang pluralisme opini karena memandang rakyat secara keseluruhan sebagai satu-satunya “bagian” yang harus diwakili.¹⁰⁹ Ciri monolit rakyat sebagai bejana kosong melahirkan “dehumanisasi pada mereka yang dianggap musuh, bukan hanya secara eksternal tetapi juga internal” dalam rupa penindasan otoriter.¹¹⁰ Dalam konteks ini benar apa yang dikatakan Urbinati, populisme menyimpan paradoks ganda, di satu sisi mengunggulkan sekelompok rakyat yang dianggap baik dan benar (*party-latria*), namun di sisi lain takut terhadap rakyat yang lain (*party-phobia*), yang berada di luar kategori benar dan baik.¹¹¹ Ketergantungan rakyat pada kehendak pemimpin dan kesediaan pemimpin populis mengeksklusi kepentingan mereka yang dianggap berada di luar batas-batas orang “baik” atau “benar” merentangkan demokrasi konstitusional hingga batasnya dan berpotensi membuka jalan menuju otoritarianisme.

Persoalan metafisika kekuasaan yang diuraikan di atas, apabila dikaitkan dengan palingan konstruktivis sebagaimana telah penulis uraikan di muka, dapat disimpulkan bahwa relasi representasional antara yang memerintah dan yang memerintah, rakyat dan elite perlu ditempatkan dalam palingan konstruktivis moderat yang menekankan advokasi dan keterwakilan dari pihak perwakilan dan tanggung jawab dan partisipasi secara dinamis dari yang diwakili. Namun karena palingan konstruktivis presentasi rentan terhadap pelanggaran kehendak maka menurut penulis perlu dilengkapi dengan perangkat institusi demokrasi yang terbuka terhadap usulan atau masukan yang diwakili.

Berdasarkan hal di atas, pertanyaan mayor yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah mengapa representasi populis menjadi masalah sehingga membawa implikasi bagi demokrasi? Dari pertanyaan mayor ini, muncul tiga pertanyaan minor:

- 1) Apa yang dimaksud dengan representasi populis dalam pemikiran Urbinati?
- 2) Apa strategi politik kaum populis dalam demokrasi, dan masalah apa yang muncul dari paham representasi populis bagi demokrasi?
- 3) Bagaimana memahami representasi populis dari lensa realisme politik?

¹⁰⁹ Urbinati, *Democracy Disfigured*, 128-130 .

¹¹⁰ Arato, “Political Theology and Populism.”, 167.

¹¹¹ Urbinati, *Me the People*, 150.

1.3. Tesis Penelitian

Berdasarkan beberapa pertanyaan penelitian yang telah diuraikan di atas, tesis utama penelitian ini adalah representasi populis tanpa pendidikan politik yang kritis, inklusif dan plural, rakyat hanya menjadi penanda kosong. Pentingnya pendidikan politik yang kritis, inklusif dan plural berkaitan erat dengan persoalan legitimasi kekuasaan yaitu kelenturan arti rakyat dalam populisme dan paradoks kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Kelenturan arti rakyat menjadi celah kosong bagi kaum populis untuk mengonstruksi rakyat mana suka. Rakyat bisa digunakan untuk menyatukan atau memecah belah, menyamakan atau membedakan, melawan kelompok elite atau melawan warga biasa, melemahkan atau menguatkan dan sebagainya. Dalam demokrasi, legitimasi kekuasaan memang bertumpu pada rakyat, namun kedaulatan rakyat merupakan gambaran suatu tempat kosong, tidak mungkin diduduki, demikian hingga mereka yang menjalankan otoritas publik tidak pernah bisa mengklaim telah memilikinya. Demokrasi menggabungkan dua prinsip yang tampak kontradiktif ini: di satu pihak, kekuasaan berasal dari rakyat; di lain pihak, kekuasaan itu tidak dimiliki siapa pun. Di tengah kelenturan arti rakyat dalam populisme dan paradoks kedaulatan rakyat dalam demokrasi tersebut, kaum populis yang mengandalkan personalisasi politik berusaha menarik perhatian rakyat dengan melakukan mobilisasi massa dengan retorika penuh sentimentalisme. Pentingnya pendidikan politik yang kritis, plural dan inklusif persis karena “demokrasi elektoral sebagai metode memilih siapa yang memerintah, menciptakan kebutuhan akan popularitas, mempertahankan gairah massa, memobilisasi kesetujuan, dan menyingkirkan oposisi. Melalui proses itu, demokrasi tidak hanya membuat stabil rezim yang menjunjung kebebasan, tetapi juga membuat rezim penindas kebebasan semakin kuat, dan itulah yang memungkinkan totalitarianisme”.¹¹²

Dari tesis utama di atas, muncul empat sub tesis turunan sebagai berikut:

Sub tesis pertama, representasi populis menyatukan rakyat dalam figur pemimpin yang menyatukan beragam kelompok dengan klaim-klaimnya untuk mencapai konsensus sebagai perwakilan resmi negara dan warga masyarakat.¹¹³ Untuk mewujudkan proyek strategis tersebut, kaum populis menekankan proses perubahan elemen-elemen formal dan institusional dengan mengusulkan praktik representasi yang lebih memperhatikan pembuatan klaim. Proses pembuatan klaim ini berkaitan dengan dua hal yaitu pembuatan opini dan

¹¹² Bernard Crick, *In Defence of Politics* (Chicago: The University of Chicago Press, 1962), 57.

¹¹³ Urbinati, *Me the People: How Populism Transforms Democracy*, 113-137; 160-168.

pengambilan keputusan. Dalam pembuatan opini, rakyat disatukan dalam diri seorang figur pemimpin yang secara resmi bertindak atas nama rakyat. Sedangkan dalam proses pengambilan keputusan, pemimpin populis berperan sebagai figur karismatik yang mampu menyatukan rakyat dari berbagai klaim. Agar pembuatan opini dan proses pengambilan keputusan berjalan dengan baik, kaum populis memperjuangkan representasi langsung yang dilihat sebagai strategi politik untuk mendapatkan kekuasaan. Namun representasi langsung hanya merupakan strategi politik, karena kaum populis tetap mengikuti aturan yang berlaku dalam demokrasi konstitusional.

Sub tesis kedua, kaum populis memiliki strategi politik mengubah makna unsur-unsur utama demokrasi perwakilan seperti rakyat, mayoritas, dan pemilihan perwakilan sehingga menghasilkan demokrasi populis.¹¹⁴ Makna rakyat bisa merujuk sebagai bangsa, sebagai kaum jelata, banyak orang atau tiap orang. Bisa juga menunjuk keseluruhan atau bagian, bisa pula menyatukan atau memecah. Meminjam terminologi Laclau, rakyat bagi kaum populis merupakan penanda kosong yang bisa dikonstruksi dengan cara apa pun. Demikian pula dengan makna mayoritas, dan pemilihan perwakilan. Kaum populis tidak memahami mayoritas sebagai metode untuk menentukan kemenangan terhadap mereka yang berkontestasi dalam demokrasi tetapi sebagai kekuatan [*power*] untuk mengklaim diri sebagai orang benar dan baik dengan melancarkan strategi *satanisasi* musuh atau merendahkan kelompok lain. Akhirnya kaum populis menggunakan pemilihan sebagai formalitas untuk menyatukan klaim dan untuk memenangkan kontestasi dalam demokrasi elektoral.

Sub tesis ketiga, representasi populis menjadi masalah dalam demokrasi karena mengabaikan prinsip diarki yang terdiri atas kehendak dan opini.¹¹⁵ Kehendak berkaitan erat dengan pemilihan perwakilan, prosedur formal, lembaga otoritatif demokrasi, dan aturan mayoritas sebagai cara penataan representasi politik sedangkan opini berkaitan dengan domain ekstra konstitusional yang melibatkan partisipasi warga dalam memengaruhi kebijakan publik. Masalah-masalah yang dimunculkan representasi populis bagi demokrasi adalah sebagai berikut: *Pertama.*, sentralisasi kekuasaan dengan memobilisasi mayoritas sehingga melanggar *checks and balances* serta pemisahan kekuasaan dalam demokrasi; *Kedua.*, anti-pluralistik dengan melegitimasi kekuasaan tirani mayoritas sehingga mengabaikan hak-hak minoritas, dan meminimalkan pengaruh oposisi politik; *Ketiga.*, rusaknya legitimasi demokrasi sehingga mengganggu kerja lembaga independen di luar pemerintahan yang penting bagi demokrasi.

¹¹⁴ Urbinati, *Me the People*, 78-112.

¹¹⁵ Urbinati, *Democracy Disfigured*, 16-80.

Sub tesis keempat, untuk memahami dinamika representasi populis perlu melihatnya dari lensa realisme politik. Dari lensa realisme politik, representasi populis ternyata berada dalam tegangan permanen antara legitimasi dan kepercayaan, keputusan dan penilaian, rakyat dan elite, pemerintah dan warga, yang mewakili dan yang diwakili, dalam institusi dan di luar institusi, yang politik dan yang sosial. Tegangan permanen ini tentu membawa beberapa implikasi bagi demokrasi: 1] Mengawal proses demokratisasi dan de-demokratisasi di bawah tatapan mata dan suara rakyat; 2] Merancang kebijakan publik yang bertanggung jawab dan akuntabel; 3] Berdemokrasi dalam semangat republikanisme karena menyediakan sejumlah perspektif dan preposisi seperti kebaikan bersama, keutamaan wargawi, partisipasi warga, kewarganegaraan aktif, dan keberanian untuk memperjuangkan kebaikan bersama. 4] Mengembangkan pendidikan politik yang kritis, plural, dan inklusif. Unsur kritis mengikuti paradoks demokrasi yang perlu dilihat sebagai tantangan akan pentingnya pendidikan kemanusiaan yang berfokus pada peningkatan kapabilitas.¹¹⁶ Dengan demikian rakyat yang menjadi salah satu pilar utama dalam demokrasi tidak dianggap sekadar sebagai penanda kosong oleh kaum populis. Unsur plural hendak menyatakan bahwa dalam demokrasi ada dua unsur konstitutif yang saling berkaitan yaitu pluralitas kepentingan dan nilai yang dimiliki bersama dalam kelompok, dan keterbukaan masyarakat terhadap kelompok lainnya.¹¹⁷ Dengan demikian, demokrasi tidak jatuh dalam sindrom 'melelatric' yaitu militansi terhadap kepentingan sebagian masyarakat yang dianggap baik dan mengabaikan warga masyarakat lainnya.¹¹⁸ Unsur inklusif hendak menyatakan bahwa untuk melawan praktik demokrasi eksklusif yang diperjuangkan kaum populis, kiranya perlu dikembangkan pendidikan politik yang mempromosikan demokrasi inklusif yang menekankan kolaborasi.

1.4. Argumentasi Kebaruan

Berdasarkan tesis dan sub-tesis yang telah diuraikan di atas, penulis melihat bahwa kebaruan yang disumbangkan dari penelitian ini adalah berkaitan dengan kajian konseptual dalam membaca fenomena populisme yang mengalami metamorfosis dalam demokrasi perwakilan. Kajian konseptual ini menampilkan tiga persoalan subtil yang saling terkait

¹¹⁶ Martha Nussbaum, *Creating Capabilities: The Human Development Approach* (Cambridge: Harvard University Press, 2011).

¹¹⁷ John Kekes, *The Morality of Pluralism* (Princeton New York: Princeton University Press, 1993).

¹¹⁸ Urbinati, *Me the People*, 111.

yaitu arti rakyat menurut kaum populis, peran pemimpin karismatik dalam populisme, dan persoalan kedaulatan rakyat dalam paradoks demokrasi. Dari tiga persoalan subtil ini, menurut penulis populisme perlu dipahami dalam terang logika demokrasi yang berjalan dalam tegangan permanen antara apa yang terjadi (*what is*) dan apa yang seharusnya ada (*what should be*). Dalam konteks ini, demokrasi perlu dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, demokrasi sebagai prosedur membuat keputusan politik sedangkan di sisi lain, demokrasi sebagai cita-cita tentang bagaimana seharusnya kehidupan politik dilaksanakan. Di tengah tegangan antara apa yang terjadi (*what is*) dan apa yang seharusnya ada (*what should be*) tersebut, penulis mengikuti argumen Rosanvallon yang menegaskan bahwa “usaha merawat kekayaan demokrasi dalam masyarakat dewasa ini melibatkan keharusan memahami berbagai kesulitannya secara lebih realistik”.¹¹⁹ Demokrasi sebagai prosedur politik dan sebagai cita-cita dalam konteks ini bergerak dalam tegangan permanen di antara dua kutub, ideal dan real. Tanpa memasang ideal, demokrasi akan terdegradasi menjadi sekadar urusan teknik elektoral dan tanpa menjelma sebagai prosedur, demokrasi tidak akan menjadi modus politik yang berciri realis, kontingensi dan situasional.

Selain itu, unsur kebaruan yang disumbangkan dari penelitian ini adalah berkaitan dengan lensa dalam meneropong representasi populis. Jika Urbinati memilih lensa liberal untuk meneropong representasi populis dan masalah-masalah yang dimunculkan populisme bagi demokrasi, penulis dalam penelitian ini memilih menggunakan lensa realisme politik. Pendekatan realisme politik berargumen bahwa politik bukan tentang prinsip-prinsip moral tetapi tentang relasi kekuasaan. Namun relasi kekuasaan ini selalu berada dalam tegangan permanen antara legitimasi dan kepercayaan, keputusan dan penilaian, rakyat dan elite, pemerintah dan warga, yang mewakili dan yang diwakili, dalam institusi dan di luar institusi, yang politik dan yang sosial terutama di tengah menguatnya dominasi elite dalam praktik politik formal maupun informal.

Sebagai konsekuensi logis menguatnya dominasi elite dalam politik formal dan informal, rakyat sering kali hanya dianggap sebagai instrumen untuk memenuhi agenda politik tersembunyi kaum populis. Agar rakyat tidak menjadi instrumen elite, pendidikan kewargaan menjadi syarat yang tidak boleh tidak dalam proses demokrasi. Hal ini selaras dengan pengandaian normatif yang menyatakan bahwa rakyat punya kapasitas memilih secara benar bagi kebaikan umum, bukan sekadar digerakkan oleh motif kepentingan diri atau

¹¹⁹ Samuel Moyn, “Intellectual History and Democracy: An Interview with Pierre Rosanvallon,” *Journal of the History of Ideas* 68, no. 4 (2007): 701–702.

kelompok.¹²⁰ Kapasitas untuk memilih secara benar berdasarkan kepentingan umum ikut menentukan kualitas demokrasi. Karena itu, kualitas pilihan warga dalam proses elektoral menjadi prasyarat antropologis jatuh banggunya demokrasi.¹²¹ Dalam konteks ini, warga memilih perwakilan bukan berdasarkan suku, agama, dan ras tetapi berdasarkan kualitas dan kapabilitas dalam menyuarakan apa yang menjadi kepentingan dan kehendak rakyat. Selain itu, agar rakyat memiliki sikap kritis dalam menanggapi apa yang diwacanakan oleh perwakilan dalam peristiwa politik sebelum, selama, dan setelah pemilihan perwakilan. Dengan demikian, rakyat menjadi subjek demokrasi yang mandiri dalam menentukan pilihan politik sehingga tidak lagi diombang-ambingkan oleh retorika kaum populis.¹²²

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk merumuskan secara normatif dari sudut filsafat politik atas konsep representasi populis dan implikasinya bagi demokrasi berdasarkan telaah kritis atas pemikiran politik Nadia Urbinati tentang demokrasi dan populisme. Karena itu tujuan penelitian ini adalah; *Pertama*, memahami gagasan Urbinati tentang representasi populis, dan strategi politik yang dilakukan kaum populis dalam demokrasi. *Kedua*, memahami gagasan Urbinati tentang masalah-masalah representasi populis dari lensa demokrasi diarki. *Ketiga*, menemukan kebaruan pemikiran Urbinati melalui pembacaan kritis dari lensa realisme politik dan implikasi-implikasinya bagi demokrasi. *Keempat*, menemukan kemungkinan relevansi pemikiran Urbinati dalam konteks Indonesia.

1.6. Metode Penelitian

Untuk menemukan konstruksi berpikir ‘representasi populis dan implikasinya bagi demokrasi’ berdasarkan telaah kritis atas pemikiran politik Nadia Urbinati tentang demokrasi dan populisme, penulis menggunakan pendekatan normatif dari sudut filsafat politik. Filsafat politik merupakan upaya untuk memahami hakikat perkara politik dan tatanan politik yang benar dan baik. Penelitian ini menggunakan lensa realis terhadap kehidupan politik. Pendekatan realis berargumen bahwa politik bukan tentang prinsip tetapi tentang relasi kekuasaan. Karena itu, Geuss mengusulkan bahwa filsafat politik harus memperhatikan lima

¹²⁰ Jonathan Wolff, *An Introduction to Political Philosophy*, Revised. (Oxford: Oxford University Press, 2006), 75.

¹²¹ Robert Dahl, *On Democracy* (New Haven, CT: Yale University Press, 1998), 185.

¹²² David Sullivan, *Education, Liberal Democracy and Populism* (Routledge Taylor & Francis Group., 2019).

tugas: (1) “pemahaman tentang bagaimana agen politik bertindak dan keputusan diambil; [memahami] (2) memungkinkan warga negara untuk secara kritis mengevaluasi institusi dan kebijakan politik dalam hal kegunaan dan efisiensinya [evaluatif]; (3) membantu warga negara untuk memahami peran mereka dalam masyarakat [orientasi]; (4), memperkenalkan istilah-istilah baru agar tidak hanya untuk mencerminkan tetapi untuk mengubah cara di mana dunia dipahami [inovasi konseptual]; dan (5) membantu mengungkap cara-cara pelaksanaan kekuasaan di mana “kepentingan-kepentingan tertentu secara masuk akal dapat menampilkan diri mereka sebagai kepentingan universal” [ideologi]”.¹²³

Melalui lensa realisme politik, penulis akan menelusuri konsep representasi populis yang dikaji secara sistematis dari beberapa sumber yang ditulis Nadia Urbinati sendiri dan beberapa tokoh yang menjadi rujukan utama dalam tulisan-tulisannya sambil membaca peristiwa-peristiwa *real* politik yang terus muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah itu meneropong representasi populis dari lensa diarki dan realisme politik. Dari kedua lensa tersebut, ditemukan bahwa representasi populis membawa beberapa implikasi bagi demokrasi.

Beberapa karya Urbinati yang penulis pilih sebagai rujukan utama adalah sebagai berikut: *Pertama, Representative Democracy: Principle and Genealogy* (2006). Lewat karya ini, Urbinati berusaha melawan argumen yang mengatakan bahwa pemerintahan representatif tidak sepenuhnya demokratis karena tidak memberi peluang kepada rakyat untuk secara langsung mengambil keputusan. Melawan argumen ini, ia berpendapat bahwa representasi merupakan basis legitimasi demokrasi. Representasi politik didasarkan pada kontinum pengaruh kekuasaan yang diciptakan oleh penilaian politik, serta kehadiran melalui opini yang menghubungkan masyarakat dengan lembaga perwakilan. Untuk memperkuat argumentasinya tersebut, dalam buku ini Urbinati mengintegrasikan gagasan representasi dari para pemikir politik seperti Rousseau, Immanuel Kant, Emmanuel Joseph Sieyès, Thomas Paine, dan Marquis de Condorcet.

Kedua, *Democracy Disfigured: Opinion, Truth and the People* (2014). Dalam buku ini, Nadia Urbinati mengidentifikasi tiga jenis pembusukan demokrasi: yang tidak politis, populis, dan plebisitarian. Dalam pembacaan Urbinati, demokrasi yang tidak politis mendelegitimasi opini politik hanya berdasarkan keahlian. Demokrasi populis secara radikal memolarisasi forum publik sebagai ruang terbuka dalam memperdebatkan opini. Selanjutnya demokrasi plebisit atau massa menilai terlalu tinggi aspek estetika dan

¹²³ Raymond Geuss, *Philosophy and Real Politics* (New Jersey: Princeton University Press, 2008), 53.

sentimentalis dari opini. Bagi Urbinati, demokrasi memerlukan perjuangan permanen dalam pembuatan agenda politik yang dianggap oleh warga negara menjadi sentral dalam kehidupan mereka. Opini dengan demikian merupakan bentuk tindakan yang sama pentingnya dengan mekanisme yang mengatur suara dan memobilisasi keputusan. Dengan memeriksa tiga bentuk pembusukan demokrasi ini, Urbinati berusaha mengkritisi kehadiran para teknokrat dalam demokrasi yang berpegang pada prosedur, kaum populis yang mengelabui rakyat dengan retorika yang menyesatkan, dan para operator media yang mengubah demokrasi sekadar tontonan.

Karya yang ketiga adalah *Me the People: How Populism Transforms Democracy* (2019). Dalam karya ketiga ini, Urbinati meneliti gerakan populisme pada abad ke-21 yang muncul dalam setiap demokrasi di seluruh dunia dari sudut pandang teori politik. Menurutnya, populisme merupakan bentuk baru pemerintahan perwakilan yang didasarkan pada dua fenomena yaitu relasi langsung antara pemimpin dengan rakyat dalam masyarakat yang didefinisikan sebagai orang benar, dan baik serta memiliki otoritas lebih atas massa. Para pemimpin populis mengklaim berbicara kepada dan untuk rakyat tanpa mediasi partai politik, dan media independen. Urbinati menunjukkan bahwa populisme memiliki potensi mentransformasi demokrasi. Menggabungkan analisis teoretis, sejarah pemikiran politik, dan situasi dewasa ini, Urbinati pada akhirnya menemukan argumentasi kunci bahwa kehadiran populisme berkaitan erat dengan demokrasi perwakilan.

Karya yang keempat adalah *Political Theory of Populism* (2019). Dalam karya yang merupakan artikel dalam jurnal *Annual Review of Political Science*, Urbinati berargumen bahwa populisme mentransformasi prinsip-prinsip fundamental demokrasi seperti makna rakyat, mayoritas, pemilihan umum, dan sistem representasi lewat seorang pemimpin yang mendapat legitimasi dari rakyat yang memilihnya.¹²⁴

Karya yang kelima adalah *Populism and the Principle of Majority* (2017). Dalam karya yang merupakan salah satu bab dalam buku *The Oxford Handbook On Populism*, Urbinati berasumsi bahwa gerakan populis sering kali berhasil memainkan politik mayoritas dengan menentang demokrasi partai berdasarkan konsep rakyat yang memiliki klaim sebagai wakil atas keseluruhan.¹²⁵ Populisme menurut Urbinati ingin membentuk rezim mayoritas.

Karya yang keenam adalah *'Anti-establishment and the substitution of the whole with one of its parts* (2019). Dalam karya yang merupakan salah satu artikel dalam *Routledge*

¹²⁴ Nadia Urbinati, "Political Theory of Populism," *Annual Review of Political Science*, 2019, 335.

¹²⁵ Nadia Urbinati, "Populism and the Principle of Majority," *The Oxford Handbook on Populism* (2017).

Handbook of Global Populism, Urbinati menjelaskan bahwa anti kemapanan yang menjadi proyek jangka pendek populisme merupakan salah satu kunci untuk memahami transmudasi keseluruhan menjadi satu bagian.¹²⁶ Massa yang berada di luar lingkaran elite dinyatakan berhak membentuk pemerintahan sendiri dengan mengatasnamakan rakyat secara keseluruhan. Populisme memecah politik menjadi dua kelompok antagonistik yaitu elite mapan dan rakyat kebanyakan.

Karya yang ketujuh adalah '*Liquid parties, dense populism*' (2019). Dalam artikel yang termuat dalam jurnal *Philosophy and Social Criticism*, Urbinati berargumen bahwa keberhasilan gerakan populisme sangat berkaitan erat dengan kemunduran partai sebagai pilar demokrasi konstitusional. Menurut pandangan Urbinati pemerintahan perwakilan kontemporer menghadapi mutasi yang mencengangkan akibat kemunduran partai dalam menampung, membuat, dan menyuarakan klaim perwakilan.¹²⁷ Dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa populisme muncul sebagai gerakan pemberontakan terhadap mediasi partai dalam menyuarakan kepentingan rakyat.

1.7. Kerangka Disertasi

Isi penelitian ini berupaya menemukan jawaban normatif atas representasi populis dan implikasinya bagi demokrasi berdasarkan telaah kritis atas pemikiran politik Nadia Urbinati tentang demokrasi dan populisme. Oleh karena itu, penelitian ini diawali dengan mempelajari konsep representasi populis yang mendasari pemikiran Urbinati tentang populisme dan demokrasi. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan strategi politik kaum populis dalam demokrasi, masalah-masalah representasi populis bagi demokrasi, dan lensa diarki sebagai kriteria normatif dalam menilai representasi populis. Uraian pokok dalam penelitian ini dijelaskan dalam bab II, III, dan IV. Kemudian dalam bab V penulis menampilkan model pembacaan berbeda dari Urbinati lewat lensa realisme politik. Penelitian disertasi ini tersusun dalam enam bab, dengan rincian sebagai berikut:

¹²⁶ Nadia Urbinati, "Antiestablishment and the Substitution of the Whole with One of Its Parts," *Routledge Handbook of Global Populism* (Routledge, 2019).

¹²⁷ Nadia Urbinati, "Liquid Parties, Dense Populism," *Philosophy and Social Criticism* Vol. 45(9- (2019).

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini ditampilkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tesis-tesis penelitian, kebaruan penelitian, tujuan penulisan, metode penelitian, kerangka disertasi, biografi Nadia Urbinati dan pokok-pokok pemikirannya tentang populisme dan demokrasi.

Bab II. Masalah Representasi Populis

Dalam bab ini penulis menguraikan masalah representasi populis. Pertama-tama akan dibahas apa itu representasi dan sejarah singkat kemunculan paham representasi. Setelah itu dilanjutkan dengan membahas palingan konstruktivis dalam representasi politik. Pembahasan dilanjutkan dengan menguraikan kritik-kritik terhadap demokrasi representasi, dan teori-teori representasi. Titik pusat pembahasan dalam bab ini adalah representasi populis. Hal-hal yang dibahas dalam bagian ini adalah apa itu representasi populis, bagaimana proses representasi populis, dan metamorfosis representasi populis dalam demokrasi perwakilan.

Bab III. Representasi Populis Sebagai Strategi Politik

Dalam bab ini penulis membahas strategi politik kaum populis dalam demokrasi perwakilan menurut Urbinati. Strategi kaum populis tersebut diawali dengan menampilkan retorika politik anti keamanan dan anti politik. Setelah itu dilanjutkan dengan membahas konstruksi populis atas tiga unsur utama demokrasi yaitu rakyat, mayoritas, dan pemilihan perwakilan. Konsep rakyat yang dipahami kaum populis berbeda dengan konsep rakyat yang digunakan dalam demokrasi konstitusional. Dalam demokrasi konstitusional, rakyat dipahami sebagai semua warga negara tanpa terdiferensiasi secara partikelir sedangkan dalam populisme, rakyat adalah sekelompok warga yang terdiferensiasi berdasarkan status sosial, suku, agama dan sebagainya. Begitu juga terkait konsep mayoritas. Populisme memahami mayoritas sebagai metode untuk menentukan kemenangan terhadap mereka yang berkontestasi dalam demokrasi tetapi sebagai kekuatan dengan mengklaim diri sebagai orang benar dan merendahkan kelompok lain. Akhirnya kaum populis memahami pemilihan perwakilan sebagai formalitas untuk menyatukan klaim dan memenangkan kontestasi.

Bab IV. Representasi Populis Dari Lensa Diarki

Pada bab ini, penulis membahas masalah representasi populis bagi demokrasi menurut pandangan Urbinati. Pertama-tama dibahas tempat representasi politik dalam demokrasi diarki. Dari lensa diarki, pembahasan kemudian dilanjutkan dengan menampilkan pembusukan yang dilakukan oleh kekuatan non politik, populis, dan plebisit terhadap demokrasi. Dari lensa demokrasi diarki, ditemukan bahwa representasi populis membawa masalah bagi demokrasi. *Pertama*, sentralisasi kekuasaan dengan memobilisasi mayoritas sehingga melanggar keseimbangan dan pemisahan kekuasaan dalam demokrasi. *Kedua*, anti pluralistik karena melegitimasi kekuasaan tirani mayoritas sehingga mengabaikan hak-hak minoritas, dan meminimalkan pengaruh oposisi politik. *Ketiga*, rusaknya legitimasi demokrasi sehingga mengganggu kerja lembaga independen di luar pemerintahan yang penting bagi demokrasi.

BAB V. Representasi Populis dari Lensa Realisme Politik

Hal-hal yang dibahas dalam bab ini adalah representasi populis dari lensa realisme politik. Setelah dilanjutkan dengan membahas formalisme dan informalisme politik dalam representasi populis. Dalam membahas sub tema ini, penulis menemukan bahwa representasi populis banyak berisi agenda politik yang melanggengkan dominasi elite. Sebagai pendukung argumen, penulis meminjam pemikiran Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, dan Robert Michels yang membahas strategi elite dalam politik. Strategi politik elite berada dalam tegangan permanen antara legitimasi dan kepercayaan, keputusan dan penilaian, rakyat dan elite, yang mewakili dan yang diwakili, dalam institusi dan di luar institusi, serta yang sosial dan yang politik. Karena itu, representasi populis yang menjadi fokus penelitian ini, jika diteropong dengan menggunakan dari lensa realisme politik membawa beberapa implikasi bagi demokrasi. *Pertama, antropologis*: mengawal proses demokratisasi dan de-demokratisasi di bawah tatapan mata dan suara rakyat; *Kedua, praktis*: merancang kebijakan publik yang bertanggung jawab dan akuntabel; *Ketiga, epistemologis*: berdemokrasi dalam semangat republikanisme karena menyediakan sejumlah perspektif dan preposisi seperti kebaikan bersama, keutamaan wargawi, partisipasi warga, kewarganegaraan aktif, dan keberanian untuk memperjuangkan kebaikan bersama. *Keempat, pedagogis*: mengembangkan pendidikan politik berciri kritis, plural dan inklusif.

Bab VI. Kesimpulan

Pada bab kesimpulan, penulis akan menempatkan keseluruhan penelitian disertasi ini dari perspektif filsafat politik. Oleh karena itu, secara berturut-turut bab ini membahas kaum populis menafsir demokrasi, batas-batas populisme dan demokrasi, pentingnya pendidikan kritis, plural dan inklusif, keterbatasan penelitian, dan beberapa agenda penelitian mendatang.

1.8. Biografi intelektual dan Pokok Pemikiran Urbinati tentang Populisme

Nadia Urbinati lahir pada 26 Januari 1955 di Rimini, Italia. Ia meraih gelar sarjana dalam bidang filsafat dari Universitas Bologna, Italia tahun 1977. Kemudian pada tahun 1980 menyelesaikan diploma dalam sejarah filsafat dari Universitas Parma, Italia. Gelar doktor dalam ilmu sosial dan politik diperolehnya pada tahun 1989 dari European University Institute Florence, Italia. Saat ini, Urbinati menjadi profesor di Universitas Columbia Amerika Serikat dalam bidang ilmu politik dengan minat utama pada teori politik demokrasi dan anti-demokrasi. Di samping mengajar di Universitas Columbia Amerika Serikat, ia juga menjadi dosen tamu di Brazil, Argentina, Italia dan beberapa negara lainnya. Selain itu Urbinati juga menjadi pembicara di berbagai forum seminar dan simposium, editor beberapa jurnal, kolumnis, dan penulis tetap pada surat kabar *la Repubblica* di Roma, Italia.

Minat Urbinati terhadap teori demokrasi dan anti demokrasi diawali dengan penelitian tentang demokrasi perwakilan yang terangkum dalam buku *Mill on Democracy: From the Athenian Polis to Representative Government* (2002), dan *Representative Democracy: Principle and Genealogy* (2006). Dalam buku pertama, Urbinati berfokus pada pemikiran politik John Stuart Mill tentang pemerintahan perwakilan dan kaitannya dengan konsep kebebasan. Sedangkan dalam buku kedua, Urbinati berusaha melawan argumentasi yang mengatakan bahwa pemerintahan perwakilan tidak sepenuhnya bersifat demokratis karena tidak memberi peluang kepada rakyat untuk mengambil keputusan secara langsung. Melawan argumentasi ini, ia berpendapat bahwa perwakilan merupakan dasar legitimasi demokrasi. Untuk memperkuat argumen yang disampaikan dalam buku tersebut, Urbinati mengintegrasikan gagasan perwakilan mulai dari Rousseau, Kant, Sieyès, Paine dan Condorcet. Melanjutkan penelitiannya tentang demokrasi perwakilan, Urbinati kemudian menulis buku *Democracy Disfigured: Opinion, Truth and the People* (2014). Dalam buku ini, Urbinati mengidentifikasi tiga jenis pembusukan demokrasi: yang tidak politis, populis dan plebisitarian. Dalam pandangan Urbinati demokrasi yang tidak politis mendelegitimasi

opini politik hanya berdasarkan kebenaran. Kelompok ini memahami demokrasi sebagai proses pencarian kebenaran. Demokrasi populis secara radikal memolarisasi forum publik sebagai ruang terbuka dalam memperdebatkan opini. Kaum populis memahami demokrasi sebagai mobilisasi massa untuk menentang demokrasi prosedural. Akhirnya demokrasi plebisit atau demokrasi massa menilai terlalu tinggi aspek estetika dan sentimentalisme dari opini yang disampaikan perwakilan. Kelompok ini memahami demokrasi sebagai kompetisi yang penuh persaingan dalam memilih pemimpin. Penulisan buku tersebut dilandasi oleh kecemasan dan keprihatinan Urbinati melihat perubahan praksis demokrasi dalam masyarakat Barat. Terkait hal ini ia berkata:

Saya menulis buku ini di tengah perubahan besar pelaksanaan demokrasi dalam masyarakat Barat... impian kemenangan pertumbuhan ekonomi tiada henti untuk semua, dan lembaga survei yang mempertanyakan kemampuan parlemen terpilih dan demokrasi prosedural dalam membuat keputusan yang kompeten dan cepat. Meningkatnya kesetaraan ekonomi dan munculnya eskalasi ambisi politik kekuasaan kaum oligarki dengan mengandalkan teknokratis terpercaya atau retorika populis atau konsensus plebeian (massa atau rakyat jelata) merupakan fenomena yang menantang sistem demokrasi saat ini.¹²⁸

Dalam pandangan Urbinati saat ini demokrasi dihadapkan pada tantangan dari para penafsir demokrasi seperti kaum teknokrat, kaum populis, dan kaum plebeian atau rakyat jelata. Salah satu persoalan yang mengusik perhatian Urbinati adalah munculnya kaum dan pemimpin populis dalam demokrasi perwakilan. Karena itu dalam buku *Me the People: How Populism Transforms Democracy* (2019), ia secara khusus membaca fenomena populisme sebagai strategi politik. Latar belakang penulisan buku dijelaskan Urbinati dalam pernyataan:

Saya menulis buku ini antara 2016 hingga 2018 ketika pemimpin populis terpilih duduk dalam pemerintahan di dua negara saya, Italia dan Amerika Serikat. Ini merupakan pemilihan pertama di mana internet dan jejaring sosial lainnya menjadi penentu, bukan lagi partai. ... demokrasi merupakan realitas plastik; demokrasi mengalami transformasi yang tidak selalu menyenangkan atau diinginkan, tetapi tetap mampu memetabolisme perubahan dan mengubah arah suatu negara. Demokrasi terbuka terhadap semua risiko, dan populisme merupakan fenomena berisiko dalam demokrasi. Ketertarikan saya pada populisme dimulai pada awal 1990-an, ketika gerakan populisme meningkat di beberapa negara Eropa. Sejak saat itu, populisme semakin menempati panggung politik pada tingkat global dan menjadi salah satu kata yang paling sering diucapkan baik oleh politisi maupun akademisi.¹²⁹

Dari beberapa karya dan pernyataan yang telah diuraikan di atas, Urbinati membaca fenomena populisme dalam demokrasi perwakilan sebagai strategi politik.¹³⁰ Jika ditinjau dari

¹²⁸ Nadia Urbinati, *Democracy Disfigured: Opinion, Truth and the People* (London, England: Harvard University Press, 2014), 299.

¹²⁹ Nadia Urbinati, *Me the People: How Populism Transforms Democracy* (Massachusetts: Harvard University Press, 2019), 257.

¹³⁰ Urbinati, *Me the People*, 113.

pembacaan strategis, populisme berpotensi mengubah unsur-unsur dasar demokrasi konstitusional lewat proses representasi politik. Urbinati melihat ketegangan demokrasi dan populisme bersumber pada perbedaan cara menafsir lembaga politik perwakilan. Bagi kaum populis dalam pandangan Urbinati, tugas utama lembaga politik bukan berperan sebagai sistem *check and balances* atau sebagai pelindung hak-hak sipil, tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan kehendak mayoritas dalam keputusan politik.¹³¹ Karena itu, gerakan populisme cenderung berfokus pada reorganisasi institusi politik dengan mengabaikan demokrasi konstitusional yang ditandai dengan munculnya sentralisasi kekuasaan, melemahnya *check and balances*, mengabaikan oposisi politik, dan transformasi pemilihan pemimpin lewat massa.¹³²

Selanjutnya Urbinati menegaskan bahwa populisme merupakan ‘proses perwakilan untuk mengonstruksi subjek kolektif melalui persetujuan sukarela rakyat sehingga dapat meraih kekuasaan’.¹³³ Hasil konstruksi terhadap subjek kolektif yang digelorkan kaum populis adalah demokrasi populis. Dalam pandangan Urbinati ‘demokrasi populis merupakan ‘bentuk baru pemerintahan perwakilan yang didasarkan pada dua fenomena yaitu relasi langsung antara pemimpin dengan rakyat dalam masyarakat yang didefinisikan sebagai orang benar, dan baik serta memiliki otoritas lebih atas massa’.¹³⁴ Demokrasi populis ini berusaha mengatasi lembaga perantara pembuat opini, seperti partai politik, media *mainstream*, dan sistem lembaga pemerintahan yang memantau dan mengendalikan kekuasaan politik lewat penafsiran kembali makna rakyat dan mayoritas yang telah dinodai oleh politik parsialitas atau keberpihakan. Politik keberpihakan menurut Urbinati menodai supremasi hukum yang mengharuskan pejabat pemerintah dan warga negara terikat untuk bertindak sesuai dengan hukum, dan juga pembagian kekuasaan yang harus berfokus pada hak-hak dasar, proses demokrasi, dan kriteria keadilan. Unsur-unsur ini merupakan inti dari demokrasi konstitusional. Keterkaitan unsur-unsur ini menurut Urbinati terjadi melalui proses sejarah yang kompleks, yang sering kali bersifat dramatis, konflikual, temporal, dan terbuka untuk transformasi.

Kaum populis ingin mengganti demokrasi partai dengan demokrasi populis atau demokrasi publik. Ketika berhasil, mereka menjalankan roda pemerintahan dengan menggunakan sarana dan prosedur yang biasanya ditawarkan oleh demokrasi partai. Kaum populis

¹³¹ Urbinati, Nadia. “Democracy and Populism”, (Constellations, Vol. 5 (1), 1998), 110–124.

¹³² Nadia Urbinati, “The Populist Phenomenon,” *Raisons Politiques* (2013).

¹³³ Urbinati, *Me the People*, 5.

¹³⁴ Urbinati, *Me the People*, 4.

mempromosikan mobilisasi publik secara permanen untuk mendukung pemimpin terpilih dalam pemerintahan. Mereka berjuang mengubah konstitusi yang ada sebagai sarana mengurangi kekuatan mayoritas dalam proses pengambilan keputusan. Meminjam ungkapan Arato,¹³⁵ Urbinati berargumen bahwa populisme berusaha menempati ruang kekuasaan konstituen.¹³⁶

Populisme sebagai proses perwakilan yang diungkapkan Urbinati ini merupakan bentuk tanggapannya atas gagasan Margareth Canovan terkait perbedaan antara gerakan populisme di negara berkembang yang cenderung menghasilkan pemimpin otoriter dan gerakan populisme dalam ikatan sosial masyarakat Barat modern di mana revolusi demokrasi bisa berjalan tanpa seorang pemimpin. Dalam kerangka kerja Canovan, populisme berhasil memanfaatkan kondisi masyarakat Barat sebagai mayoritas diam yang mudah dibujuk dan ditaklukkan oleh para kandidat, dan partai populis yang terampil menangkap peluang.¹³⁷ Interpretasi Urbinati terkait populisme sebagai bentuk baru demokrasi perwakilan dimaksudkan untuk melawan argumen Canovan. Dalam pandangan Urbinati, semua pemimpin populis baik di negara-negara Barat maupun bukan Barat memiliki ciri yang sama. Dalam masyarakat yang belum sepenuhnya demokratis, ambisi perwakilan dari pemimpin populis berpotensi merusak sistem lembaga demokrasi perwakilan.¹³⁸ Untuk mendukung argumennya tersebut, Urbinati merujuk pada fasisme Italia tahun 1920-an dan bentuk kediktatoran yang muncul dalam populisme di sebagian besar negara Amerika Latin.¹³⁹

Lebih lanjut, Urbinati berargumen bahwa sebelum berkuasa, semua pemimpin populis membangun popularitas mereka dengan menyerang partai utama pendukung pemerintah, dan politisi.¹⁴⁰ Namun begitu memperoleh kekuasaan, para pemimpin populis berusaha menjelmakan diri setiap hari dengan rakyat dengan meyakinkan massa bahwa mereka sedang melakukan pertarungan melawan *status quo* yang sudah mengakar. Mereka semaksimal mungkin menjaga transparansi sehingga tidak dianggap menjadi elite baru yang mapan. Mengembangkan relasi langsung dengan rakyat menjadi sangat penting bagi kaum populis.¹⁴¹

¹³⁵ Andrew Arato, *Post Sovereign Constitution Making* (Oxford: Oxford University Press, 2016).

¹³⁶ Urbinati, *Me the People*, 4.

¹³⁷ Margaret Canovan, *The People* (Cambridge: Polity Press, 2005), 87.

¹³⁸ Otto Kirchheimer, "The Transformation of the Western European Party Systems," in *Political Parties and Political Development*, ed. Joseph LaPalombara (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1966), 177–200.

¹³⁹ Urbinati, *Me the People*, 6.

¹⁴⁰ Urbinati, *Democracy Disfigured*, 6.

¹⁴¹ Menurut Urbinati, Hugo Chávez "menghabiskan lebih dari 1.500 jam untuk mengecam kapitalisme di *Aló Presidente*, acara TV-nya sendiri"; begitu juga dengan Silvio Berlusconi selama bertahun-tahun siang malam

Konstruksi perwakilan kaum populis adalah retorika dengan cara membangun jaringan dengan kelas sosial dan ideologi tradisional yang independen dari partai politik. Urbinati berargumen bahwa populisme muncul dari dalam demokrasi perwakilan yang berusaha mengonstruksi model perwakilan rakyat dan pemerintahan sendiri. Populisme tidak menentang pemilu tetapi menjadikan pemilihan umum sebagai perayaan mayoritas dan pemimpinnya sehingga menjadi bentuk baru pemerintahan elitis berdasarkan representasi langsung antara rakyat dan pemimpin. Dalam logika berpikir ini, pemilu hanya berfungsi sebagai aklamasi massa.¹⁴²

Untuk menilai secara normatif fenomena populisme sebagai jenis baru pemerintah campuran, Urbinati merujuk pada teori demokrasi perwakilan yang telah dikembangkan dalam bukunya yang berjudul *Representative Democracy: Principles and Genealogy* (2006) dan *Democracy Disfigured: Opinion, Truth, and the People* (2014). Dalam kedua buku tersebut, Urbinati menjelaskan bahwa demokrasi perwakilan bersifat diarki karena merupakan sistem “kehendak” - yaitu hak untuk memilih, prosedur serta lembaga yang mengatur pembuatan keputusan otoritatif dan “opini”- yaitu domain ekstra-institusional dari penilaian dan pendapat politik dalam ekspresi mereka yang beragam memberikan pengaruh timbal balik tetapi bersifat independen.¹⁴³ Teori demokrasi perwakilan membuat dua klaim. Klaim pertama, kehendak dan opini merupakan dua kekuatan kedaulatan warga negara dalam demokrasi. Klaim kedua, kehendak dan opini yang berbeda dalam prinsip harus tetap berbeda dalam praktik, meskipun demikian mereka harus dalam komunikasi konstan satu sama lain.¹⁴⁴ Diarki merupakan nama yang diberikan Urbinati untuk pemerintahan termediasi yang mengasumsikan jarak dan perbedaan antara kedaulatan dan pemerintahan.¹⁴⁵ Pemilihan mengatur ‘perbedaan’ sementara perwakilan mengatur ‘jarak’. Perbedaan dan jarak inilah yang coba diubah sekaligus diatasi oleh gerakan populisme. Tujuan gerakan populisme dalam pandangan Urbinati bukan untuk menciptakan pemerintahan langsung, tetapi untuk menampilkan bentuk baru pemerintahan perwakilan.

Selain sumber-sumber primer yang telah diuraikan di atas, argumentasi Urbinati terkait populisme sebagai bentuk baru pemerintahan perwakilan juga dipengaruhi oleh hasil

muncul di kedua stasiun televisi swasta dan stasiun televisi Italia; dan Donald Trump yang selalu muncul di Twitter siang, dan malam. Bdk. Urbinati, *Me the People*, 6.

¹⁴² Urbinati, *Me the People*, 7.

¹⁴³ Uraian lengkap tentang demokrasi diarki, dapat dibaca dalam Urbinati, *Democracy Disfigured*, 16-80.

¹⁴⁴ Urbinati, *Me the People*, 8.

¹⁴⁵ Menurut Tuck, pemisahan ini menurut para ahli teori kedaulatan modern penting untuk perkembangan demokrasi. Bdk Richard Tuck, *The Invention of Modern Democracy*, (Cambridge, Cambridge University Press, 2016).

pembacaan strategis terhadap pemikiran Bernard Manin tentang tahapan sejarah pemerintahan perwakilan dalam buku *The Principles of Representative Government*. Mengikuti pemikiran Manin, Urbinati berargumen bahwa pemerintahan perwakilan melewati beberapa tahapan sejarah.¹⁴⁶ *Pertama*, demokrasi parlementer dari tahun 1832 sampai pengenalan hak pilih universal pada tahun 1867. Dalam tahap ini hak pilih bersifat terbatas, konstitusionalisme, partai, politik parlementer, dan sentralitas eksekutif. *Kedua*, demokrasi partai akibat masuknya kelas bawah ke dalam sistem politik dan munculnya partai-partai politik massa yang muncul di Eropa dan di negara lain selama abad ke-20. Dalam tahap ini muncul hak pilih universal, partai di luar dan di dalam parlemen sebagai pembuat opini dan partisipasi, media dan sistem komunikasi yang terhubung ke afiliasi partisan, konstitusionalisme, dan sentralitas parlemen atau kongres. *Ketiga*, demokrasi penonton atau publik mulai muncul pada tahun 1970-an dengan merosotnya partai-partai massa, pengaruh media massa pada kampanye pemilu, dan pembentukan ‘panggung’ politik sesungguhnya. Dalam tahap ketiga ini muncul beberapa fenomena seperti warga negara sebagai publik yang tidak terorganisir semakin banyak terlibat dalam politik, munculnya opini horizontal, merosotnya partai, dan loyalitas partisan, media dengan status otonom dari afiliasi partisan, warga negara yang tidak terlibat dalam pembuatan agenda politik dan kehidupan partai, personalisasi persaingan politik, sentralitas eksekutif, dan penurunan peran parlemen.¹⁴⁷

Tiga metamorfosis bentuk perwakilan di atas, memiliki hal yang sama terkait pemilihan perwakilan, otonomi perwakilan, peran opini publik, dan persidangan melalui diskusi namun tampak berbeda dalam setiap bentuk pemerintahan perwakilan. Banyak yang akrab dengan bentuk yang kedua yaitu demokrasi partai. Hegemoni partai diganti dengan tampilnya personalisasi politik yang mampu menarik massa sehingga pada akhirnya menghasilkan demokrasi publik atau demokrasi penonton. Menurut Urbinati tahap ketiga metamorfosis pemerintahan perwakilan yaitu demokrasi penonton merupakan kondisi di mana populisme dapat berkembang hingga mendapat posisi atau kekuasaan.¹⁴⁸ Dalam tahap ini, penggunaan internet membawa transformasi horizontal audiens sebagai aktor politik yang ada di luar lembaga perwakilan. Dalam konteks ini audiens secara radikal menentang bentuk organisasi partai yang bergantung pada struktur pengambilan keputusan tidak langsung. Urbinati menyebut fenomena disintermediasi ini sebagai ‘pemberontakan melawan lembaga

¹⁴⁶ Urbinati, *Me the People*, 24.

¹⁴⁷ Bernard Manin, *The Principles of Representative Government* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 192-238.

¹⁴⁸ Urbinati, *Me the People*, 24.

perantara.¹⁴⁹ Meskipun diklaim sebagai kemajuan karena menekankan partisipasi langsung, demokrasi audiens merupakan bentuk pemerintahan representatif di mana populisme dapat menemukan oksigennya.

Mengacu pada pemikiran Manin tentang metamorfosis pemerintahan perwakilan, Urbinati berargumen bahwa fenomena populisme perlu dilihat dalam terang metamorfosis dari “demokrasi partai” ke “demokrasi audiens” atau “demokrasi publik”.¹⁵⁰ Metamorfosis ini ditandai dengan fenomena lemahnya loyalitas partisan dan keanggotaan partai sehingga menguntungkan personalisasi politik yang mengandalkan penilaian publik secara langsung. Representasi yang melihat pemimpin sebagai perwujudan rakyat menolak mengandalkan aktor kolektif termediasi seperti partai. Oleh karena itu, demokrasi populis menurut Urbinati berpusat pada pemimpin yang memiliki daya tarik membakar emosi massa lewat pesan-pesan yang disampaikannya. Demokrasi populis ini terwujud lewat pembentukan partai populis dengan sistem organisasi yang longgar. Dengan demikian, mereka mampu menarik dan menyatukan banyak klaim atau suara yang berbeda di bawah pengaruh seorang pemimpin perwakilan. Rakyat yang tidak terdiferensiasi seperti massa menurut pembacaan Urbinati merupakan lahan subur bagi demokrasi populis.

Urbinati berargumen bahwa demokrasi perwakilan akan berkembang ketika ruang publik tidak lagi dipengaruhi oleh partai politik dan surat kabar partisan. Demokrasi publik ini dilukiskannya dengan ‘metafora teater, (yang dipentaskan) lebih daripada ‘metafora parlemen’ (majelis yang berbicara).¹⁵¹ Dalam ruang publik yang baru ini, undang-undang yang diusulkan tidak lagi menjadi hasil seni koalisi, kompromi, tawar-menawar, dan oposisi antara perwakilan mayoritas, dan minoritas. Urbinati mengamati bahwa demokrasi populis merupakan bentuk baru representasi yang terpusat pada pribadi representatif, alih-alih dipusatkan pada partai kolektif yang mewakili garis partisan. Dalam konteks ini, pribadi representatif tidak lagi menjadi juru bicara partai politik, tetapi agen yang melampaui orientasi partai yang harus berada di luar garis partisan. Hasil proses perwakilan yang dilakukan oleh pribadi representatif adalah demokrasi populis sedangkan bentuk baru pemerintahannya adalah pemerintahan populis.¹⁵²

Interpretasi Urbinati yang melihat populisme sebagai bentuk baru pemerintahan perwakilan dilandasi oleh pengamatannya atas fenomena dan literatur tentang populisme abad XXI.

¹⁴⁹ Nadia Urbinati, “A Revolt against Intermediary Bodies,” *Constellations* 22, no. 4 (2015): 477–486.

¹⁵⁰ Urbinati, *Me the People*, 26.

¹⁵¹ Urbinati, *Me the People*, 26.

¹⁵² Urbinati, *Me the People*, 26.

Dalam pembacaan Urbinati, populisme dapat diklasifikasi ke dalam dua kategori yaitu ‘teori minimalis dan teori maksimalis’.¹⁵³ Teori minimalis berusaha meneliti beberapa kondisi minimal yang memungkinkan kita mengenal fenomena populisme untuk keperluan analitis. Urbinati menyebut beberapa varian teori populisme minimalis seperti karya Cas Mudde dan Cristóbal Rovira Kaltwasser yang menganalisis populisme sebagai ideologi tipis, Michael Kazin dan Benjamin Moffitt yang mengeksplorasi populisme sebagai gaya retorika, dan Kurt Weyland dan Alan Knight yang melihat populisme sebagai strategi pemimpin populis dalam meraih kekuasaan.¹⁵⁴ Teori maksimalis dalam pandangan Urbinati ingin mengembangkan landasan teori populisme sebagai konstruksi subjek kolektif. Teori ini dikembangkan secara khusus pada masa krisis institusi yang ditandai dengan menurunnya legitimasi partai, dan melemahnya institusi demokrasi. Teori ini secara eksplisit mengaitkan populisme dengan demokrasi. Menurut Urbinati teori populisme maksimalis yang dikembangkan Ernest Laclau dan Chantal Mouffe perlu dilihat sebagai jawaban atas konsepsi formal demokrasi terkait interpretasi universal tentang hak dan kebebasan, dan sebagai peremajaan demokrasi dari dalam yang mampu menciptakan blok politik baru dalam pemerintahan demokratis.¹⁵⁵

¹⁵³ Urbinati, *Me the People*, 32.

¹⁵⁴ Urbinati, *Me the People*, 28.

¹⁵⁵ Urbinati, *Me the People*, 32.

DAFTAR PUSTAKA

- Accetti, Carlo Invernizzi, and Alessandro Mulieri. "Debating Representative Democracy." *Contemporary Political Theory* 15, no. 2 (2016): 205–242.
- Ackerman, Bruce. *We the People: The Rise of Popular Sovereignty*. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1991.
- Adam Przeworski and John Sprague. *Paper Stones: A History of Electoral Socialism*. Chicago: The University of Chicago Press, 1986.
- Alexis de Tocqueville. *Democracy in America*. New York: Library of America, 2004.
- Andreas Schedler. "Anti-Political-Establishment Parties." *Party Politics* 2, no. 3 (1996).
- Ankersmith, Frank R. *Aesthetic Politics: Political Philosophy Beyond Fact and Value*. Stanford, California: Stanford University Press, 1997.
- . *Political Representation*. Stanford, California: Stanford University Press, 2002.
- Anthony B. Atkinson and Andrea Brandolini. *On the Identification of the Middle Class*. Palma de Mallorca, Spain, 2011.
- Arato, Andrew; Cohen, Jean L. *Populism and Civil Society*. Oxford: Oxford University Press, 2022.
- Arato, Andrew. "How We Got Here? Transition Failures, Their Causes and the Populist Interest in the Constitution." *Philosophy and Social Criticism* 45, no. 9–10 (2019): 1106–1115.
- . "Political Theology and Populism." *Social Research: An International Quarterly* 81, no. 1 (2013): 143–172.
- . *Post Sovereign Constitution Making*. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- Arditi, Benjamin. *Politics on the Edges of Liberalism: Difference, Populism, Revolution, Agitation*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007.
- Arditi, Benjamín. *Politics on the Edges of Liberalism: Difference, Populism, Revolution, Agitation*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007.
- Arditi, Benjamin, and Benjamin Ardit. *Populism as an Internal Periphery of Democratic Politics. Politics on the Edges of Liberalism*. Difference, Populism, Revolution, Agitation, 2012.
- Arendt, Hannah. *On Revolution*. Cambridge: Penguin Classics, 2006.
- Ariel C. Armony; Victor Armony. "Indictments, Myths, and Citizen Mobilization in Argentina: A Discourse Analysis." *Latin American Politics and Society* 47, no. 4 (2005): 27–54.
- Aristophanes. "The Wasps." In *Aristophanes Vol. 2*, edited by Jeffrey Henderson.

- Cambridge: Harvard University Press, 1998.
- Aristotle. *Politics*. Edited by H Rackham. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
- . *The Constitution of the Athenians*. Edited by Moore J. M. Barkeley: University of California Press, 1986.
- Baar, Robert R. “Populists, Outsiders and Anti-Establishment Politics.” *Party Politics* 15, no. 1 (2009): 29–48.
- Baker, Edwin C. *Media Concentration and Democracy: Why Ownership Matters*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Barber, Benjamin. *Strong Democracy Participatory Politics for a New Age*. Barkeley: University of California Press, 1984.
- Bartolini, Stefano. “Political Parties , Ideology and Populism , in the Post-Crisis Europe,” no. July (2011): 1–15.
- Betz Hans-Georg. “Daenerys Targaryen at IKEA: Left Populism in Spain.” In *Comparative Political Studies*. Newsletter 26, 2017.
- Birch, A H. *Representation*. London, England: The Macmillan Press, 1971.
- Blokker, Paul. “Populism as a Constitutional Project.” *International Journal of Constitutional Law* 17, no. 2 (2019): 535–553.
- Bobbio, Norberto. *Democracy and Dictatorship: The Nature and Limits of State Power*. Cambridge: Polity Press, 1989.
- . *The Future Of Democracy*. Minneapolis: Universty of Minnesota Press, 1987.
- Byung-Chul Han. *Infocracy: Digitization and the Crisis of Democracy*. Cambridge: Polity Press, 2022.
- Canovan, Margaret. “People, Politicians and Populism.” *Government and Opposition* 19, no. 3 (1984).
- . “Populism for Political Theorists?” *Journal of Political Ideologies* 9, no. 3 (2004): 241–252.
- . “Taking Politics to the People: Populism as the Ideology of Democracy.” In *Democracies and The Populist Challenge*, edited by Yves Meny and Yves Surel. New York: Palgrave, 2002.
- Carola, Schoor. “Where the Real People Meet the Real Elite: Exploring Mixes of Populism with Elitism.” *Populism* (2019): 184–206.
- Cartledge, Paul. *Democracy: A Life*. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- Cathleen, Bruhn. “To Hell with Your Corrupt Institutions: AMLO and Populism in Mexico.” In *Populism in Europe and the Americas*, edited by Cristobal Rovira Mudde, Cas; Kalwasser. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

- Charles R. Beitz. *Political Equality: An Essay in Democracy Theory*. Princeton New York: Princeton University Press, 1989.
- Cheeseman Nic. "Populism in Africa and the Potential for Ethnically Blind Politics." In *Routledge Handbook of Global Populism*, edited by Carlos De La Torre, 357–369. Routledge Taylor & Francis Group., 2019.
- Cohen, Jean L. "Hollow Parties and Their Movement-Ization: The Populist Conundrum." *Philosophy and Social Criticism* 45, no. 9–10 (2019): 1084–1105.
- Cohen, Joshua. "The Economic Basis of Deliberative Democracy." *Social Philosophy and Policy* 9 (1989).
- Conniff, Michael L. "Introduction." In *Populism in Latin America*, edited by Michael Conniff, 1–21. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1999.
- Crick, Bernard. *In Defence of Politics*. Chicago: The University of Chicago Press, 1962.
- Dahl, Robert. *Democracy and Its Critics*. Yale New Haven: Yale University Press, 1991.
- . "Further Reflections on The Elitist Theory of Democracy." *American Political Science Review* 60, no. 2 (1996): 296–305.
- . *On Democracy*. New Haven, CT: Yale University Press, 1998.
- . *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven, CT: Yale University Press, 1971.
- David Estlund. *Democratic Authority: A Philosophical Framework*. Princeton New York: Princeton University Press, 2007.
- Dewey, John. *Democracy and Education*. New York: The Fee Press, 1916.
- van Dijk, Teun A. *Ideology: A Multidisciplinary Approach*. London, England: Sage Publications, 1988.
- Disch, Lisa. "The Constructivist Turn in Democratic Representation: A Normative Dead-End?" *Constellations* 22, no. 4 (2015).
- . "The End of Representative Politics?" In *The Constructivist Turn in Political Representation*, edited by Nadia Disch, Lisa; Matjhijs van de Sande; Urbinati, 10–18. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2019.
- . "The People as 'Presupposition' of Representative Democracy - An Essay on the Political Theory of Pierre Rosanvallon." *Redescriptions: Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory* 12, no. 1 (2008).
- . "Toward a Mobilization Conception of Democratic Representation." *The American Political Science Review* 105, no. 1 (2011).
- Domenico Musti. *Demokratía*. Roma: Laterza, 1995.
- Downs, Anthony. *An Economic Theory of Democracy*. New York, 1957.

- E. M. Atkins. "Cicero." In *The Cambridge History of Greek and Roman Political Thought*, edited by Christopher Rowe and Malcolm Schofield. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Edoardo Ruffini. *Il Principio Maggioritario: Profilo Storico*. Milano: Adelphi, 1974.
- Edward, Aspinall. "Democratization and Ethnic Politics in Indonesia: Nine Theses." *Journal of East Asian Studies* 11, no. 2 (2011).
- Edward, Aspinall and Ward Berenschot. *Democracy For Sale: Elections, Clientelism, And The State In Indonesia*. Ithaca and London: Cornell University Press, 2019.
- Elson, Robert. *The Idea of Indonesia: A History*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Elster, Jon. "The Market and the Forum: Three Varieties of Political Theory." In *Debates in Contemporary Political Philosophy: An Anthology*, edited by Derek Matravers & Jonathan E. Pike. London and Chicago: Routledge, 2003.
- Errington, Joseph. *Shifting Languages: Interaction and Identity in Javanese Indonesia*. New York: Cambridge University Press, 1998.
- Espejo, Paulina Ochoa. *The Time of Popular Sovereignty: Process and the Democratic State*. *The Time of Popular Sovereignty: Process and the Democratic State*, 2011.
- Finchelstein, Federico. *From Fascism to Populism in History*. California: University of California Press, 2017.
- Flic Dani. "Populism in the Middle East." In *Routledge Handbook of Global Populism*, edited by Carlos De La Torre, 385–401. New York: Routledge Taylor & Francis Group., 2019.
- Freeden, Michael. *Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach*. Oxford: Oxford University Press, 1996.
- Friedrich, Carl J. *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*. Massachusetts: Blaisdell, 1968.
- Fuller, Roslyn. *Principles of Digital Democracy: Theory and Case Studies*. Dublin: De Gruyter Publication, 2023.
- Gadamer, Hans. *Truth and Method*. Edited by D. G Weinsheimer, J. and Marshall. New York: Continuum, 2004.
- Geuss, Raymond. *Philosophy and Real Politics*. New Jersey: Princeton University Press, 2008.
- Gidron, Noam, and Bart Bonikowski. "Varieties of Populism: Literature Review and Research Agenda." *SSRN Electronic Journal*, no. 13 (2014): 0–38.
- Gonzalez, Camila Vergara. "Assembling the Plebeian Republic" (2019).
- Green, Jeffrey Edward. "The Eyes of the People." *The Eyes of the People* (2010).
- Habermas, Jürgen. *Moral Consciousness and Communicative Action*. Edited by Christian Lenhardt and Shierry Weber Nicholson. Cambridge: MIT Press, 1993.

- Haskell, John. *Direct Democracy or Representative Government*. Boulder, Colorado: Westview Press, 2021.
- Hatherell, Michael. *Political Representation in Indonesia. Political Representation in Indonesia*. London and Chicago: Routledge Taylor & Francis Group., 2019.
- Hawkins A, Kirk. *Venezuela's Chavismo and Populism in Comparative Perspective*. New York: Cambridge University Press, 2010.
- Helena, Landemore. *Open Democracy: Reinventing Popular Rule for The Twenty-First Century*. Princeton& Oxford: Princeton University Press, 2020.
- Herry-Priyono, Bernardinus. *Kebebasan, Keadilan Dan Kekuasaan: Filsafat Politik and What It Is All About*. Jakarta: Kompas, 2022.
- Hicken, Allen. *Building Party Systems in Developing Democracies*. New York: Cambridge University Press, 2009.
- . “Party Systems and the Politics of Development.” In *Handbook on the Politics of Development*, edited by C. Lancaster and N. van de Walle, 499–516. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Hirschmann. Albert, O. *Rival Views of Market Society and Other Essays*. Lanham: Penguin Classics, 1986.
- Hugo Drochon. “Paradoxes of Liberalism.” *History of European Ideas*, (2018).
- Huntington, Samuel P. “Democracy’s Third Wave.” *Journal of Democracy* 2, no. 2 (1991): 12–34.
- Jacopo Custodi, Enrico Padoan. “The Nation of the People: An Analysis of Podemos and Five Star Movement’s Discourse on the Nation.” *Nations and Nationalism* 29, no. 2 (2022).
- Jager, Jan and Walgrave Stefaan. “Populism as Political Communication Style: An Empirical Study of Political Parties’ Discourse in Belgium.” *European Journal of Political Research* 46, no. 3 (2007): 319–345.
- James Burnham. *The Machiavellians: Defenders of Freedom*. New York: Lume Books, 2020.
- James Mill. “Government (1823).” In *Political Writings*, edited by Ball Terence. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- Janosch, Prinz. “Raymond Geuss’ Radicalization of Realism in Political Theory.” *Philosophy and Social Criticism* 42, no. 8 (2016): 777–796.
- Jason Frank. *Constituent Moments: Enacting the People in Postrevolutionary America*. Durham, New York City: Duke University Press, 2010.
- Jean-Jacques Rousseau. “On the Social Contract or Principles of Political Rights.” In *Basic Political Writings*, edited by Donald A. Cress. Indianapolis: Hackett, 1987.
- Jeffery, Edward Green. *Eyes of the People: Democracy in the Age of Spectatorship*. Oxford: Oxford University Press, 2010.

- John D. Dryzek. *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestationists*. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Jürgen Habermas. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Edited by William and Rehg. Cambridge: MIT Press, 1996.
- Juvenal. *The Satires*. Edited by Hurbert Creekmore. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Kaltwasser, Cas Mudde and Cristobal Rovira. “Exclusionary vs. Inclusionary Populism: Comparing Contemporary Europe and Latin America.” *Government and Opposition* 48, no. 2 (2013).
- . *Populism: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2017.
- Kaltwasser, Cristóbal Rovira. “The Ambivalence of Populism: Threat and Corrective for Democracy.” *Democratization* 19, no. 2 (2012): 184–208.
- Kekes, John. *The Morality of Pluralism*. Princeton New York: Princeton University Press, 1993.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. London and Chicago: Routledge Taylor & Francis Group., 2005.
- . *The Essence and Value of Democracy*. Edited by Brian Graff. Lanham: Rowman & Littlefield Publishe, 2013.
- Kenny, P.D. *Populism in Southeast Asia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Kishlansky, Mark A. *Parliamentary Selection: Social and Political Choice in Early Modern England*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- Klaauw, Jamie Van Der. *Representation Ruined: A Genealogy of the Different Practices of Representative Democracy*. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam, 2018.
- Van Klinken, G. “Patronage Democracy in Provincial Indonesia.” In *Rethinking Popular Representation*, edited by K. Törnquist, O; Webster, N. and Stokke. New York: Palgrave, 2009.
- Knight, Alan. “Populism and Neo-Populism in Latin America, Especially Mexico.” *Journal of Latin American Studies* 30, no. 2 (1998): 223–248.
- Koopmans, Ruud, and Jasper Muis. “The Rise of Right-Wing Populist Pim Fortuyn in the Netherlands: A Discursive Opportunity Approach.” *European Journal of Political Research* 48, no. 5 (2009): 642–664.
- de la Torre, Carlos. “Global Populism: Histories, Trajectories, Problems, and Challenges.” In *Routledge Handbook of Global Populism*, edited by Carlos De La Torre, 1–27. New York: Routledge, 2019.
- De La Torre, Carlos. “Populism Revived: Donald Trump and the Latin American Leftist Populists.” *Americas* 75, no. 4 (2018): 733–753.

- Laclau, Ernesto; Mouffe, Chantal. *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. London, England: Verso, 1985.
- Laclau, Ernesto. *On Populist Reason*. London, England: Verso, 2005.
- Landemore, Hélène. “Collective Wisdom. Old and New.” In *Collective Wisdom: Principles and Mechanisms*, edited by Hélène; Elster John Landemore. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- . “Deliberative Democracy as Open , Not (Just) Representative Democracy,” no. 2013 (2017): 51–63.
- . “Democratic Reason: The Mechanism of Collective Wisdom in Politics.” In *Collective Wisdom: Principles and Mechanisms*, edited by Landemore; Elster John Helena. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Lane, Melissa. *The Birth of Politics: Eight Greek and Roman Political Ideas and Why They Matter. The Birth of Politics: Eight Greek and Roman Political Ideas and Why They Matter*, 2015.
- Lara, Felipe Burbano de. “Populist Waves in Latin America: Continuities, Twists, and Ruptures.” In *Routledge Handbook of Global Populism*, edited by Carlos de la Torre, 435–450. London and Chicago: Taylor & Francis Group, 2019.
- Lauth, Hans- Joachim. “Informal Institutions and Democracy.” *Democratization* 7, no. 4 (2000).
- Lefort, Claude. *Democracy and Political Theory*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988.
- . *The Political Forms of Modern Society: Bureaucracy, Democracy, Totalitarianism*. Edited by John B Thompson. Cambridge: Polity Press, 1988.
- Legge, John David. *Sukarno: A Political Biography*. Singapore: Archipelago Press, 2003.
- Levitsky, Steven; Ziblatt, Daniel. *How Democracies Die*. New York: Crown Publishing, 2018.
- Levitsky, Steven, and James Loxton. “Populism and Competitive Authoritarianism.” *Populism in Europe and the Americas* (2012): 160–181.
- Luis Roniger and, and Günes-Ayata. *Democracy, Clientelism, and Civil Society*. London, England: Lynne Rienner, 1994.
- Madison, James. “A Candid State of Parties” (September 26, 1792).” In *James Madison: Writings*, edited by Jack Rakove. New York: Library of America, 1999.
- . *The Federalist Papers*. Macmillan: Palgrave, 2009.
- Mair, Peter. “Populist Democracy vs Party Democracy.” In *Democracies and the Populist Challenge*, edited by Y & Sarel Y Meny, 81–98. London, England: Palgrave Macmillan UK, 2002.
- Manin, Bernard. “The Metamorphoses of Representative Government.” *Economy and Society*

- 23, no. 2 (1994): 133–171.
- . *The Principles of Representative Government*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Margaret Canovan. *The People*. Cambridge: Polity Press, 2005.
- . “Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy.” *Political Studies* 47 (1999): 2–16.
- Margarita López Maya and Alexandra Panzarelli. “Populism, Rentierism, and Socialism in the Twenty-First Century: The Case of Venezuela.” In *Latin American Populism*, edited by Carlos de la and Arsons Torre. Washington, D.C: Woodrow Wilson Center Press, 2013.
- Mark, B Brown. “Citizen Panels and the Concept of Representation.” *The Journal of Political Philosophy* 14, no. 2 (2006).
- Matt Sleat. *Liberal Realism: A Realist Theory of Liberal Politics*. Manchester: Manchester University Press, 2013.
- McCormick, John P. *Machiavellian Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- . “The Contemporary Crisis of Democracy and the Populist Cry of Pain.” *Iride* 44, no. 3 (2017): 539–554.
- Michels, Robert. *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*. New York: Free, 1966.
- Mietzner Marcus. “Indonesian Parties Revisited: Systemic Exclusivism, Electoral Personalisation and Declining Intraparty Democracy.” In *DEMOCRACY IN INDONESIA*, edited by Thomas Power and Eve Warburton, 91–209. Singapore: ISEAS Publishing, 2020.
- . “Movement Leaders, Oligarchs, Technocrats and Autocratic Mavericks: Populist in Contemporary Asia.” In *Routledge Handbook of Global Populism*, edited by Carlos de la Torre, 370–384. New York, 2019.
- Mill, John Stuart. “Considerations on Representative Government (1861).” In *Collected Works*, edited by John M. Robson. Toronto: University of Toronto Press, 1977.
- Millar, Fergus. *The Roman Republic in Political Thought*. Hanover: University Press of New England, 2002.
- Minois, Georges. *The Atheist’s Bible: The Most Dangerous Book That Never Existed*. Chicago: Chicago University Press, 2012.
- Moffitt, Benjamin. *The Global Rise of Populism: Performance, Political Style, and Representation*. Stanford, California: Stanford University Press, 2016.
- Mogen Herman Hansen. *The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes*. Edited by J.

- A. Crook. Oxford: Blackwell, 1993.
- Montanaro, Laura. "The Democratic Legitimacy of Self-Appointed Representatives." *The Journal of Politics* 74, no. 4 (2012).
- Morgan, Edmund S. *Inventing the People: The Rise of Popular Sovereignty in England and America*. New York: Morton & Company, 1988.
- Morgan, Edmund S. *Inventing the People: The Rise of Popular Sovereignty in England and America*. New York: Northon, 1988.
- Mosca, Gaetano. *The Ruling Class*. New York: McGraw Hill, 1939.
- Mouffe, Chantal. *Democratic Politics and Agonistic Pluralism*, 2009.
- . *The Democracy Paradox*. London, England: Verso, 2000.
- Mounk, Yascha. *The People vs. Democracy. The People vs. Democracy*, 2018.
- Moyn, Samuel. "Intellectual History and Democracy: An Interview with Pierre Rosanvallon." *Journal of the History of Ideas* 68, no. 4 (2007): 701–702.
- Mudde, C., and C. Rovira Kaltwasser. "Studying Populism in Comparative Perspective: Reflections on the Contemporary and Future Research Agenda." *Comparative Political Studies* 51, no. 13 (2018).
- Mudde, Cas. *Are Populists Friends or Foes of Constitutionalism?* Oxford: University of Oxford, 2013.
- . *Populist Radical Right Parties in Europe*. New York: Cambridge University Press, 2007.
- Muhtadi, B. *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*. Singapore: Palgrave Macmillan UK, 2019.
- Mulieri, Alessandro. "Exploring the Semantics of Constructivist Representation." In *The Constructivist Turn in Political Representation*, edited by Lisa Disch. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2019.
- Müller, Jan-Werner. *Democracy Rules*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2021.
- . *What Is Populism?* Philadelphia: University of Pennsylvania, 2016.
- Näsström, Sofia. "Representative Democracy as Tautology: Ankersmit and Lefort on Representation." *European Journal of Political Theory* 5, no. 3 (2006): 321–342.
- . "The Legitimacy of the People." *Political Theory* 35, no. 3 (2007).
- . *The Spirit of Democracy*. Oxford: Oxford University Press, 2021.
- Nasstrom, Sofia. "Democratic Representation Beyond Elections." *Constellations* 22, no. 1 (2015): 1–12.
- Nussbaum, Martha. *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Cambridge: Harvard University Press, 2011.
- . *Cultivating Humanity: A Classical Defense Of Reform In Liberal Education*.

- Cambridge: Harvard University Press, 1997.
- . “Cultivating Humanity and World Citizenship.” *Future Forum*, 37 (2007).
- . “Public Philosophy and International Feminism.” *Ethics* 108, no. 4 (1998).
- Ober, Josiah. *Athenian Legacies: Essays On the Politics of Going on Together*. Princeton New York: Princeton University Press, 2005.
- . *Demopolis: Democracy before Liberalism in Theory and Practice*. *Demopolis: Democracy before Liberalism in Theory and Practice*, 2017.
- . *Masses and Elite in Democratic Athens: Rhetoric, Ideology, and the Power of the People*. Princeton New York: Princeton University Press, 1989.
- . “The Original Meaning of ‘Democracy’: Capacity to Do Things, Not Majority Rule.” *SSRN Electronic Journal* 15, no. 1 (2011).
- Ostiguy, Pierre. “The High-Low Political Divide: Rethinking Populism and Anti-Populism.” In *Political Concepts: Committee on Concepts and Methods Working Paper Series 35*, 2009.
- Pasi Ihalainen, Cornelia Ilie, Kari Palonen. “Parliament as a Conceptual Nexus.” In *Parliament and Parliamentarism: A Comparative History of A European Concept*. New York: Berghahn, 2016.
- Pauwels, Teun. “Measuring Populism: A Quantitative Text Analysis of Party Literature in Belgium.” *Journal of Elections, Public Opinion and Parties* 21, no. 1 (2011): 97–119.
- Peruzzotti, Enrique. “Populism as Democratization’s Nemesis: The Politics of Regime Hybridization.” *Chinese Political Science Review* 2, no. 3 (2017): 314–327.
- Pettit, Philip. *On the People’s Terms: A Republican Theory and Model of Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- . *Republicanism: A Theory of Freedom and Government*. Oxford: University of Oxford Press, 2010.
- Phongpaichit, Pasuk, Chris Baker. “Thaksin’s Populism.” In *Populism in Asia*, edited by Kosuke Mizuno and Pasuk Phongpaichit, 66–93. Singapore: NUS Press, 2009.
- Pitkin, Hanna Fenichel. “Representation and Democracy: Uneasy Alliance.” *Scandinavian Political Studies* 27, no. 3 (2004): 335–342.
- . *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Przeworski, Adam. “Minimalist Conception of Democracy.” In *Democracy’s Value*, edited by Casiano Hacker-Cordon Ian Shapiro. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Ritchie Savage. “Populism in the U.S.” In *Routledge Handbook of Global Populism*, 402–415. New York, 2019.
- Roberts, Kenneth M. “Populism, Political Mobilizations And Crises Of Political

- Representation.” In *The Promise and Perils of Populism: Global Perspectives*, edited by della Torre Charlos. London, England: University Press of Kentucky, 2015.
- Robet, Robertus. *Republikanisme : Filsafat Politik Untuk Indonesia*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2021.
- Roniger Luis. “The Missing Piece in Global Populism: The Role Populism Played in Central America.” In *Routledge Handbook of Global Populism*, 451–464. New York, 2019.
- Rosanvallon, Pierre. *Counter-Democracy: Politics in a Age of Distrust*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- . “Democratic Universalism as a Historical Problem.” *Constellations* 16, no. 4 (2009).
- . *Good Government: Democracy beyond Elections*. Edited by Malcolm DeBevoise. London, England: Harvard University Press, 2018.
- . *Legitimacy: Impartiality, Reflexivity, Proximity*. Edited by Princeton University Press. Princeton & Oxford, 2011.
- . “Populism and Democracy in the Twenty-First Century.” In *Rethinking Open Society: New Adversaries and New Opportunities*, edited by Michael Ignatieff. Budapest-New York: Central European University Press, 2018.
- . *The Populist Century: History, Theory, Critique*. Cambridge: Polity Press, 2021.
- Rosanvallon, Pierre, and Paula Diehl. “Political Theory through History and the People and Their Importance for Understanding Populism *,” n.d.
- Rosenblum, Nancy. *On the Sight of the Angels: An Appreciation of Parties and Partisanship*. Princeton New York: Princeton University Press, 2008.
- Rostbøll, Christian F. *Democratic Respect: Populism, Resentment, and the Struggle for Recognition*. Cambridge: Cambridge University Press, 2023.
- Sabine, George H. “The Two Democratic Traditions.” *The Philosophical Review* 61, no. 4 (1952).
- Saffon, Maria Paula, and Nadia Urbinati. “Procedural Democracy, the Bulwark of Equal Liberty.” *Political Theory* 41, no. 3 (2013): 441–481.
- . “Procedural Democracy, the Bulwark of Equal Liberty.” *Political Theory* (2013).
- Sartori, Giovanni. *Elementi Di Teoria Politica*. Bologna: Il Mulino, 1987.
- . *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- . *Theory of Democracy Revisited*. New Jersey: Chatham House Publisher, Inc, 1987.
- Saurette, Paul, and Shane, Gunster. “Ears Wide Shut: Epistemological Populism, Argutainment and Canadian Conservative Talk Radio.” *Canadian Journal of Political Science* 44, no. 1 (2011): 195–218.
- Saward, Michael. “Slow Theory: Taking Time over Transnational Democratic

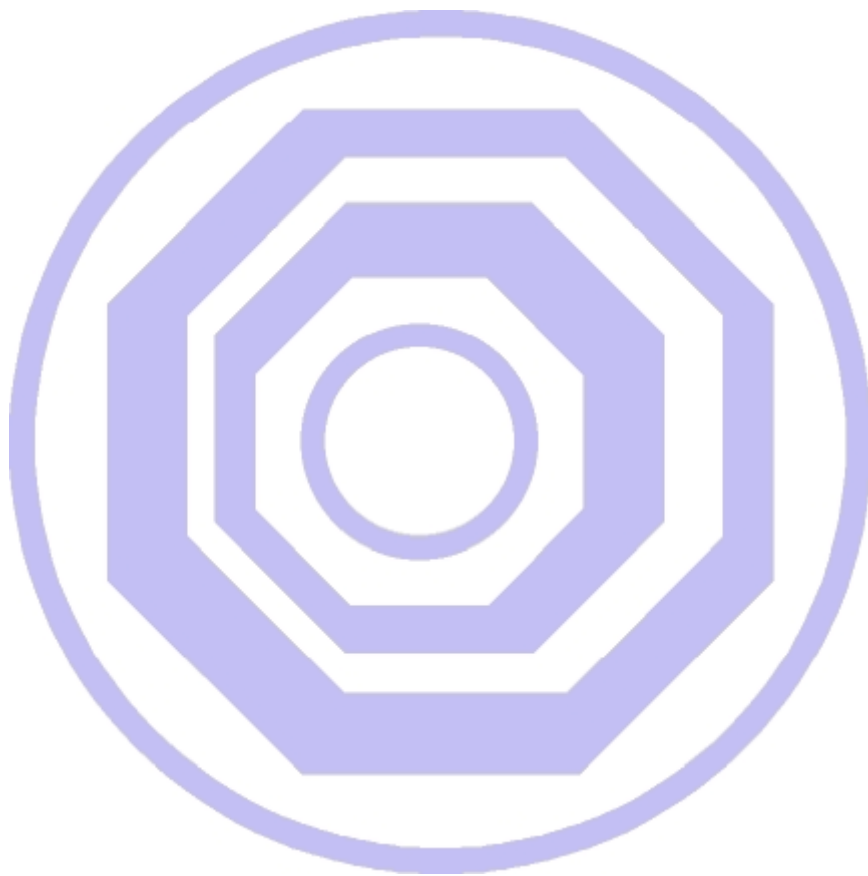
- Representation.” *Ethics and Global Politics* 4, no. 1 (2011): 1–18.
- . *The Representative Claim*. New York: Oxford University Press, 2010.
- Schmitt, Carl. *Constitutional Theory*. Edited by Seitzer Jeffrey. Durham, New York City: Duke University Press, 2008.
- . *The Concept of the Political*. Chicago: University of Chicago Press, 1996.
- . *The Crisis of Parliamentary Democracy*. Edited by Hellen Kennedy. Cambridge: MIT Press, 1994.
- Schumpeter, J. *Capitalism, Socialism, and Democracy*. New York: Harper Torchbook, 1962.
- Sintomer, Yves. “The Meanings of Political Representation: Uses and Misuses of the Notion.” *Raisons Politiques* 50, no. 2 (2013): 13–34.
- Skinner, Quentin. “Hobbes and the Purely Artificial Person of the State.” In *Visions of Politics*. Vol. 3. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Sonia, Alonso, Keane, John; Wolfgang Merkel (Eds). *The Future of Representative Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Sullivan, David. *Education, Liberal Democracy and Populism*. Routledge Taylor & Francis Group., 2019.
- Surel, Yves. *Democracies and the Populist Challenge*. London, England: Palgrave, 2002.
- Svolik, Milan W. “Polarization versus Democracy.” *Journal of Democracy* 30, no. 3 (2019): 30–32.
- Taggart, Paul. *Populism. Concepts in the Social Science.*, 2000.
- . “Populism and Representative Politics in Contemporary Europe.” *Journal of Political Ideologies* 9, no. 3 (2004): 269–288.
- Thomas R. Dye. *Understanding Public Policy*. New York: Pearson, 1988.
- Thomson, Simon. *The King’s Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology*. Princeton New York: Princeton University Press, 2017.
- Thucydides. *The Peloponnesian War*. Edited by Moses I. Finley. London, England: Penguin Classics, 1972.
- Torbjorn, Tannsjo. *Populist Democracy: A Defence*. London, England: Routledge, 1992.
- Tormey, Simon. “The Contemporary Crisis of Representative Democracy.” *Democratic Theory* 1, no. 2 (2014): 104–112.
- Torre, Carlos de la. *Populist Seduction in Latin America*. 2nd ed. Athens: Ohio University Press., 2010.
- . “The People, Populism, and The Leader’s Semi-Embodied Power.” *Rubrica Contemporanea* 2, no. 3 (2013): 5.
- Tuck, Richard. *Hobbes*. New York: Oxford University Press, 1989.

- Urbinati, Nadia. "A Revolt against Intermediary Bodies." *Constellations* 22, no. 4 (2015): 477–486.
- . "Antiestablishment and the Substitution of the Whole with One of Its Parts." *Routledge Handbook of Global Populism*. Routledge, 2019.
- . "Democracy and Republicanism." In *Republicanism and the Future of Democracy*, edited by Yiftah Elazar, And, and Geneviève Rousselière, 152–170. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- . *Democracy Disfigured: Opinion, Truth and the People*. London, England: Harvard University Press, 2014.
- . *Filling the Void, Possessing Power: The Transformative Character of Populist Politics*. "Political Theory of Populism Workshop", April 16-17, 2021. Concordia University, Montreal, 2021.
- . "How to Write about Populism: On Me the People." In *History of European Ideas*, 1–4. New York: Routledge, 2022.
- . "Liquid Parties, Dense Populism." *Philosophy and Social Criticism* Vol. 45(9- (2019).
- . *Me The People: How Populism Transforms Democracy*. Massachusetts: Harvard University Press, 2019.
- . "Never Far: Populism as the Shadow of Democracy." *Green European Journal* 21 (2021).
- . "On Trumpism, or the End of American Exceptionalism." *Teoria Politica*, no. 9 (2019): 209–226.
- . *Pochi Contro Molti: Il Conflitto Politico Nel XXI Secolo*. Bari-Roma: Laterza, 2020.
- . "Political Representation as a Democratic Process." *Redescriptions: Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory* 1, no. 10 (2006): 18–40.
- . "Political Theory of Populism." *Annual Review of Political Science*, 2019.
- . "Populism and the Principle of Majority." *The Oxford Handbook on Populism* (2017).
- . "Reflections on the Meaning of the 'Crisis of Democracy.'" *Democratic Theory* 3, no. 1 (2016).
- . "Representation as Advocacy." *Political Theory* 28, no. 6 (2000).
- . "Representative Constructivism's Conundrum." In *The Constructivist Turn in Political Representation*, edited by and Nadia Urbinati Lisa Disch, Mathijs van de Sande. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2019.
- . *Representative Democracy: Principles and Genealogy*. London and Chicago: The University of Chicago Press, 2006.
- . "Representative Democracy and Its Critics." In *The Future of Representative*

- Democracy*, 2011.
- . “The Populist Phenomenon.” *Raisons Politiques* (2013).
- . “The Populist Substantialization of Popular Sovereignty.” *Rivista Italiana Di Filosofia Politica* 1, no. 1 (2021): 35–53. <https://doi.org/10.36253/rifp-1435>.
- Urbinati, Nadia, and Mark E. Warren. “The Concept of Representation in Contemporary Democratic Theory.” *Annual Review of Political Science* (2008).
- Vilfredo, Pareto. *The Mind and Society*. Edited by Andrew Bongiorno; Arthur Livingston. New York: Harcourt, 1935.
- . *The Rise and Fall of the Elites: An Application of Theoretical Sociology*. New Jersey: The Bedminster Press, 1968.
- Vittori, Davide. “Is Populism Changing the Political Representation of Western Democracies?” *Journal of Political Sciences & Public Affairs* 03, no. 01 (2015): 1–8.
- Waldron, Jeremy. *Political Political Theory: Essays on Institutions*. Cambridge: Harvard University Press, 2016.
- Walker, Jack. “A Critique of the Elite Theory of Democracy.” *American Political Science Review* 60, no. 2 (1996): 285–295.
- Weber, Max. *Political Writings*. Edited by Peter Lassman and Ronald Speirs. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- . “Politics as a Vocation.” In *From Max Weber: Essays in Sociology*, edited by H. H. Gerth and Wright Mills. Oxford: Oxford University Press, 1946.
- Werner, Annika, and Heiko Giebler. “Do Populists Represent? Theoretical Considerations on How Populist Parties (Might) Enact Their Representative Function.” *Representation* 55, no. 4 (2019): 379–392.
- Weyland, Kurt. “Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics.” *Comparative Politics* 34, no. 1 (2001): 1–22.
- . “Neoliberal Populism in Latin America and Eastern Europe.” *Comparative Politics* 31, no. 4 (1999): 379–401.
- . “Populism: A Political Strategic-Approach.” In *Routledge Handbook of Global Populism*, edited by Carlos de la Torre, 73–103. New York: Routledge Taylor & Francis Group., 2019.
- . “Why Latin America Is Becoming Less Democratic.” *Journal of Democracy* 24, no. 3 (2013).
- Winters, J. A. *Oligarchy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Wolff, Jonathan. *An Introduction to Political Philosophy*. Revised. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Yack, Bernard. “Popular Sovereignty and Nationalism.” *Political Theory* 28, no. 4 (2001).

Yasmine, Dawood. “Democracy, Power, and the Supreme Court: Campaign Finance Reform in Comparative Context.” *International Journal of Constitutional Law* 4 (2006): 269–293.

Ysrael Camero & Armando Chaguaceda. “Republicanism and Populism: Articulation of Plurality or Plebeian Democratism?” *Thesis Eleven* 14, no. 1 (2021): 54–72.



SENARAI ISTILAH

- Aristokrasi** : Bentuk pemerintahan yang dikelola di tangan segelintir orang, khususnya kaum bangsawan atau orang-orang terbaik (*aristoi*).
- Demokrasi** : Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno μ (*d mokratía*) “kekuasaan rakyat”, yang terbentuk dari $\eta\mu$ (*dêmos*) “rakyat” dan (*kratos*) “kekuatan” atau “kekuasaan” pada Abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik negara-kota Yunani, salah satunya Athena Klasik. Kata ini merupakan antonim dari α (*aristocratie*) “kekuasaan elite”. Secara teoretis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Sistem politik Athena Klasik, misalnya memberikan kewarganegaraan demokratis kepada elite yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik. Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elite sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara di mulai pada abad ke-19 hingga sekarang.
- Elite** : Dalam teori politik, elite adalah sekelompok kecil orang yang berkuasa, misalnya oligarki, yang menguasai kekayaan atau kekuasaan politik dalam masyarakat. Kelompok ini memiliki posisi yang lebih tinggi daripada rakyat jelata dan hak yang lebih besar daripada kelas masyarakat di bawahnya. Elite dalam teori politik meliputi elite ekonomi, elite politik, elite kekuasaan dan elite sosial budaya. Masing-masing elite ini memiliki peran memengaruhi proses pengambilan kebijakan publik karena memiliki kekuasaan lebih tinggi dibandingkan dengan rakyat kebanyakan.
- Diarki** : Keputusan politik selalu merupakan hasil perbincangan berkelanjutan antara kehendak dan opini. Diarki merupakan dua kekuatan berdaulat yang dimiliki warga untuk berpartisipasi dalam

politik. Dalam konteks ini, diarki merupakan kunci untuk mengapresiasi demokrasi sebagai pemerintahan yang berporos pada kebebasan yang setara.

Kebebasan : Kemampuan untuk bertindak tanpa paksaan atau intervensi dari orang atau kelompok lain. Dalam konteks ini, kebebasan berkaitan dengan tindakan seseorang atau sekelompok orang dalam ruang publik selaras dengan hak yang melekat padanya.

Kesetaraan : Merupakan konsep yang dikaitkan cita-cita yang dikejar dalam demokrasi. Secara umum ada dua jenis kesetaraan yaitu kesetaraan aritmetis dan kesetaraan politis. Kesetaraan aritmetis merupakan kondisi di mana setiap orang memiliki kesempatan yang setara secara statistik [misalnya dalam kemungkinan untuk dipilih menduduki jabatan publik]. Kesetaraan politis atau geometrik merupakan kondisi di mana setiap orang memiliki kesempatan secara proporsional terhadap kedudukan atau posisi sosialnya.

Klientelisme : Merupakan bentuk-bentuk hubungan protektif yang saling menguntungkan antara pribadi atau sekelompok orang yang menempati tempat yang lebih tinggi dalam hierarki sosial [*patron*] dan pengikut yang peduli dengan perlindungan dan perolehan keuntungan tertentu (*klien*). Struktur klientelisme didasarkan pada hubungan pertukaran yang terstruktur secara sistematis. Di satu sisi, ada patron yang mengontrol hubungan, dan sisi lain ada klien yang menerima otoritas dari patron.

Konstitusi : Norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara—biasanya dikodifikasi sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga

masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Dalam bentukan organisasi konstitusi menjelaskan bentuk, struktur, aktivitas, karakter, dan aturan dasar organisasi tersebut.

Mayoritas

: Istilah mayoritas memiliki beragam makna. Mayoritas keseluruhan dalam sistem parlementer adalah perbedaan jumlah anggota legislatif antara pihak pemerintah dan oposisi; mayoritas absolut adalah mayoritas “seluruh” pemilih, bukan hanya orang-orang yang sudah memilih; dan super mayoritas adalah mayoritas yang lebih kuat daripada mayoritas sederhana. Urbinati membedakan mayoritas sebagai metode untuk menentukan pemenang dalam kontestasi politik dan mayoritas sebagai kekuatan adalah mayoritas jumlah yang digunakan sebagai instrumen untuk melawan sekelompok elite yang memonopoli kekuasaan.

Minoritas

: Urbinati memahami minoritas dalam dua arti. Di satu sisi berarti kelompok yang secara aritmatika jumlahnya sedikit sehingga membutuhkan perlindungan dari mayoritas, namun di sisi lain berarti kelompok yang jumlahnya sedikit tetapi memiliki pengaruh yang kuat dalam penyusunan kebijakan publik. Dalam teori elite, mereka adalah elite oligarki, elite ekonomi, elite politik, dan elite kekuasaan yang sering kali merusak relasi representasional antara perwakilan dan yang diwakili.

Monarki

: Berasal dari bahasa Yunani *monos* (μ) yang berarti satu, dan *archein* () yang berarti raja. Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun abad ke-19, terdapat lebih 900 takhta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade kedelapan abad ke-20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya empat negara mempunyai penguasa monarki yang mutlak dan selebihnya memiliki sistem monarki konstitusional. Monarki demokratis berbeda dengan konsep penguasa monarki yang sebenarnya. Pada kebiasaannya penguasa monarki itu akan mewarisi takhtanya.

Tetapi dalam sistem monarki demokratis, takhta penguasa monarki akan berotasi dari kalangan beberapa sultan. Malaysia misalnya, mengamalkan kedua sistem yaitu kerajaan konstitusional serta monarki demokratis.

Monoarki : Merupakan lawan dari diarki yang diasosiasi proses politik yang menjadi domain demokrasi perwakilan. Monoarkhi dalam pemikiran Urbinati dikaitkan dengan proses politik dalam demokrasi langsung. Dalam monoarki kehendak dan opini menjadi kekuatan penguasa dalam proses pengambilan keputusan politik.

Oligarki : Struktur pemerintahan atau kekuasaan yang dipegang oleh sekelompok orang yang selalu mengendalikan kekuasaan untuk mewujudkan keinginan mereka sendiri. Aristoteles menjelaskan oligarki sebagai kekuasaan yang dipegang oleh segelintir orang dan menganggapnya sebagai manifestasi dari pemerintahan yang buruk. Alasannya karena oligarki cenderung bersifat elitis, eksklusif, beranggotakan kaum kaya, dan tidak memedulikan kebutuhan masyarakat.

Pemisahan Kekuasaan : Pemisahan atas fungsi dan struktur lembaga kekuasaan. Dalam politik modern, pemisahan kekuasaan menghasilkan tiga lembaga terpisah: eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif yang bertugas menjalankan roda pemerintahan, legislatif bertugas membuat undang-undang sedangkan yudikatif bertugas mengawasi undang-undang agar berjalan menurut koridor yang ditentukan.

Politik aliran : Politik berdasarkan identitas agama, budaya atau kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. Politik aliran dikelilingi oleh organisasi-organisasi massa, baik secara informal maupun secara formal.

Politik Manichean : Merupakan politik yang mereduksi semua perbedaan menjadi pertarungan kosmis antara dua kekuatan yang saling bertentangan: baik dan jahat, roh dan materi, elite dan rakyat, formal dan informal.

Populisme : Sejumlah pendekatan politik yang dengan sengaja menyebut kepentingan “rakyat” dilawankan dengan kepentingan “elite”. Populisme mempunyai berbagai macam definisi. Terdapat dua

pendekatan dalam mendefinisikan populisme. Pendekatan ideasional mendefinisikan populisme sebagai ideologi prosedural yang lentur yang menegaskan pembelahan tajam antara “rakyat bermoral” dan “elite korup”. Pendekatan ini memiliki tiga elemen dasar, yaitu rakyat, elite, dan kehendak rakyat. Kedua, pendekatan diskursif yang mendefinisikan populisme sebagai suatu konstruksi politik akan penyatuan tuntutan atau aspirasi secara homogen dari kondisi masyarakat yang heterogen. Penyatuan aspirasi rakyat ini dikotomi antara “tuntutan rakyat” yang diabaikan oleh elite penguasa yang tidak responsif. Tuntutan ini direkatkan dengan kesamaan narasi antar rakyat untuk membentuk agenda politik bersama.

Rakyat

: Dalam teori politik, makna rakyat berciri polisemik. *Pertama*, Rakyat sebagai bangsa. Dalam arti sebagai kesatuan bangsa, istilah ‘rakyat’ menunjuk seluruh anggota komunitas politik tertentu dengan tradisi, sejarah, dan wilayah yurisdiksi. *Kedua*, Rakyat sebagai kaum jelata. ‘Rakyat’ juga sering dipakai dalam arti lebih terbatas untuk menunjuk mereka yang termasuk kelas sosial bawah. Buruh dan petani adalah rakyat, sedangkan menteri, konglomerat, dosen bukanlah rakyat. Di sini, arti ‘rakyat’ menunjuk kaum jelata dalam relasi negasi dengan kaum elite, baik elite politik, ekonomi atau kultural. Misalnya, ketika kita dengar ungkapan “Perilaku para politisi dan pebisnis menyengsarakan rakyat”, kata ‘rakyat’ di situ mengungkapkan arti rakyat sebagai kaum jelata. Atau, ketika kita mendengar ungkapan “Kita punya presiden baru yang datang dari kalangan rakyat”, istilah ‘rakyat’ di sini berarti bukan golongan elite. *Ketiga*, Rakyat dalam arti banyak orang atau tiap orang. Dalam kategori ini, arti ‘rakyat’ menunjuk massa, khalayak ramai, kerumunan, banyak orang, setiap orang, tidak terbatas pada ikatan bangsa, agama, kelas, suku, ras atau golongan. Dalam ungkapan “Ketika presiden melewati jalan protokol dalam mobil terbuka, rakyat mengelu-elukan dia dari kiri dan kanan jalan”, apa yang dimaksud ‘rakyat; di situ adalah khalayak ramai, setiap orang, massa. Di sini, ‘rakyat’ tidak

dipahami sebagai bangsa, bukan pula kaum jelata atau kelas tertentu, melainkan sosok setiap orang dalam jumlah banyak.

Republikanisme : Cita-cita tentang pemerintahan yang diselenggarakan demi kepentingan bersama. Dalam pengertian aslinya, republik tidak mengacu pada bentuk pemerintahan atau jenis konstitusi tetapi lebih berkaitan dengan paradigma etis dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Representasi Politik : Relasi dan interaksi antara konstituen dan politikus atau antara perwakilan dengan yang diwakili secara timbal balik dalam kurun waktu tertentu berbicara dan bertindak untuk memperjuangkan kepentingan bersama masyarakat.

Res Privata : Urusan privat atau domestik. Lazimnya istilah ini dipertentangkan dengan *res publica*.

Res Publica : Secara harafiah berarti urusan publik. Lazimnya istilah ini dipertentangkan dengan *res privata*.

Tirani : Kekuatan politik yang berusaha mewujudkan agenda politik mereka melalui paksaan yang dilakukan oleh segelintir atau banyak orang. Apabila dilakukan oleh segelintir orang disebut kekuatan tirani minoritas sedangkan jika dilakukan oleh sekelompok orang disebut tirani mayoritas.